



KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK



3.0

Memperkuat Sinergi Untuk
Menjaga Stabilitas dan Mendorong
Momentum Pemulihan Ekonomi
yang Inklusif di Era Digital



**KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK:
MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS
DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL**

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)



MEMPERKUAT SINERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DI ERA DIGITAL

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 3.0

- PELINDUNG** : Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo.
- PEMIMPIN REDAKSI** : Ketua Bidang II, Dody Budi Waluyo.
- DEWAN EDITORIAL** : Vid Adrison, Telisa Aulia F., M. Rudy Salahuddin, M. Anwar Bashori, Friderica Widyasari, Hendy Priyo Santoso, Nimmi Zulbainarni, Wahyu Utomo, Ninasapti Triaswati, Ahmad Erani Yustika, Yunita Resmi Sari, Asep Mulyana.
- EDITOR PELAKSANA** : Yoga Affandi, Wahyu Agung Nugroho, Donni Fajar Anugrah, Safari Kasiyanto, Danny Hermawan, Arief B. Laksono.
- ADMINISTRASI** : Guruh Suryani, Afiq Wiratma Muhammad.

Kajian Kebijakan Publik adalah kajian yang dipublikasikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang merangkum berbagai perspektif pemikiran, analisis, dan rekomendasi kebijakan ekonomi publik. Untuk Edisi Tahun 2022 ini, kajian mencakup analisis memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas di tengah meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global, serta mendorong momentum pemulihan ekonomi yang inklusif di era digital, termasuk didalamnya akselerasi digitalisasi dan kebijakan hijau untuk inklusi ekonomi dan keuangan.

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

REDAKSI

Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110.

Telp: +62-21-, Fax. +62-21-7201812.

Email: isei.pusat@gmail.com

Website: www.isei.or.id

ISBN

Edisi Pertama, September 2022.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulisan ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Perekonomian dunia diwarnai dengan meningkatnya risiko stagflasi sehubungan dengan tingginya inflasi di beberapa negara khususnya negara maju, yang disertai dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Risiko tersebut dieskalasi dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan dan kondisi geopolitik. Peningkatan tekanan dan ketidakpastian tersebut memiliki risiko rembetan pada perekonomian nasional. Meskipun demikian, momentum perbaikan perekonomian domestik terus berlanjut, ditopang oleh menguatnya permintaan domestik, investasi nonbangunan, dan terjaganya ekspor. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya seperti OJK dan LPS, terus memperkuat sinergi melalui bauran kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan yang inklusif.

Melihat perkembangan tersebut, diperlukan penguatan atas langkah-langkah konkret yang telah ditempuh, didukung dengan strategi yang tepat agar stabilitas perekonomian tetap terjaga dan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus didorong. Berangkat dari pemikiran tersebut, ISEI berkontribusi dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran untuk akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia: menjaga stabilitas dan mendorong momentum pertumbuhan inklusif di era digital. Melalui keanggotaan yang terdiri dari berbagai latar belakang, ISEI dapat berperan aktif dalam menyampaikan pandangan secara konstruktif dari berbagai aspek di sektor ekonomi dan keuangan, serta sejalan dengan agenda pembangunan, sebagaimana buku Kajian Kebijakan Publik edisi 3.0 ini.

ISEI berkeyakinan bahwa tantangan perekonomian saat ini memerlukan sinergi yang lebih dari biasanya, mengesampingkan ego sektoral dan meletakkan kepentingan perekonomian nasional sebagai prioritas utama. Untuk itu, pemenuhan satu prasyarat utama berupa vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan perlu ditekankan, agar pembukaan aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara bertahap diikuti dengan tingkat permintaan yang lebih resilien. Begitu pula dengan lima respons kebijakan, perlu terus dilakukan pematapan. Tantangan dan usulan rekomendasi untuk menjaga stabilitas, mendorong momentum pertumbuhan, dan digitalisasi serta kebijakan hijau untuk inklusi ekonomi dan keuangan, dinarasikan dalam langkah-langkah konkret, sehingga memudahkan untuk implementasinya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami berharap Kajian Kebijakan Publik ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah dan *stakeholders* penting lainnya dalam pengambilan kebijakan. Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat, stabilitas perekonomian nasional akan tetap terjaga dan momentum pemulihan ekonomi yang inklusif di era digital terus dapat didorong. Semoga Allah Tuhan Yang Mahakuasa meridai langkah-langkah kita.

Dr. Perry Warjiyo

Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI

PENGANTAR EDITORIAL

Sebagai organisasi profesi yang bergerak di bidang kajian dan perumusan kebijakan, PP ISEI melalui Bidang II pada tahun ini kembali menerbitkan buku Kajian Kebijakan Publik edisi ketiga yang bertema “Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital”. Mencermati prospek pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik di tengah tantangan eksternal yang tidak ringan, serta pentingnya untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi nasional melalui pendekatan multisektor, buku ini menjadi media bagi ISEI dalam menyampaikan gagasan mengenai formulasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan strategi pembangunan nasional serta mengantisipasi risiko.

Tema yang diangkat tahun ini didasarkan pada relevansinya yang erat pada dinamika eksternal yang tengah terjadi serta pentingnya sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas dan memantapkan kembali modalitas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, aspek digitalisasi juga dilihat sebagai elemen yang semakin strategis untuk diakselerasi implementasinya secara luas dalam mewujudkan efisiensi bagi perekonomian, dimana pada gilirannya dapat menekan biaya produksi, memacu kembali iklim inovasi, dan meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. ISEI juga meyakini bahwa momentum pemulihan tidak cukup jika hanya bertumpu pada satu aspek kebijakan, oleh karenanya penguatan sinergi lintas lembaga perlu senantiasa ditempuh dalam kerangka kebijakan yang semakin inovatif serta sejalan dengan arah pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru. Hal ini selaras dengan materi pada beberapa edisi buku sebelumnya yang mengintisarikan pentingnya penguatan faktor produksi dan strategi mengalibrasi kebijakan pemulihan ekonomi dalam menyambut era normalitas baru.

Berbagai analisa tersebut disusun menjadi 4 (empat) bagian utama dalam buku ini yang menjelaskan secara runut beberapa elemen kunci yang memengaruhi dinamika terkini perekonomian serta bagaimana respons kebijakan yang ditempuh secara berimbang dalam dimensi pembangunan di jangka pendek dan menengah panjang. Buku ini disusun melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah, telaahan 16 *Focus Group* bidang II, dan prosiding rekomendasi kebijakan ISEI di pusat maupun cabang.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberi pandangan baru dan masukan yang bermanfaat bagi setiap pihak baik dari unsur akademisi, pemerintah, maupun pelaku usaha untuk bersama menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Dody Budi Waluyo, S.E., MBA.

Ketua Bidang II PP ISEI - Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

PEREKONOMIAN DUNIA SAAT INI DALAM KONDISI PENUH TANTANGAN YANG BERAT. Keberlangsungan pemulihan ekonomi global pascapandemi Covid-19, dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan utama.

- **Pertama, semakin meningkatnya risiko stagflasi, terutama di negara maju.**

Inflasi global terus menunjukkan tren peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan. Pada Juli 2022 lalu, IMF merevisi tingkat inflasi global untuk tahun 2022 dari 7,4% (yoy) menjadi 8,3% (yoy) dan untuk tahun 2023 dari 4,8% (yoy) menjadi 5,7% (yoy), jauh lebih tinggi dari tahun 2021 yang berada pada 4,7% (yoy). Kenaikan inflasi global setidaknya bersumber pada: dampak pandemi yang menyebabkan terganggunya rantai pasokan global, perang Ukraina serta penerapan sanksi dan retaliasinya, meluasnya implementasi kebijakan proteksionisme khususnya pangan (sampai Juli 2022 terdapat 35 negara yang mengimplementasikan kebijakan proteksionisme pangan), perbaikan ekonomi pascapandemi yang menyebabkan keketatan pasar tenaga kerja (*labor market tightness*) di negara maju yang berdampak pada inflasi dari sisi upah, dan meningkatnya ekspektasi inflasi yang terlihat dari *consensus forecast* di berbagai negara khususnya AS.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia mulai mengalami pelambatan.

Proses pemulihan ekonomi dunia yang belum merata akan kembali tertekan pada 2022. Pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 juga akan lebih rendah dari perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 direvisi ke bawah masing-masing dari 3,5% (yoy) menjadi sebesar 2,9% (yoy) dan dari 3,4% (yoy) menjadi 2,8% (yoy). Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dilakukan pada hampir seluruh negara termasuk AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko terjadinya kekhawatiran resesi di AS mengingat sumber tekanan inflasi berasal dari sisi permintaan, sehingga membutuhkan respons yang signifikan dari The Fed untuk menurunkan tekanan inflasi.

Pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif dan meningkatnya risiko stagflasi mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Hingga Agustus 2022, berbagai indikator risiko ketidakpastian pasar keuangan, seperti VIX dan EPU, terus menunjukkan peningkatan. Pasar saham dan obligasi juga menunjukkan kenaikan volatilitas yang cukup tinggi. *Yield UST 10 year* meningkat, sementara harga saham AS melemah. Persepsi risiko negara berkembang juga meningkat. Tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut menyebabkan aliran modal keluar dan meningkatnya tekanan nilai tukar negara-negara berkembang. Ke depan, ketidakpastian pasar keuangan global masih akan tinggi.

- **Kedua, megatren digitalisasi.** Digitalisasi ekonomi-keuangan global berlangsung sangat cepat, dengan dominasi *BigTech* serta semakin meluasnya transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran antarnegara. Digitalisasi telah dimulai sebelum pandemi Covid-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital seperti *internet of things* (IoT), *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence* (AI) termasuk *machine learning* dan *deep learning*, serta *metaverse*. Teknologi ini mampu menghadirkan produk (barang dan jasa) melalui *smartphone*, kapanpun dan dimanapun. Sejak pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas, digitalisasi ekonomi dan keuangan termasuk sistem pembayaran semakin terakselerasi. Pada konteks mata uang digital (*sovereign digital money*), perkembangan digitalisasi diwarnai dengan analisis dan diskusi mengenai *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Survei terbaru IMF menunjukkan 90% dari bank sentral anggota IMF berminat dan tengah melakukan *review* atas CBDC. Tak ayal, ekonomi dan keuangan digital mampu menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan.

Di sisi lain, muncul sejumlah risiko baru dari digitalisasi yang perlu dimitigasi dengan tepat mengingat ke depan ekonomi-keuangan digital akan terus meningkat pesat. Termasuk didalamnya, isu kepemilikan dan perlindungan data pribadi, pajak transaksi digital, layanan jasa keuangan oleh entitas bukan lembaga keuangan (*shadow banking*), meluasnya penggunaan *cryptocurrency* dan *crypto assets* yang memiliki risiko relatif tinggi karena tidak terdapat *underlying transaction*, serta tingginya serangan siber.

- **Ketiga, semakin meningkatnya tuntutan pengembangan ekonomi-keuangan hijau.** Perubahan iklim dapat berdampak sangat signifikan, baik terhadap stabilitas

makroekonomi dan sistem keuangan, maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem dapat mengganggu sisi suplai (*physical risk*) terutama produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak *transition risk* dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti *carbon tax*, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, perubahan iklim global juga menimbulkan ancaman, termasuk karena adanya transformasi ekonomi hijau yang memengaruhi kualitas eksposur perbankan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak bencana alam. Hal yang serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berisiko tertekan baik dari sisi suplai maupun permintaan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana memitigasi risiko perubahan iklim melalui kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan hijau, dengan memitigasi *unintended consequences* dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian jangka pendek.

NAMUN DEMIKIAN, KITA PATUT BERSYUKUR PEREKONOMIAN DOMESTIK TERUS MEMBAIK: PEMULIHAN BERLANJUT, STABILITAS TERJAGA.

Memasuki triwulan II 2022, perekonomian Indonesia terus membaik dengan tumbuh sebesar 5,44% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 5,01% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, tetap terjaganya kinerja ekspor, serta masih tumbuh kuatnya investasi sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi dan perbaikan iklim usaha. Perbaikan pertumbuhan ekonomi juga lebih merata, terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Stabilitas eksternal juga tetap terjaga di tengah tekanan aliran modal portofolio dan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Sementara itu, inflasi cenderung meningkat (IHK Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 4,94% (yoy)) terutama akibat tekanan dari sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas global yang tercermin pada tingginya inflasi kelompok *volatile food/VF* (11,47% yoy) dan inflasi kelompok *administered prices/AP* (6,51% yoy). Inflasi kelompok AP yang tinggi dipengaruhi kenaikan bahan bakar avtur yang mendorong inflasi angkutan udara. Kelompok inflasi inti masih terkendali pada level 2,86% (yoy) sejalan dengan *output gap* yang masih negatif dan dukungan

konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Perbaikan ekonomi tersebut akan berlanjut ke depan, sehingga untuk keseluruhan tahun 2022 dapat mencapai 4,5-5,3% (yoy). Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya tekanan inflasi domestik tetap perlu diwaspadai, karena berisiko menekan kinerja ekspor dan konsumsi swasta. **Dalam jangka menengah-panjang, ekonomi Indonesia berpotensi untuk tumbuh pada lintasan yang membaik, sehingga mampu mementaskan ekonomi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.**

MENGHADAPI TANTANGAN KE DEPAN, KERANGKA SINERGI KEBIJAKAN TETAP PERLU DIARAHKAN PADA UPAYA PERBAIKAN STRUKTUR EKONOMI DAN MENGATASI PERMASALAHAN SIKLICAL JANGKA PENDEK.

Tiga tantangan perekonomian global, yakni risiko stagflasi, megatren digitalisasi, dan ekonomi-keuangan hijau, harus ditangani dengan penguatan sinergi antarotoritas. Sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan perluasan sektor-sektor ekonomi prioritas sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat (*necessary*) untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi perlu didorong dengan perluasan sektor-sektor prioritas. Pengembangan 38 sektor prioritas melalui Paket Kebijakan Terpadu KSSK tahun 2021 dan 8 sektor prioritas tambahan perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Akselerasi reformasi sektor riil juga perlu terus dikedepankan untuk mendukung pengembangan 46 sektor prioritas tersebut. Reformasi sektor riil ini perlu diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal perlu diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas (*pro-stability*) dengan tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Kebijakan fiskal tetap perlu diarahkan sebagai *shock absorber* dari tekanan perkembangan global. Akselerasi reformasi sektor keuangan diarahkan untuk mendukung peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Penguatan digitalisasi ekonomi-keuangan dan kebijakan hijau diarahkan untuk mendorong akselerasi inklusi ekonomi-keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.

UNTUK MENDUKUNG EKONOMI INDONESIA PULIH LEBIH CEPAT, BANGKIT LEBIH KUAT, ISEI TELAH MERUMUSKAN REKOMENDASI PENGUATAN KEBIJAKAN YANG TERBAGI KE DALAM 3 KELOMPOK.

Kelompok pertama, rekomendasi untuk memperkuat sinergi dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dalam upaya menjaga berlanjutnya momentum pemulihan di tengah peningkatan tekanan global terhadap stabilitas, peran bauran kebijakan semakin strategis. Sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas perekonomian. Untuk itu, rekomendasi penguatan sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi mencakup:

1. Melanjutkan kebijakan makroekonomi yang konsisten dan berhati-hati. Tiga pelajaran penting yang didapat dalam hal pengelolaan kebijakan makroekonomi: (i) kebijakan nonkonvensional (*unconventional policy*) melalui bauran kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat terlaksana dengan baik terutama karena implementasi kebijakan yang dilaksanakan memiliki kredibilitas yang kuat; (ii) untuk merespons dampak luar biasa (*extraordinary shock*) akibat pandemi Covid-19 maka dibutuhkan juga kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*); dan (iii) koordinasi dan komunikasi berperan penting dalam memengaruhi pembentukan ekspektasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada efektivitas kebijakan dalam mencapai targetnya. Kebijakan ini mencakup:
 - Kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Sementara itu, kebijakan fiskal dapat mengatasi *shock* dalam jangka pendek dan menengah melalui optimalisasi penerimaan pemerintah dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Di sisi lain, meningkatnya transaksi *e-commerce* memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Selain itu, Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tetap tumbuh positif di masa pandemi dengan mengurangi lapisan tarif CHT dan menurunkan batasan

golongan produksi. Langkah lainnya yaitu mengenakan cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan, sekaligus menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan efisiensi belanja pemerintah juga dapat terus diupayakan melalui pengurangan subsidi BBM. Usulan lainnya yaitu merubah pola penyerapan anggaran tidak lagi rendah pada awal tahun dan meningkat drastis pada akhir tahun karena pola ini tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

- Kebijakan fiskal juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut salah satunya melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh transaksi perpajakan. NIK merupakan identitas dasar yang dimiliki oleh setiap orang (bahkan untuk anak yang baru lahir), maka jumlah orang yang masuk ke dalam sistem perpajakan akan meningkat drastis. Kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam jangka panjang, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, terdapat tiga pelajaran yang bisa diambil dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dan 2021, yaitu:

- (i) Perlunya alokasi anggaran yang cukup untuk kesehatan agar pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) berjalan dengan baik. Hal ini penting mengingat sektor kesehatan yang membaik akan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.
- (ii) Perlunya fokus pada kebijakan yang meningkatkan permintaan (*demand boosting*). Sebagai contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin atau terdampak pandemi yang dapat mendorong daya beli di tengah pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi.
- (iii) Perlunya mempertimbangkan kembali kebijakan yang bersifat mengurangi biaya (*cost-reducing policies*) karena memiliki *leverage* terbatas. Misalnya, pembebasan PPh 22 untuk barang impor akan mengurangi biaya produsen, namun dalam situasi pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan suatu barang lebih rendah dari harga yang ditawarkan produsen. Oleh karena itu,

produsen tidak memiliki insentif untuk memproduksi walaupun biaya produksi turun.

2. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia perlu terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sementara kebijakan makroprudensial akomodatif, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih rinci, penguatan kebijakan ini mencakup antara lain:
 - (i) Penguatan pengendalian inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi kebijakan antarotoritas;
 - (ii) Implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi;
 - (iii) Stabilisasi nilai tukar sebagai bagian dari pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung penguatan operasi moneter.
3. Pada konteks penguatan bauran kebijakan nasional, sinergi kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan satu kondisi prasyarat (*necessary condition*) dan lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (*sufficient conditions*) perlu dilanjutkan. Satu kondisi prasyarat tersebut yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19, sementara lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan mencakup: (i) akselerasi transformasi sektor riil; (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal; (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan; (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (v) ekonomi dan keuangan hijau.
4. Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda, serta Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan harga atau inflasi terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui TPI/TPID dengan Program 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Untuk mengatasi tingginya tekanan kenaikan harga pangan pada inflasi VF, penguatan sinergi pengendalian inflasi terutama dari sisi suplai antara lain diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP ditujukan untuk menjaga kestabilan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, memperbaiki efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan, serta meningkatkan produktivitas

dan diversifikasi produk olahan. Dengan implementasi GNPIP secara integratif dan masif di berbagai daerah, inflasi VF akan dapat dijaga maksimal sebesar 5% (yoy).

Kelompok kedua, rekomendasi untuk memperkuat sinergi dalam rangka mendorong momentum pemulihan ekonomi, yang mencakup penguatan kebijakan pada 12 sektor kebijakan, sebagaimana dalam tabel berikut.

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
1.	Sektoral Penopang Pemulihan Ekonomi	(i) Penguatan ketahanan pelaku usaha pascapandemi Covid-19; (ii) Optimalisasi pemanfaatan belanja daerah, termasuk Program Aksi Afirmasi Pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) terutama UMKM; dan (iii) Terjaganya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
2.	Energi	(i) Upaya diversifikasi berkelanjutan untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas energi tertentu, termasuk transisi hijau (dari batubara ke energi bersih) yang didukung dengan pembiayaan yang memadai melalui obligasi hijau dan sukuk hijau, <i>blended finance</i> , <i>carbon pricing</i> , dan taksonomi hijau; (ii) Komitmen kuat untuk dekarbonisasi dan transisi energi yang adil dan terjangkau; dan (iii) Mempercepat kerangka regulasi untuk percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
3.	Ketahanan Pangan	(i) Jangka pendek: penguatan monitoring dan koordinasi pada KAD antarwilayah yang mengalami surplus dan defisit; (ii) Jangka menengah-panjang: (a) pengembangan <i>food estate</i> untuk ketahanan pangan, khususnya wilayah timur Indonesia. Program <i>food estate</i> tersebut sebaiknya juga memperhatikan kondisi iklim setempat dan kearifan lokal warga sekitar untuk meminimumkan potensi konflik sosial; dan (b) meningkatkan peran BUMN serta BUMD dalam menjaga ketahanan pangan (sinergi antara Badan Pangan Nasional, <i>Food ID</i> , dan BUMD).
4.	Ketenagakerjaan, Kependudukan, dan Kesehatan	Prioritas Kebijakan berdasarkan: (i) Pengeluaran: kebijakan PEN difokuskan untuk menjangkau kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah; (ii) Status Tenaga Kerja: kebijakan PEN fokus untuk menjangkau pekerja di sektor informal (akomodasi, makanan dan minuman, transportasi pergudangan, perdagangan); (iii) Gender: kebijakan PEN menjangkau perempuan (penyedia akomodasi, makanan dan minuman);

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> (iv) Pendidikan, fokus pada: sektor berpendidikan rendah (konstruksi - lulusan SD, dan fasilitas pendidikan kepada kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah); dan (v) Kesehatan: kebijakan PEN fokus kepada pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan serta dukungan fasilitas kesehatan bagi kelompok pendapatan menengah bawah dan rendah.
5.	Infrastruktur	<p>Pembangunan infrastruktur kritikal pemulihan ekonomi nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Vaksin sebagai <i>game changer</i>; (ii) Sarana-prasarana kesehatan (RS, puskesmas); (iii) Infrastruktur ketahanan pangan (termasuk irigasi, bendungan, cetak sawah baru); (iv) Infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet gratis/bersubsidi); (v) Infrastruktur fisik; (vi) Infrastruktur energi (listrik dan gas); (vii) Infrastruktur pendukung pola hidup bersih sehat; dan (viii) <i>Soft infrastructure</i> kesehatan (JKN dan teknologi kesehatan berbasis digital).
6.	UMKM	<ul style="list-style-type: none"> (i) Penguatan pembiayaan dan adopsi digital (subsidi bunga KUR, kualitas produk, digitalisasi proses keuangan termasuk pembayaran termasuk dengan QRIS, kemudahan perizinan, insentif fiskal, akses pasar, akses bahan baku, penguatan ekosistem); dan (ii) Penguatan pendataan dan skoring UMKM agar dapat meluncurkan berbagai program bantuan untuk UMKM (iii) memperkuat kemitraan yang lebih adil antara UMKM dengan <i>e-commerce</i>.
7.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> (i) MICE: pelaksanaan MICE pemerintah dan internasional terjadwal, fasilitas bidding MICE internasional; proses perizinan terintegrasi di daerah, termasuk pengawasan penerapan protokol kesehatan; (ii) Penanganan <i>scarring effects</i> pariwisata: relokasi tenaga kerja pendukung keahlian baru, relokasi modal dan dukungan investasi, peningkatan inklusi dan literasi digital; (iii) Korporasi: restruktur strategi bisnis, struktur keuangan, manajemen; (iv) Perbankan: penyaluran kredit ke sektor prioritas dan kredit modal kerja untuk ekspansi bisnis; dan (v) Pemerintah: memulihkan sektor pariwisata yang masih lesu (penghapusan syarat antigen dan PCR bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)).

No.	Sektor	Rekomendasi Penguatan Kebijakan
8.	Ekonomi-Keuangan Syariah	(i) Pilar I - Pemberdayaan Ekonomi Syariah: penguatan 5 (lima) sektor unggulan - industri makanan halal, halal fesyen, pariwisata halal, pertanian, <i>renewable energy</i> ; (ii) Pilar II - Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: mengoptimalkan <i>Islamic social finance</i> baik keuangan komersial syariah & ZISWAF; dan (iii) Pilar III - Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi: berbagai bentuk program edukasi dan sosialisasi untuk literasi syariah.
9.	Sumber Daya Kemaritiman	(i) Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim (termasuk simplifikasi proses bisnis, integrasi sistem layanan logistik, mempermudah pembayaran); (ii) Wisata bahari berbasis potensi lokal; dan (iii) Pengembangan sumber daya perikanan, rumput laut, dan air laut.
10.	Industri Ekonomi Kreatif	(i) <i>Quick wins</i> : pendekatan komunikatif dan populis atas HAKI (sosialisasi pendaftaran HAKI produk/karya kreatif, seminar manajemen SDM); dan (ii) <i>Medium terms</i> : pelaksanaan asistensi dan penguatan <i>milestone</i> ekonomi kreatif nasional (termasuk stimulus).
11.	Akses Pembiayaan	(i) Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit khususnya UMKM; (ii) Perluasan akses pembiayaan UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM); (iii) Pengembangan KUR; (iv) Penggunaan platform digital untuk pembiayaan dan pembayaran; dan (v) Pengembangan database profil UMKM.
12.	Perdagangan dan Keuangan Internasional	(i) Pengurangan hambatan perdagangan (tarif nontarif); (ii) Pemanfaatan teknologi modernisasi perdagangan; dan (iii) Percepatan penyelesaian ratifikasi <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).

Kelompok Ketiga, Rekomendasi untuk mengakselerasi digitalisasi dan kebijakan hijau untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Pada area digitalisasi, penguatan kebijakan mencakup area sebagai berikut. Pertama, dalam jangka pendek, Pemerintah perlu melakukan beberapa hal berikut : (i) menyusun Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan orkestrasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital ke depan, sehingga dapat melengkapi strategi keuangan digital seperti *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dari Bank Indonesia dan kebijakan ekonomi digital lainnya; (ii) membentuk Komite Nasional dan

Project Management Office (PMO) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, terkoneksi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui: pengembangan dan perluasan infrastruktur, penyediaan SDM digital yang mumpuni, stimulasi riset inovasi dan pengembangan usaha, penciptaan iklim usaha (termasuk tata kelola data), penguatan investasi dan pembiayaan, serta penguatan koordinasi lintas-sektor, K/L, dan swasta.

Kedua, pada jangka panjang, penguatan kebijakan/inisiatif/program yang perlu dijalankan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital nasional adalah implementasi dan *monitoring* PMO Pengembangan Ekonomi Digital. Implementasi dan *monitoring* sebagai solusi *medium terms* ini perlu fokus pada: (i) infrastruktur; (2) SDM; (3) riset, inovasi, dan pengembangan usaha; (4) iklim usaha yang kondusif (termasuk tata kelola data); dan (5) pendanaan serta investasi. Rekomendasi penguatan kebijakan ini didasarkan pada tantangan pembangunan ekonomi dan keuangan digital Indonesia, yang meliputi: belum memadainya infrastruktur digital nasional (terdapat 12 ribu desa yang belum tersentuh internet), kapasitas SDM yang belum memadai (pada 2015-2030 Indonesia masih membutuhkan 9 juta talenta digital atau 600 ribu per tahun), regulasi yang belum kondusif (masih lemahnya keamanan siber, perlindungan data, dan banjirnya produk impor), serta *mindset* yang masih tertinggal.

Pada konteks pengembangan UMKM *go digital*, rekomendasi penguatan kebijakan termasuk: pelaksanaan literasi digital secara lebih masif dan kontinu terutama kepada *local champion* di daerah, pemberian subsidi biaya logistik untuk mendorong UMKM masuk ke pasar digital dan mampu bersaing dengan perusahaan besar, dan peningkatan penggunaan *e-catalog* UMKM dalam pengadaan. Sementara itu, rekomendasi penguatan kebijakan perlindungan konsumen di era digital termasuk edukasi dan sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal media komunikasi untuk menjangkau kebutuhan informasi masyarakat (misalnya pinjol yang memiliki bunga dan biaya sangat tinggi), tersedianya kelengkapan petunjuk teknis atas implementasi kegiatan di pusat dan daerah, dan penciptaan *omnichannel* untuk kemudahan akses terhadap penyelesaian pengaduan konsumen mulai generasi lanjut sampai dengan generasi z.

Terkait kebijakan ekonomi-keuangan hijau, terdapat empat usulan langkah yang perlu menjadi pertimbangan bersama. Pertama, Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan percepatan penerapan ekonomi hijau. Percepatan ini ditujukan untuk segera menyelamatkan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat mengganggu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan iklim turut memengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan harga pangan dalam jangka pendek. Sementara itu, kerusakan alam akibat perubahan iklim dapat menghalangi pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan prasyarat bagi transformasi Indonesia menjadi ekonomi yang maju.

Kedua, perlunya mendorong upaya dekarbonisasi melalui penguatan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sudah berjalan. Kebijakan ini dapat menjadi *backbone* strategi pemulihan yang akan mengantarkan Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Melalui PRK, *trade-off* antara pembangunan ekonomi dan isu-isu lingkungan yang terkait dengan dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. Indikator keberhasilan PRK yaitu Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan per satuan *output* ekonomi) diharapkan turun secara bertahap melalui proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi bersih (energi baru terbarukan), peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.

Ketiga, Pemerintah perlu terus mendorong transisi energi melalui peralihan dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini sebagai langkah menuju persiapan industri hijau yang kompetitif dan berdaya saing di masa depan. Saat ini, Pemerintah telah menetapkan target penggunaan EBT mencapai 23% dari energi primer pada tahun 2025. Dengan target tersebut, diharapkan pengurangan emisi karbon bisa mencapai 29-41% berdasarkan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada 2030 dan *net zero emission* (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Keempat, perlunya untuk mendorong investasi dan pembiayaan hijau di Indonesia. Saat ini, tren investasi hijau berbasis *Environmental, Social and Governance* (ESG) di pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Minat portofolio investasi hijau semakin meningkat di Indonesia sejalan dengan penerbitan POJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mengidentifikasi 11

jenis portofolio hijau yang perlu dilaporkan oleh sektor keuangan. Apabila taksonomi hijau diperkuat dan diharmonisasi dengan instrumen hukum serupa, maka potensi investasi hijau akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha yang berhasil mendapat label hijau. Taksonomi hijau merupakan klasifikasi atas aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PENGANTAR EDITORIAL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I TANTANGAN PEREKONOMIAN TERKINI DAN SINERGI KEBIJAKAN	1
1.1 Perekonomian Global Diwarnai oleh Meningkatnya Risiko Stagflasi	1
1.1.1 Tekanan Inflasi Terus Berlanjut	2
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Mulai Melambat.....	6
1.1.3 Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Meningkat.....	9
1.2 Semakin Pesatnya Perkembangan Teknologi Digital	11
1.3 Meningkatnya Tuntutan akan Ekonomi-Keluarga Hijau	14
1.4 Perekonomian Domestik Terus Membaik: Pemulihan Berlanjut, Stabilitas Terjaga.....	15
1.5 Sinergi Kebijakan Nasional untuk Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi	18
1.6 Penutup	24
BAB II MEMPERKUAT SINERGI KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA STABILITAS DARI MENINGKATNYA TEKANAN GLOBAL	27
2.1 Melanjutkan Kebijakan Makroekonomi yang Konsisten dan Berhati-Hati	28
2.1.1 Kebijakan Fiskal sebagai <i>Shock Absorber</i> dan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.2 Peran Fiskal sebagai <i>Shock Absorber</i> dalam Jangka Pendek & Menengah	31
2.1.3 Peran Fiskal sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Panjang.....	35
2.1.4 Kebijakan Moneter.....	37
2.2 Penguatan Bauran Kebijakan Nasional	41
2.2.1 Satu Prasyarat, Lima Respons Kebijakan.....	42
2.2.2 Sinergi Kebijakan Antarotoritas untuk Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi	46
2.3 Penguatan Kebijakan Ekonomi Regional.....	48
2.3.1 Perkembangan Inflasi Daerah	49
2.3.2 Program Pengendalian 4K.....	50
2.3.3 Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).....	55
BAB III MEMANTAPKAN REFORMASI STRUKTURAL UNTUK MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI	58
3.1 Intensifikasi Kebijakan Sektor Penopang Pemulihan Ekonomi	58
3.2 Penguatan Kebijakan Energi dan Ketahanan Pangan	61
3.2.1 Penguatan Kebijakan Energi	61
3.2.2 Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan	61
3.3 Penguatan Kebijakan pada Sektor Ketenagakerjaan, Kependudukan, dan Kesehatan	63

3.4	Pemberdayaan Infrastruktur.....	67
3.5	Penguatan Peran UMKM	72
3.5.1	Lima Strategi Utama Pengembangan Ekonomi Inklusif	72
3.5.2	Penguatan Pengembangan UMKM	76
3.6	Penguatan Kegiatan Pariwisata	77
3.6.1	Penguatan melalui Pariwisata Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)	77
3.6.2	Pengaruh <i>Scarring Effect</i> di Sektor Pariwisata.....	78
3.7	Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	79
3.8	Pemberdayaan Sumber Daya Kemaritiman.....	81
3.8.1	Potensi Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman	81
3.8.2	Strategi Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman	83
3.9	Pemberdayaan Industri Ekonomi Kreatif.....	88
3.10	Sinergi Penguatan Akses Pembiayaan	89
3.11	Penguatan Perdagangan dan Keuangan Internasional	90
BAB IV AKSELERASI DIGITALISASI DAN KEBIJAKAN HIJAU UNTUK INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN		93
4.1	Akselerasi Pembangunan Ekonomi & Keuangan Digital Nasional	94
4.1.1	Tantangan Pembangunan Ekonomi & Keuangan Digital Nasional.....	94
4.1.2	Solusi Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional	97
4.1.3	Analisis Risiko dan Mitigasinya	99
4.2	Akselerasi Pengembangan Digitalisasi UMKM.....	99
4.2.1	Tantangan Utama Digitalisasi UMKM	99
4.2.2	Solusi untuk Mendorong Digitalisasi UMKM	102
4.2.3	Analisis Risiko dan Mitigasinya	103
4.3	Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital	104
4.3.1	Tantangan Utama Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital	104
4.3.2	Solusi untuk Penguatan Perlindungan Konsumen.....	108
4.4	Akselerasi Menuju Ekonomi Hijau.....	111
4.5	Mendorong Transisi Energi Menuju Ekonomi Hijau	112
4.6	Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Ekonomi Hijau.....	113
REFERENSI		116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PMI <i>Suppliers' Delivery Times Index</i>	3
Grafik 2. Negara Terbesar Pengekspor Minyak Dunia.....	4
Grafik 3. Kebijakan Proteksionisme	5
Grafik 4. Probabilitas Stagflasi AS.....	8
Grafik 5. Risiko Stagflasi Beberapa Negara.....	8
Grafik 6. Ketidakpastian Pasar Global Naik.....	9
Grafik 7. Aliran Modal Asing Obligasi	10
Grafik 8. Aliran Modal Asing Pasar Saham.....	10
Grafik 9. Nilai Tukar USD.....	10
Grafik 10. Kapitalisasi <i>BigTechs</i> & Bank Besar (Miliar Dolar AS)	11
Grafik 11. Nilai Transaksi UE	12
Grafik 12. Nilai Transaksi <i>Digital Banking</i>	12
Grafik 13. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	30
Grafik 14. PMI & <i>Investment-Business Survey</i> (rhs).....	30
Grafik 15. Pengeluaran Pemerintah Pusat, 2011-2020.....	34
Grafik 16. Perkembangan Inflasi Indonesia.....	41
Grafik 17. Depresiasi Rupiah Dibanding Negara Lain.....	41
Grafik 18. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional tahun 2019.....	106
Grafik 19. Total Investasi ESG Indonesia Tahun 2014-2021	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prinsip Pembelian SBN oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana	29
Gambar 2. Kerangka Kebijakan Fiskal	31
Gambar 3. Arah Kebijakan Moneter Tahun 2022	38
Gambar 4. Koordinasi Kebijakan	42
Gambar 5. Sinergi Kebijakan Nasional.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Serapan Anggaran PEN 2021	34
Tabel 2. Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok <i>Volatile Food</i> Juli 2022 (mtm).....	49



BAB I

TANTANGAN PEREKONOMIAN TERKINI DAN SINERGI KEBIJAKAN

Prospek keberlanjutan pemulihan ekonomi global dihadapkan pada 3 (tiga) tantangan utama. Di tengah penyebaran Covid-19 yang mulai mereda, dunia kembali dihadapkan oleh berbagai tantangan yang tidak mudah dan akan menentukan arah ekonomi dunia ke depan. Tantangan *pertama* adalah semakin mengemukanya risiko stagflasi, bahkan resesi, terutama di negara-negara maju baik akibat dari luka yang ditinggalkan oleh pandemi Covid-19 ataupun akibat perang di Ukraina. *Kedua*, semakin maraknya tren digitalisasi di dunia. Memang pada satu sisi penggunaan teknologi digital memberikan banyak manfaat baik bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas, namun di sisi lain muncul risiko gangguan stabilitas sistem keuangan, termasuk yang terkait dengan *private money* dan *crypto assets* yang bersifat spekulatif. *Ketiga*, semakin perlunya upaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan hijau sebagai respons dari perubahan iklim yang dapat mengganggu tidak hanya aspek kemanusiaan, namun juga perekonomian secara masif. Bahkan, perubahan iklim, apabila tidak segera ditangani dengan baik akan dapat menjadi *The Next Great Crisis*.

1.1 Perekonomian Global Diwarnai oleh Meningkatnya Risiko Stagflasi

Ekonomi dunia saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Meskipun penyebaran Covid-19 telah menurun, disrupsi perekonomian yang ditimbulkan masih terasa. Pandemi Covid-19 yang telah direspons oleh berbagai kebijakan yang sangat masif dan tidak pernah ditempuh sebelumnya (*unprecedented and unconventional policies*) di sektor kesehatan, fiskal, dan moneter, termasuk pembatasan mobilitas, berimplikasi pada terganggunya rantai pasokan global. Pemulihan rantai pasokan global juga lambat akibat munculnya varian baru Covid-19 dan berlangsungnya perang di Ukraina. Permasalahan di sisi suplai tersebut menjadi semakin kompleks sejalan dengan permasalahan di sisi permintaan termasuk keketatan pasar tenaga kerja khususnya di negara maju dan meningkatnya ekspektasi inflasi yang kemudian mendorong kenaikan inflasi global. Kenaikan inflasi dan respons pengetatan kebijakan moneter oleh berbagai bank sentral diperkirakan akan mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia serta menimbulkan kekhawatiran terjadinya stagflasi, bahkan resesi di beberapa negara.

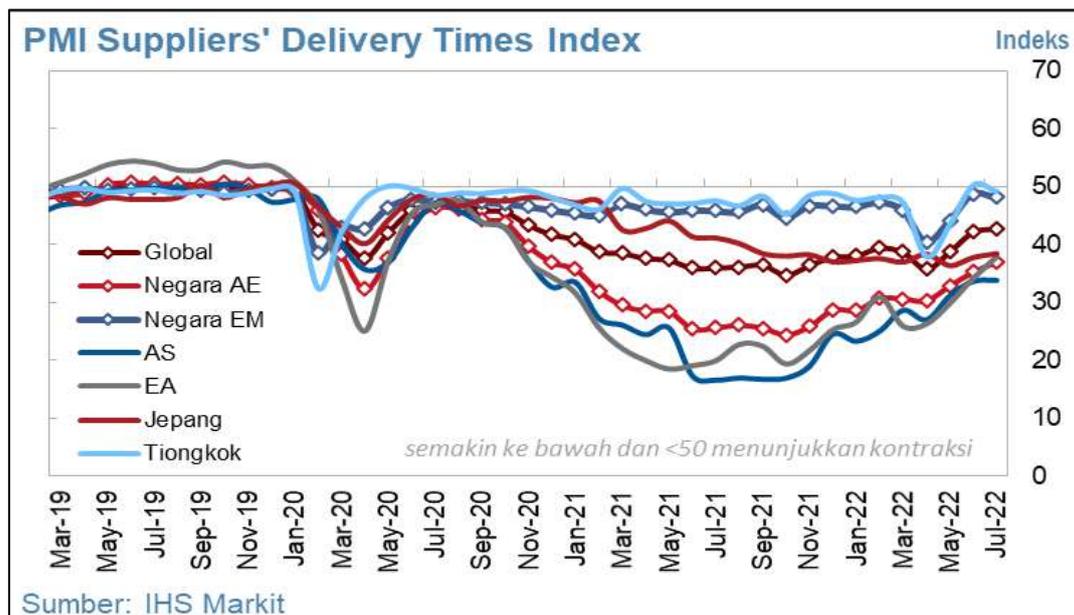
1.1.1 Tekanan Inflasi Terus Berlanjut

Inflasi global terus menunjukkan tren peningkatan. Inflasi dunia yang pada tahun 2021 mencapai 5,78% terus mengalami tekanan pada 2022 sejalan dengan berbagai permasalahan, baik di sisi suplai maupun sisi permintaan. Besarnya tekanan inflasi tersebut juga tercermin pada asesmen berbagai lembaga internasional, termasuk IMF yang pada Juli 2022 merevisi tingkat inflasi global dari 6,9% (yoy) menjadi 8,3% (yoy) pada tahun 2022 dan dari 3,9% (yoy) menjadi 4,1% (yoy) pada tahun 2023. Kenaikan inflasi tersebut setidaknya bersumber dari 5 (lima) hal utama. *Pertama*, dampak dari pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya rantai pasokan global yang menghambat kemampuan sisi suplai dalam memenuhi kenaikan permintaan sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia. *Kedua*, terjadinya perang di Ukraina serta penerapan sanksi dan retaliasinya telah mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi. *Ketiga*, meluasnya implementasi kebijakan proteksionisme, khususnya pangan, oleh berbagai negara. *Keempat*, perbaikan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang menyebabkan keketatan pasar tenaga kerja (*labor market tightness*), khususnya di negara maju, yang berdampak pada inflasi dari sisi upah. *Kelima*, meningkatnya ekspektasi inflasi sejalan dengan masih tingginya risiko berlanjutnya kenaikan inflasi ke depan.

Rantai pasokan global belum kembali pulih sepenuhnya. Meskipun penyebaran Covid-19 telah menurun, disrupsi perekonomian yang ditimbulkan masih terasa. Masih bermunculannya varian baru Covid-19 dan belum meratanya vaksinasi secara global telah mendorong beberapa negara untuk menerapkan protokol Covid-19 secara ketat seperti penerapan *Zero Covid Policy (ZCP)* di Tiongkok. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya mobilitas dan ketersediaan tenaga kerja, sehingga berdampak pada terganggunya kelancaran pasokan barang global dalam memenuhi meningkatnya permintaan dunia. Belum pulihnya rantai pasokan global tersebut terlihat dari berbagai indikator terkini seperti *suppliers' delivery times* yang tetap berada pada zona kontraksi, mengindikasikan waktu pengiriman yang masih lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal, dan waktu tunggu kapal kontainer pada mayoritas pelabuhan yang masih di atas 3 (tiga) hari (**Grafik 1**). Ke depan, meskipun Tiongkok saat ini mulai melakukan relaksasi ZCP yang mendorong penurunan waktu

tunggu kapal di 3 (tiga) pelabuhan Tiongkok, kembali meningkatnya penyebaran Covid-19 menyiratkan risiko pelambatan pemulihan rantai pasokan global.

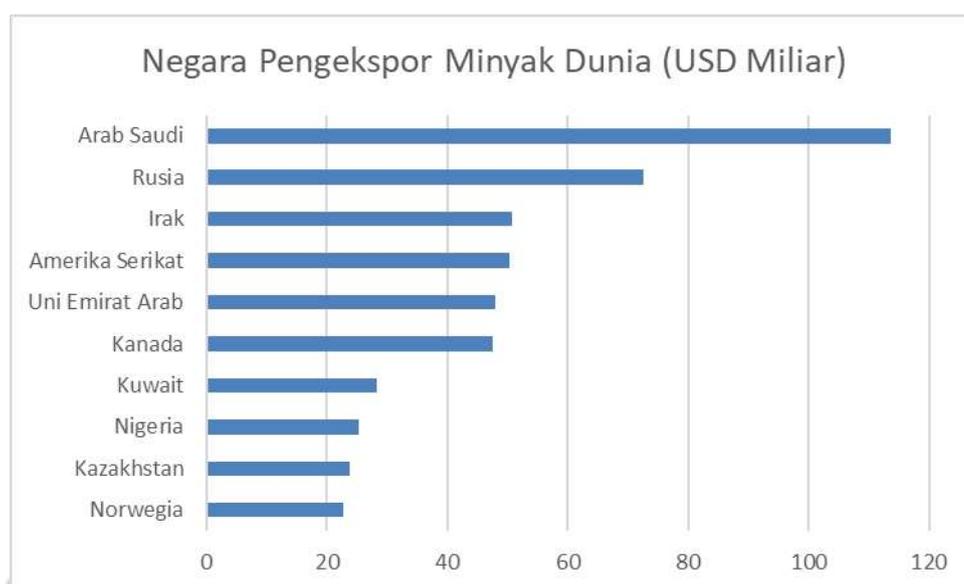
Grafik 1. PMI Suppliers' Delivery Times Index



Perang di Ukraina menambah tekanan kenaikan inflasi global. Perang di Ukraina beserta pengenaan sanksi dan balasannya telah menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap inflasi global mengingat Rusia dan Ukraina merupakan produsen utama dunia di bidang energi dan komoditas pangan tertentu. Pada tahun 2020, ekspor minyak Rusia mencapai 72,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 15% dari total suplai minyak dunia (**Grafik 2**). Di samping itu, Rusia dan Ukraina juga merupakan produsen utama dunia beberapa komoditas pangan dan turunannya, seperti gandum, gandum hitam, sereal, jelai, dan pupuk. Dengan terjadinya perang di Ukraina, suplai minyak dunia turun cukup signifikan, sehingga mendorong kenaikan harga minyak dunia bahkan sempat mencapai 100 dolar AS per barel pada 28 Februari/1 Maret 2022 akibat defisit neraca minyak dunia. Demikian halnya dengan harga komoditas pangan, termasuk harga gandum berjangka yang meningkat sekitar 5,35% menjadi 9,84 dolar AS per gantang dibandingkan tahun 2021. Padahal, harga gandum tersebut sampai dengan tahun 2020 tidak pernah lebih dari 6 dolar AS. Tidak hanya berhenti di situ, harga komoditas substitusinya, seperti CPO, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga energi dan komoditas, terutama pangan,

tersebut pada gilirannya meningkatkan tekanan inflasi dari sisi suplai di berbagai negara.

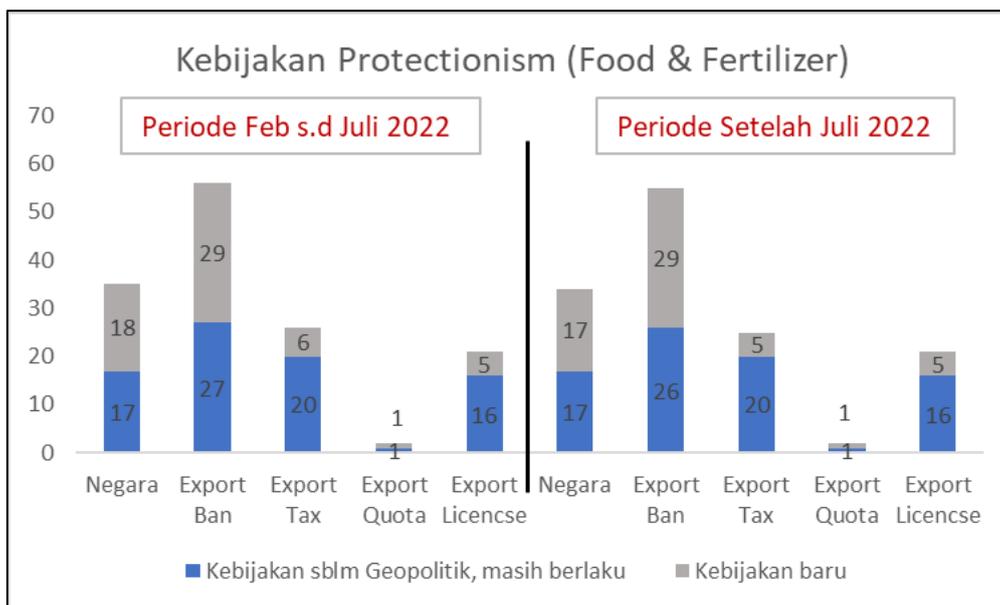
Grafik 2. Negara Terbesar Pengekspor Minyak Dunia



Sumber: Worldstopexports.com

Kebijakan proteksionisme oleh berbagai negara khususnya di bidang pangan menjadi semakin marak. Menurunnya suplai komoditas pangan akibat perang di Ukraina, telah mendorong berbagai negara untuk menerapkan kebijakan proteksionisme, khususnya di bidang pangan, guna memperkuat ketahanan pangan domestik. Sampai dengan Juli 2022, sebanyak 35 (tiga puluh lima) negara telah mengimplementasikan kebijakan proteksionisme pangan dalam berbagai bentuk mulai dari pelarangan ekspor, pengenaan kuota, peningkatan pajak ekspor, sampai dengan kewajiban lisensi ekspor. Sebagai contoh, India telah melakukan larangan temporer ekspor gandum dan gula. Rusia juga melarang ekspor pupuk tertentu, sementara Argentina menaikkan pajak ekspor untuk komoditas kedelai (**Grafik 3**). Implementasi kebijakan proteksionisme ini semakin menekan suplai komoditas dunia dan memberikan tekanan tambahan terhadap kenaikan harga komoditas dan inflasi global.

Grafik 3. Kebijakan Proteksionisme



Ketidakseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan mulai terjadi khususnya di beberapa negara maju. Mulai meredanya penyebaran Covid-19 dan semakin meluasnya vaksinasi di berbagai negara telah diikuti oleh kebijakan relaksasi, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan. Namun demikian, kendala di sisi penawaran seperti yang telah dijelaskan di atas telah menimbulkan ketidakseimbangan baik di pasar barang dan jasa, sehingga mendorong kenaikan inflasi. Ekonomi AS dan Inggris, misalnya, tengah mengalami keketatan di pasar tenaga kerja (*labor market tightness*) seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah terbatasnya ketersediaan tenaga kerja antara lain akibat dari banyaknya usia kerja yang meninggalkan lapangan kerja pada saat terjadinya pandemi Covid-19, *labor mismatch*, serta perubahan perilaku tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut, tekanan kenaikan terhadap upah nominal juga meningkat yang pada gilirannya dapat berimbas pada kenaikan inflasi dari sisi permintaan.

Ekspektasi inflasi yang meningkat, berisiko memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi. Peningkatan harga komoditas pangan dan energi yang berkepanjangan di tengah masih tingginya ketidakpastian penyelesaian perang di Ukraina, telah mendorong kenaikan ekspektasi kenaikan inflasi di berbagai negara. Meskipun bank sentral di berbagai negara telah mulai menerapkan pengetatan kebijakan moneter, kekhawatiran akan kenaikan inflasi masih terjadi setidaknya untuk tahun 2022. Hal ini terlihat dari *consensus forecast* di berbagai negara yang

menunjukkan masih meningkatnya ekspektasi inflasi ke depan. Di negara maju, ekspektasi inflasi AS masih cukup tinggi dengan rata-rata inflasi 2022 diperkirakan mencapai 8,1% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi inflasi tahun 2021 sebesar 4,7% (yoy). Demikian halnya di negara berkembang seperti India, inflasi diperkirakan mencapai sekitar 6,9% (yoy) pada tahun yang sama. Tingginya ekspektasi inflasi ini dapat memberikan tekanan tambahan pada inflasi khususnya di negara-negara yang mengalami keketatan di pasar tenaga kerja.

Tingginya tekanan inflasi ke depan telah direspons dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara, terutama AS.

Perkembangan terkini menunjukkan inflasi beberapa negara telah melebihi target, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dengan tingginya inflasi tersebut, beberapa bank sentral, khususnya the Fed, memperkuat pengetatan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga kebijakan secara signifikan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, sumber tekanan inflasi AS yang tidak hanya berasal dari *cost-push* harga pangan dan energi, namun juga bersumber dari keketatan pasar tenaga kerja, memerlukan respons kebijakan moneter yang lebih agresif. Merespons hal tersebut, the Fed telah menaikkan FFR sebesar 225 bps pada Januari-Juli 2022 dan diperkirakan terus melanjutkan peningkatan FFR hingga sebesar 350 bps selama tahun 2022, lebih tinggi dari prakiraan awal sebesar 200 bps.

1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Mulai Melambat

Proses pemulihan ekonomi dunia yang belum merata akan kembali tertekan pada 2022. Perbaikan ekonomi global pascapandemi Covid-19 terus berlangsung hingga triwulan I 2022, meski masih belum merata. Perbaikan di negara maju relatif lebih cepat ketimbang di negara berkembang, sejalan dengan besarnya kapasitas fiskal dan perkembangan vaksinasi yang baik di negara maju. Namun demikian, pemulihan ekonomi diperkirakan terkendala mulai triwulan II 2022 sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, perang di Ukraina, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif oleh berbagai bank sentral dunia. Perbedaan *state of the economy* antara negara maju dan berkembang tersebut serta ketersediaan *fiscal space* akan menentukan seberapa besar penurunan pertumbuhan ekonomi domestik. Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya sudah pulih, seperti AS, akan mengalami perlambatan

pertumbuhan ekonomi yang lebih besar mengingat respons bank sentral dalam mengendalikan inflasi akan lebih agresif dibandingkan dengan negara yang ekonominya baru berada pada fase awal pemulihan ekonomi. Di samping itu, perbedaan risiko melemahnya pertumbuhan ekonomi domestik juga akan tergantung pada struktur ekonomi suatu negara dengan negara-negara eksportir komoditas, termasuk Indonesia, akan mengalami dampak yang relatif minimal dibandingkan dengan negara-negara importir komoditas.

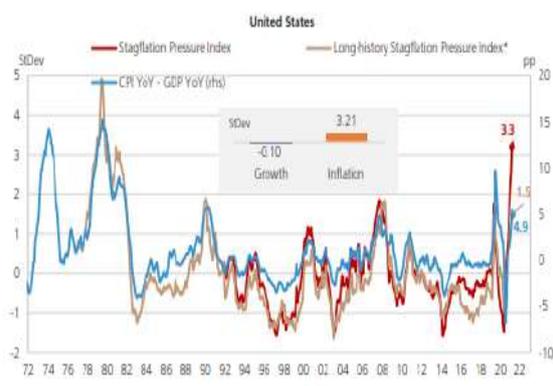
Pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023 akan lebih rendah dari perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dan 2023 direvisi ke bawah masing-masing dari 3,5% (yoy) menjadi sebesar 2,9% (yoy) dan dari 3,4% (yoy) menjadi 2,8% (yoy). Revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dilakukan pada hampir seluruh negara termasuk AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India. Di samping itu, hal yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko terjadinya resesi di AS mengingat sumber tekanan inflasi yang juga bersumber dari sisi permintaan, sehingga membutuhkan respons yang signifikan dari The Fed untuk menurunkan tekanan inflasi. Hal ini juga tercermin pada perkiraan pasar terkait probabilitas terjadinya resesi di AS dalam kurun waktu 24 bulan ke depan yang semakin meningkat. Sejalan dengan melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi negara maju dan beberapa negara berkembang utama juga lebih rendah dari perkiraan semula. Pertumbuhan ekonomi AS pada 2022 diperkirakan hanya mencapai 2,3% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 3,2% (yoy). Di Eropa, prospek pertumbuhan ekonomi tahun yang sama juga diperkirakan lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 2,7% (yoy) menjadi 2,1% (yoy) dipengaruhi disrupsi pasokan energi dan *spillover* prospek ekonomi AS yang lebih rendah. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini dikonfirmasi oleh berbagai indikator terkini seperti indikator konsumsi, manufaktur, dan jasa yang mulai mengalami penurunan. Di Tiongkok, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,4% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,8% (yoy). Pelemahan prospek dipengaruhi oleh masih berlanjutnya ZCP, namun kebijakan fiskal dan moneter yang akan tetap akomodatif menahan perlambatan

ekonomi lebih dalam. Kebijakan tersebut sejalan dengan tekanan inflasi yang masih rendah. Sementara itu, prospek pertumbuhan ekonomi Jepang dan India pada 2022 juga diperkirakan lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi Jepang dan India di 2022 direvisi ke bawah masing-masing menjadi 1,7% (yoy) dan 6,4% (yoy), lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,1% (yoy) dan 7,1% (yoy).

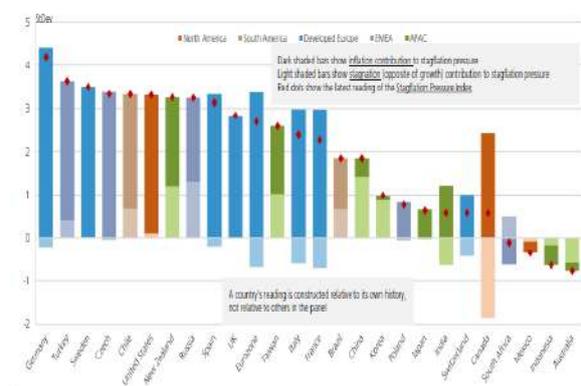
Masih tingginya tekanan inflasi dan mulai menurunnya pertumbuhan ekonomi meningkatkan risiko terjadinya stagflasi ke depan, khususnya di AS dan Eropa. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di beberapa negara, khususnya negara maju seperti AS, masih tinggi dan bahkan melebihi targetnya, di tengah pengetatan kebijakan moneter yang ditempuh. Risiko persistensi inflasi di negara maju akibat kombinasi dari tekanan sisi penawaran dan permintaan tersebut dikhawatirkan oleh pelaku pasar. Kekhawatiran ini terkait dengan potensi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut yang lebih agresif guna membawa kembali inflasi ke dalam kisaran sasaran. Akibatnya, *stagflation pressure index* menunjukkan adanya peningkatan probabilitas stagflasi di AS, meski masih lebih rendah dibandingkan dengan risiko stagflasi pada tahun 1970-an. Di samping AS, persistensi dan relatif tingginya tekanan inflasi di negara maju membutuhkan dosis pengetatan kebijakan moneter yang lebih besar. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya stagflasi di negara-negara tersebut, seperti Eropa dan Inggris, juga lebih besar dibandingkan dengan risiko stagflasi di negara berkembang (**Grafik 4 & Grafik 5**).

Grafik 4. Probabilitas Stagflasi AS



Source: MSCI, Datastream, Bloomberg, UBS. Note: *based on fewer variables to construct growth, inflation and stagflation indices.

Grafik 5. Risiko Stagflasi Beberapa Negara

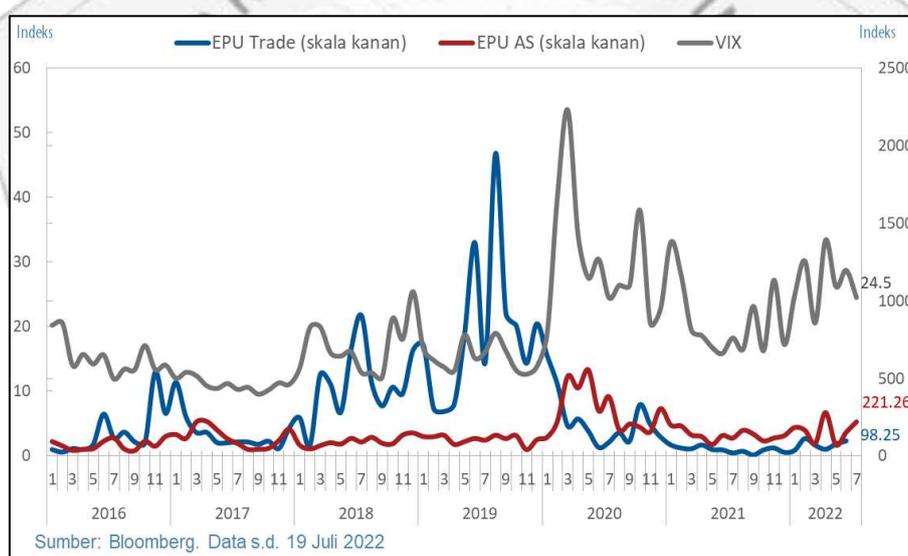


Source: MSCI, Datastream, Bloomberg, UBS

1.1.3 Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Meningkat

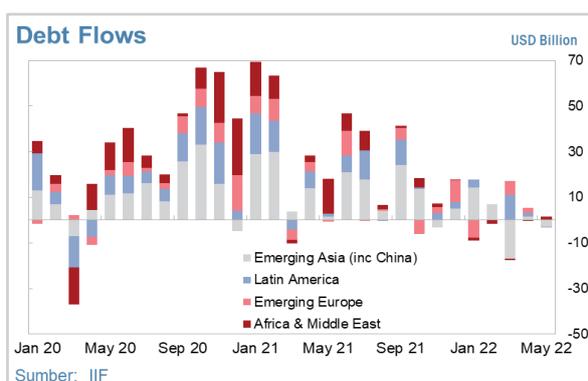
Pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif dan meningkatnya risiko stagflasi mendorong peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sepanjang tahun 2022, berbagai indikator risiko ketidakpastian pasar keuangan, seperti *volatility index* (VIX) dan *Economic Policy Uncertainty* (EPU), terus menunjukkan peningkatan (**Grafik 6**). Sejalan dengan hal tersebut, pasar saham dan obligasi juga menunjukkan kenaikan volatilitas yang cukup tinggi. *Yield UST 10 year* meningkat, sedangkan harga saham AS melemah. Persepsi risiko negara berkembang juga meningkat seperti yang tercermin pada *EMBI Spread* yang mencapai 155 bps pada awal Juli 2022.

Grafik 6. Ketidakpastian Pasar Global Naik

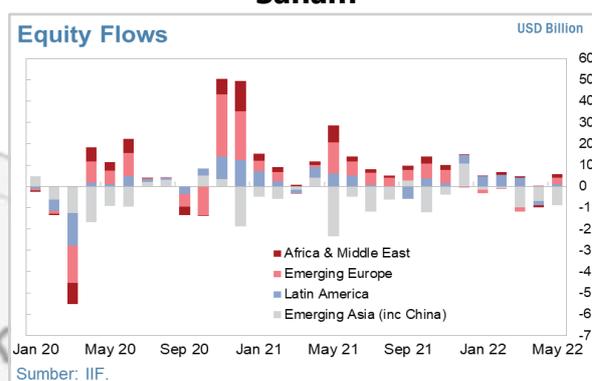


komoditas. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar negara berkembang cenderung melemah seperti yang diindikasikan oleh menguatnya mata uang dolar secara *broadwide* (Grafik 9).

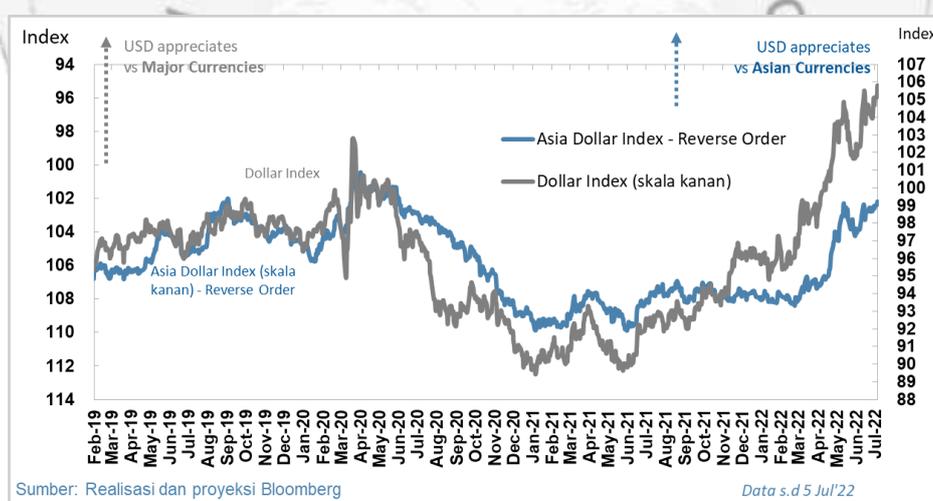
Grafik 7. Aliran Modal Asing Obligasi



Grafik 8. Aliran Modal Asing Pasar Saham



Grafik 9. Nilai Tukar USD

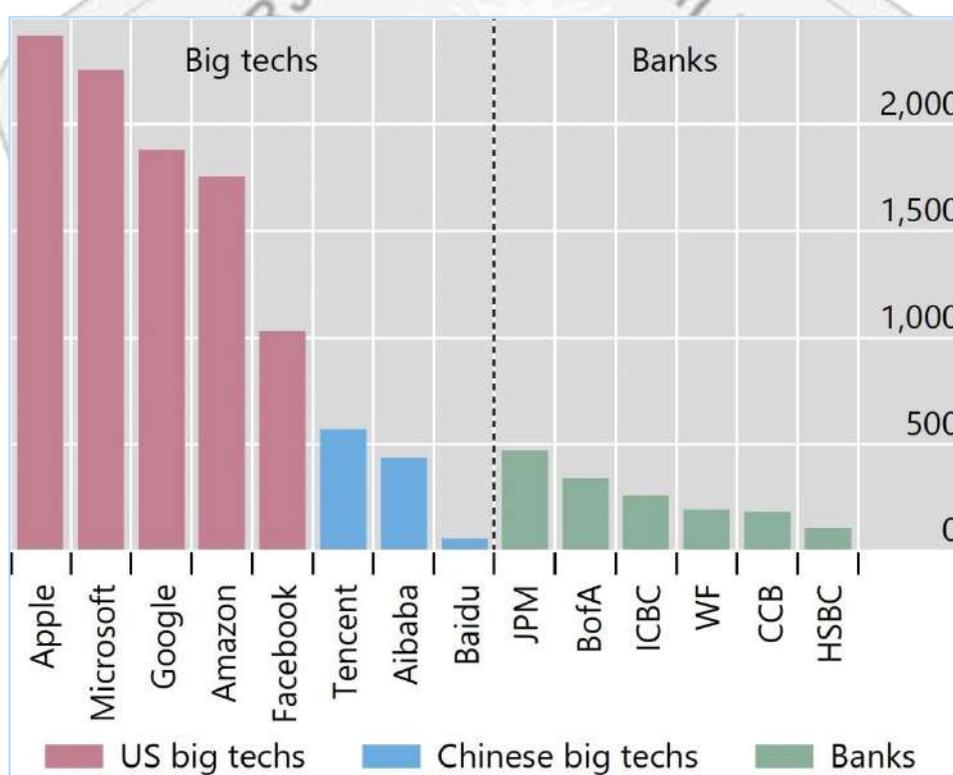


Ke depan, ketidakpastian pasar keuangan global masih akan tinggi. Berlanjutnya perang di Ukraina, risiko stagflasi di negara maju dan *spillover*-nya ke negara berkembang, serta arah kebijakan moneter negara maju yang agresif, masih akan menjadi sumber dari ketidakpastian pasar keuangan global. Dengan kondisi tersebut, aliran modal masuk ke negara berkembang masih akan terbatas, sehingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang masih akan berlanjut. Untuk itu, penguatan kebijakan untuk mengelola stabilitas, baik moneter, makroekonomi, maupun sistem keuangan, sekaligus tetap mendukung pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk menghindari risiko termaterialisasinya risiko stagflasi.

1.2 Semakin Pesatnya Perkembangan Teknologi Digital

Digitalisasi ekonomi-keuangan global berlangsung sangat cepat, dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan semakin meluasnya transaksi *e-commerce* serta sistem pembayaran antarnegara ke depan. Digitalisasi telah dimulai sebelum pandemi Covid-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital seperti *internet of things* (IoT), *cloud computing*, *big data*, dan *artificial intelligence* (AI) oleh *BigTech*, termasuk di dalamnya *machine learning* dan *deep learning*, yang mampu menghadirkan produk dan jasa melalui gawai pintar, kapanpun dan dimanapun. Dominasi *BigTech* ditunjukkan dari *market capitalization* *BigTech* global yang telah melampaui bank-bank besar dunia (**Grafik 10**).

Grafik 10. Kapitalisasi *BigTechs* & Bank Besar (Miliar Dolar AS)



Sumber: BIS (2019) dan Refinitiv

Inovasi teknologi seperti AI mampu mengolah data perilaku pribadi sedemikian canggihnya, menawarkan *user experience* untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Bahkan, dunia digital baru-*metaverse*, menawarkan level baru *user experience* yang menggabungkan integrasi antara IoT, *virtual reality* (VR), dan teknologi 3D, serta kemudahan bertransaksi menggunakan *digital money*. Pada tataran yang lebih konvensional, transaksi digital dilakukan melalui platform

e-commerce yang dari waktu ke waktu menunjukkan kenaikan volume dan frekuensi transaksi yang semakin besar, meski dengan nilai transaksi bersifat ritel.

Sejak pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas aktivitas manusia, digitalisasi ekonomi dan keuangan termasuk sistem pembayaran semakin terakselerasi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital yang semula lebih populer pada kalangan muda dan generasi milenial, menjadi meluas ke berbagai lapisan masyarakat serta menjadi preferensi dan kebiasaan baru karena mudah, cepat, dan murah. Tidak hanya di kota-kota, tetapi meluas ke desa-desa, bahkan semakin menembus batas-batas negara. Sebagai contoh, nilai transaksi uang elektronik (UE) di Indonesia pada triwulan II 2022 tercatat tumbuh 39,85% (yoy) (**Grafik 11**), sementara nilai transaksi *digital banking* pada triwulan II 2022 meningkat 38,45% (yoy) (**Grafik 12**).

Grafik 11. Nilai Transaksi UE



Grafik 12. Nilai Transaksi Digital Banking



Ekonomi dan keuangan digital menjadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi serta mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Di sisi lain, muncul sejumlah permasalahan baru, termasuk kepemilikan dan perlindungan data pribadi, pajak transaksi digital, layanan jasa keuangan oleh entitas bukan lembaga keuangan (*shadow banking*), meluasnya mata uang yang diciptakan swasta (*cryptocurrency*) dan aset digital yang memiliki risiko relatif tinggi karena tidak terdapat *underlying transactions* (*crypto assets*), dan tingginya serangan siber. Berbagai peluang dan tantangan dari meluasnya ekonomi dan keuangan digital ini perlu direspons dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mendudukkan kembali peran negara, termasuk otoritas-otoritas terkait seperti kementerian keuangan, bank sentral,

pengawasan lembaga keuangan, teknologi dan informasi, serta keamanan dan pertahanan, dalam era peradaban baru, yakni peradaban digital.

Ke depan, ekonomi keuangan digital akan terus meningkat pesat didukung oleh program transformasi digital dari berbagai lembaga, preferensi dan akseptasi masyarakat atas transaksi digital, digitalisasi sektor swasta/industri, dan reformasi regulasi dari otoritas. Transaksi *e-commerce* di Indonesia pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan akan terus meningkat didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, terus berlanjutnya pergeseran preferensi perilaku masyarakat untuk berbelanja *online*, maupun berbagai inovasi dan promosi oleh para perusahaan dan program-program pemerintah. Kenaikan pesat transaksi UE diperkirakan juga terus berlanjut didorong oleh perluasan penggunaan UE pada berbagai platform *online* lainnya. Namun demikian, pertumbuhan pada suatu titik akan mengalami perlambatan seiring dengan kemudahan dan efisiensi metode pembayaran digital lainnya, serta mulai terbatasnya promo kepada konsumen. Demikian pula, transaksi *digital banking* diproyeksikan akan terus menguat didukung oleh kenyamanan konsumen bertransaksi secara digital dan berbagai inovasi digital oleh perbankan.

Pada konteks mata uang (*sovereign digital money*), perkembangan digitalisasi juga diwarnai dengan analisis dan diskusi mengenai penerbitan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*. Analisis dilakukan oleh berbagai bank sentral dan lembaga internasional seperti IMF dan BIS. Bahkan, hasil survei terbaru IMF menemukan bawah 90% dari bank sentral anggota IMF berminat dan tengah melakukan analisis atas rencana penerbitan CBDC. Analisis mencakup tujuan penerbitan, keuntungan dan kelebihan, dampak terhadap perekonomian domestik dan lintas negara termasuk sistem moneter internasional, desain, sampai ke aspek hukum dan teknologi CBDC. Untuk Indonesia, bank sentral juga tengah melakukan analisis atas penerbitan Digital Rupiah ke depan. Pada konteks ini, Bank Indonesia melihat rencana penerbitan Digital Rupiah berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, mendukung mandat dan pelaksanaan tugas kebanksentralan di era digital, serta mendukung akselerasi dan integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional.

1.3 Meningkatnya Tuntutan akan Ekonomi-Kuangan Hijau

Saat ini, tuntutan untuk pengembangan ekonomi hijau baik secara global maupun domestik semakin mengemuka. Pada awalnya perhatian terhadap ekonomi hijau diawali dari berbagai perubahan iklim akibat aktivitas ekonomi masyarakat. Pembuangan limbah atau sampah yang tidak pada tempatnya turut memengaruhi kerusakan lingkungan dan berdampak pada perubahan iklim. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian ekonomi, bahkan makin besar kerugiannya bila kerusakan disebabkan bencana alam. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan upaya bersama menjaga lingkungan dengan menerapkan ekonomi hijau.

Perubahan iklim dapat memberikan dampak signifikan baik terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, maupun pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi stabilitas makroekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem akan dapat mengganggu sisi suplai (*physical risk*), termasuk produk-produk pangan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri terhadap pencapaian target inflasi oleh bank sentral. Di samping itu, dampak *transition risk* dari respons kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, seperti *carbon tax*, juga berpotensi menambah tekanan terhadap harga. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, perubahan iklim global juga menimbulkan ancaman, termasuk adanya transformasi ekonomi hijau memengaruhi kualitas eksposur perbankan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak bencana alam. Hal yang serupa juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi yang berisiko tertekan baik dari sisi suplai maupun permintaan. Oleh karena itu, tantangan bagi bank sentral dan seluruh pemangku kebijakan adalah bagaimana menyeimbangkan upaya untuk memerangi perubahan iklim melalui kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan hijau dengan memitigasi *unintended consequences* dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian jangka pendek.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menjadi momentum menuju ekonomi hijau. Pemulihan ekonomi bersama secara global perlu diiringi dengan pengembangan penerapan ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau sendiri tidak hanya menjaga lingkungan hidup, namun juga

mengimplementasikan ekonomi yang efisien. Misalnya, konsep *circular economy* yang menekankan *reduce, reuse, dan recycle* yang mendorong ekonomi yang lebih efisien. Dengan cita-cita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia tidak saja memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga inklusif dan berkelanjutan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat mengembangkan ekonomi hijau baik dari segi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

1.4 Perekonomian Domestik Terus Membaik: Pemulihan Berlanjut, Stabilitas Terjaga

Pertumbuhan ekonomi domestik terus membaik ditopang oleh perbaikan konsumsi domestik seiring dengan menurunnya penyebaran Covid-19. Memasuki triwulan II 2022, perekonomian Indonesia terus melanjutkan perbaikan dengan tumbuh tinggi sebesar 5,44% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 5,01% (yoy). Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2022 tersebut terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, seiring dengan kebijakan relaksasi mobilitas yang mendorong peningkatan aktivitas masyarakat, dan tetap terjaganya kinerja ekspor seiring dengan masih kuatnya permintaan mitra dagang utama. Investasi juga masih tumbuh kuat sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi dan perbaikan iklim usaha. Lebih dari itu, perbaikan pertumbuhan ekonomi juga lebih merata, terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perbaikan ekonomi tersebut diperkirakan akan berlanjut, sehingga untuk keseluruhan tahun 2022 dapat mencapai 4,5-5,3% (yoy). Namun demikian, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya tekanan inflasi domestik perlu diwaspadai karena berisiko menekan kinerja ekspor dan konsumsi swasta, sehingga memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas eksternal tetap terjaga di tengah tekanan aliran modal portofolio. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) semester I 2022 terjaga baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal Indonesia. Kinerja tersebut didukung oleh berlanjutnya surplus transaksi berjalan dengan defisit transaksi modal dan finansial sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada triwulan I dan II 2022, surplus transaksi berjalan masing-masing tercatat sebesar 0,4 miliar dolar AS dan 3,9 miliar dolar AS. Kinerja positif ini ditopang oleh surplus neraca perdagangan

nonmigas yang tetap kuat seiring dengan harga ekspor komoditas global yang masih tinggi, seperti batu bara dan CPO, di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas akibat kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, transaksi modal dan finansial triwulan I dan II 2022 mengalami defisit 2,1 miliar dolar AS dan 1,1 miliar dolar akibat arus modal asing keluar dalam bentuk portofolio, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Meskipun demikian, masih kuatnya aliran modal asing masuk dalam bentuk PMA mampu menahan peningkatan defisit transaksi modal dan finansial yang lebih besar. Ke depan, kinerja NPI pada 2022 diperkirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung neraca transaksi modal dan finansial terutama dalam bentuk PMA sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga meskipun dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap aliran modal dalam bentuk portofolio tetap perlu diwaspadai.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, sebagaimana juga dialami oleh mata uang regional lainnya. Pada semester I 2022, nilai tukar Rupiah cenderung terdepresiasi sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan antara lain akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju khususnya AS, terjadinya perang di Ukraina, dan kekhawatiran terjadinya stagflasi. Setelah sedikit melemah pada triwulan I 2022 sebesar 0,81% (ptp) atau 0,59% secara rerata dibandingkan triwulan IV 2021, Rupiah kembali melemah pada triwulan II 2022, sehingga terdepresiasi 3,55% (ptp) atau 1,52% secara rerata dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan masih berlanjut pada awal triwulan III 2022, yakni sampai dengan 20 Juli 2022 Rupiah terdepresiasi 0,60% (ptp) dibandingkan akhir Juni 2022. Depresiasi tersebut sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi. Selain itu juga dipengaruhi kekhawatiran perlambatan ekonomi global di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 20 Juli 2022 terdepresiasi 4,90% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia 6,41%,

India 7,07%, dan Thailand 8,88%. Ke depan, sejalan dengan masih terdapat risiko terhadap stabilitas nilai Rupiah akibat ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, pasokan valas dan penguatan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi perlu terus diperkuat.

Inflasi cenderung meningkat terutama akibat tekanan dari sisi penawaran.

Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 tercatat inflasi sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan batas atas sasaran inflasi $3 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi kelompok volatile foods tercatat sangat tinggi mencapai 11,47% (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan. Inflasi kelompok administered prices juga meningkat menjadi 6,51% (yoy) sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi. Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah sebesar 2,86% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan berisiko meningkat akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran $3,0 \pm 1\%$ dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia untuk langkah-langkah pengendaliannya.

Dalam jangka menengah-panjang, ekonomi Indonesia berpotensi untuk tumbuh pada lintasan yang membaik sehingga mampu mementaskan ekonomi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dalam konteks ini, pencapaian Indonesia sebagai negara maju akan sangat tergantung bagaimana proses transisi dari era pandemi Covid-19 menjadi *new era*, termasuk desain *exit policy* dari kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat dioptimalkan serta keberlanjutan dari reformasi di sektor riil dan keuangan. Hal ini tentu saja tidak mudah mengingat dalam jangka pendek, Indonesia akan dihadapkan pada tingginya ketidakpastian ekonomi global

yang menyiratkan perlunya langkah-langkah kebijakan siklikal yang tepat untuk menjaga stabilitas sembari tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sinergi kebijakan untuk mengelola siklus jangka pendek dari sisi moneter, makroprudensial, fiskal, dan mikroprudensial baik secara bilateral maupun multilateral melalui KSSK yang telah baik perlu terus ditingkatkan. Sinergi dalam kebijakan struktural juga perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas *human capital*, *physical capital*, dan produktivitas yang akan mendorong terciptanya inovasi di berbagai bidang sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang pesat.

1.5 Sinergi Kebijakan Nasional untuk Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi

Salah satu pelajaran yang muncul dari pandemi Covid-19 adalah semakin besarnya peran sinergi kebijakan nasional dalam mengelola perekonomian Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang semakin berkelindan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu otoritas kebijakan saja. Jika krisis keuangan global 2008/2009 menunjukkan semakin kuatnya *macro-financial linkage* dengan ketidakseimbangan di sektor keuangan akan memengaruhi sektor riil dan sebaliknya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa **sumber tekanan terhadap perekonomian tidak hanya berasal dari permasalahan ekonomi.** Permasalahan sektor lain, seperti kesehatan, dapat menimbulkan tekanan yang luar biasa pada perekonomian dan penanganannya pun harus multi sektoral. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu duduk bersama merumuskan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dalam suatu bauran kebijakan nasional agar efektif dalam mengelola perekonomian nasional. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dalam interdependensi yang menghormati kewenangan dari masing-masing pemangku kebijakan.

Menghadapi tantangan ke depan, kerangka sinergi kebijakan tetap perlu diarahkan pada upaya perbaikan struktur ekonomi dan mengatasi permasalahan siklikal jangka pendek. Tiga tantangan ke depan yakni risiko stagflasi, pesatnya perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital, dan kebutuhan pengembangan ekonomi-keuangan hijau, sebagaimana disinggung sebelumnya, juga harus ditangani dengan penguatan sinergi antarotoritas. Dalam konteks ini, upaya mendorong

momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu ditempuh dengan memperkuat satu kebijakan prasyarat (*necessary*) dan mempercepat lima respons kebijakan yang diperlukan (*sufficient*) agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Kebijakan prasyarat tersebut meliputi akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 serta perluasan sektor-sektor prioritas. Pemenuhan *necessary condition* ini diperkuat dengan 5 (lima) respons kebijakan berupa: (i) percepatan transformasi sektor riil, (ii) sinergi kebijakan moneter dan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan (v) kebijakan ekonomi keuangan hijau dan inklusif.

Sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan perluasan sektor-sektor ekonomi prioritas sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat (*necessary*) untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 dan langkah-langkah penanganannya. Akselerasi vaksinasi dan kebijakan penanganan yang ditempuh tepat memungkinkan segera ditempuhnya langkah-langkah relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan konsumsi. Hal ini antara lain tercermin pada semester I 2022 yang diwarnai oleh munculnya varian baru Covid-19 yakni Omicron yang lebih menular dibandingkan dengan varian Covid-19 sebelumnya. Namun demikian, dengan tingkat vaksinasi penduduk Indonesia yang tinggi dan respons pemerintah yang cepat antara lain melalui pengetatan pembatasan mobilitas (PPKM level) serta meningkatkan intensitas *testing* dan *tracing*, penularan Covid-19 varian Omicron telah menurun secara cepat dan signifikan. Dengan terkendalinya penyebaran Omicron tersebut, Pemerintah mulai dapat merelaksasi pembatasan mobilitas, yang disertai oleh pembukaan sektor-sektor prioritas, yang diikuti oleh kenaikan mobilitas masyarakat dan ekonomi. Hasilnya terlihat pada peran konsumsi rumah tangga, termasuk yang terkait dengan transportasi dan komunikasi, yang meningkat pesat dan menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada semester I 2022. Tidak hanya itu, perbaikan juga terlihat semakin merata di hampir seluruh sektor.

Pemulihan ekonomi perlu didorong dengan perluasan sektor-sektor prioritas. Dengan memperhatikan keberhasilan sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bersama-sama melalui KSSK mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) sektor prioritas melalui Paket Kebijakan Terpadu KSSK tahun 2021, maka dilakukan *remapping* sektor-sektor prioritas untuk semakin mempercepat perbaikan ekonomi domestik. Pengembangan sektor-sektor prioritas tersebut, tidak hanya dengan mendasarkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian, namun juga memiliki dampak inklusivitas yang signifikan. Untuk itu, terdapat 8 sektor prioritas tambahan termasuk industri kertas dan barang dari kertas, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, jasa perusahaan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, jasa lainnya, angkutan laut, jasa reparasi dan pemasangan mesin, serta kayu dan furnitur.

Akselerasi reformasi sektor riil perlu terus dikedepankan untuk mendukung pengembangan 46 sektor prioritas. Hasil kajian menunjukkan terdapat sekitar 103 kendala yang menjadi tantangan pengembangan sektor-sektor prioritas tersebut. Menggunakan konsep *Eisenhower matrix* dengan kriteria repetisi, dampak, *feasibility* kebijakan, dan *time frame*, setidaknya terdapat 4 (empat) kendala kritical dan *urgent* untuk segera diselesaikan, yakni tata niaga dan importasi, sertifikasi, perizinan, dan harga energi. Oleh karena itu, pembenahan sektor riil sebagai upaya *debottlenecking* dari permasalahan di atas melalaui koordinasi dan sinergi kebijakan antarpemangku kebijakan perlu disegerakan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi. Misalnya, mendorong tersedianya informasi perdagangan yang terintegrasi, transparan, dan komprehensif, optimalisasi harmonisasi tarif - termasuk kuota impor, penguatan stimulus fiskal melalui perluasan industri penerima insentif harga gas, serta simplifikasi dan efisiensi proses perizinan impor, terutama untuk importir produsen. Di samping itu, tentunya upaya *debottlenecking* lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lain juga perlu tetap dilakukan.

Reformasi sektor riil juga perlu diarahkan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Dalam hal ini, tersedianya SDM yang andal, produktivitas yang tinggi, serta dukungan sumber pembiayaan yang memadai menjadi

faktor utama yang perlu digarap untuk mendukung tercapainya cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju ke depan. Oleh karena itu, implementasi berkesinambungan reformasi struktural di sektor riil, pendalaman pasar keuangan, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital menjadi sangat krusial untuk mendorong kenaikan investasi dan produktivitas nasional. Dengan berbagai kebijakan tersebut, kapasitas dan kapabilitas industri Indonesia akan meningkat, sehingga mendorong perbaikan produktivitas nasional yang menjadi landasan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan struktur ekonomi yang lebih resilien terhadap guncangan.

Sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal perlu diarahkan pada upaya memperkuat stabilitas dengan tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya risiko stagflasi global memberikan tantangan yang tidak mudah bagi perumusan bauran kebijakan nasional. Di satu sisi, tekanan inflasi domestik terus meningkat, di sisi lain pertumbuhan ekonomi domestik juga berisiko tertahan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, respons kebijakan moneter secara *pre-emptive* dan *forward looking* perlu difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*), khususnya inflasi inti dan ekspektasi inflasi, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi domestik guna memitigasi risiko stagflasi. Hal ini ditempuh dengan melanjutkan normalisasi kebijakan likuiditas, memperkuat stabilisasi nilai tukar untuk mendukung pengendalian inflasi, dan menyesuaikan suku bunga kebijakan mengingat telah terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti. Di samping itu, koordinasi dengan fiskal juga perlu terus diperkuat baik dalam konteks koordinasi di pasar SBN serta mitigasi dampak perkembangan ekonomi global dan keberlanjutan stimulus perekonomian. Di samping itu, koordinasi dengan TPIP dan TPID juga terus diperkuat guna mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai, mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan.

Kebijakan makroprudensial tetap untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Arah kebijakan tersebut sesuai dengan ketahanan sistem perbankan yang masih kuat, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun risiko kredit, serta siklus keuangan Indonesia yang masih berada pada fase negatif. Untuk itu, kebijakan makroprudensial akomodatif perlu dilanjutkan guna mendorong

intermediasi perbankan serta menjaga ketahanan sistem keuangan terhadap risiko *scarring effect* dan peningkatan tekanan inflasi. Upaya mendorong intermediasi perbankan ditempuh antara lain dengan tetap menempuh kebijakan makroprudensial longgar pada rasio *countercyclical capital buffer* (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan rasio *loan to value* (LTV) yang kondusif bagi intermediasi, serta berbagai kebijakan untuk mendorong sektor prioritas, ekspor, dan inklusi, termasuk melalui RPIM. Dalam konteks ini, maka koordinasi dengan anggota KSSK lain juga terus diperkuat khususnya terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK, upaya mendorong pembiayaan inklusif, dan pengembangan ekonomi-keuangan hijau.

Kebijakan fiskal tetap perlu diarahkan sebagai *shock absorber* dari perkembangan global yang kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, peran APBN sebagai *shock absorber* diarahkan untuk mendukung tetap terkendalinya inflasi, menjaga daya beli dan tingkat kemiskinan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan adanya *windfall profit* dari kenaikan harga komoditas, efisiensi pengelolaan perpajakan, dan dukungan pembiayaan APBN oleh Bank Indonesia sebagaimana yang disepakati dalam Keputusan Bersama (KB) 1 sampai dengan KB 3, kebijakan pemerintah untuk menaikkan belanja subsidi energi dan BBM tertentu, dana kompensasi, dan penguatan Bansos, merupakan langkah yang sangat tepat. Ke depan, upaya untuk meningkatkan pendapatan negara secara struktural, termasuk melalui peningkatan efisiensi perpajakan dan efektivitas belanja menjadi kunci untuk melanjutkan peran APBN sebagai *shock absorber*. Hal tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat memengaruhi pendapatan negara, inflasi global yang masih tinggi, serta amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2020 termasuk defisit fiskal maksimal 3% dari PDB dan berakhirnya pembiayaan APBN oleh Bank Indonesia.

Akselerasi reformasi sektor keuangan diarahkan untuk mendukung peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan sektor keuangan tetap perlu untuk diarahkan guna mendorong perbaikan intermediasi perbankan dengan mengatasi permasalahan di sisi permintaan maupun penawaran. Urgensi mendorong intermediasi ini didasarkan

pada kebutuhan untuk membiayai perekonomian yang mulai pulih di tengah siklus keuangan yang masih negatif. Dengan demikian, kebijakan mendorong kredit ini tidak akan menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Di sisi permintaan, pemetaan kendala dan implementasi kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor prioritas di atas akan dapat meningkatkan permintaan kredit sejalan dengan membaiknya sektor-sektor tersebut. Di sisi penawaran, kebijakan makroprudensial yang akomodatif yang didukung oleh kebijakan mikroprudensial ditempuh untuk memastikan kecukupan likuiditas perbankan dalam memberikan kredit dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatiannya. Dalam jangka yang lebih panjang, transformasi pasar keuangan, termasuk melalui implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 Bank Indonesia sebagai bagian integral dari Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK), perlu diperkuat untuk memperluas alternatif pembiayaan kepada sektor riil dalam mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan kompleksitas tantangan dan keterkaitan antar kebijakan, dukungan koordinasi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam forum FKPPPK perlu terus dikedepankan.

Penguatan digitalisasi ekonomi dan keuangan diarahkan guna mendorong akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.

Digitalisasi pada area sistem pembayaran ditujukan antara lain untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital nasional, mendukung digitalisasi perbankan, menjamin *interlink* antara *financial technology* (fintech) dengan perbankan, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan risiko, serta menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi lintas batas antarnegara. Dengan latar belakang tersebut, Bank Indonesia mempercepat implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Pada jangka pendek, kebijakan diperkuat antara lain melalui perluasan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), baik dari sisi permintaan maupun penawaran, serta penguatan fitur dan perluasan penggunaan BIFAST, pengembangan *cross-border payment* dengan negara-negara ASEAN (*QRIS Cross Border*), serta perluasan implementasi Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP). Berbagai kebijakan tersebut didukung sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) terutama untuk perluasan elektronifikasi transaksi

keuangan Pemda, penyaluran Bansos nontunai, dan perluasan elektronifikasi dan integrasi moda transportasi, serta digitalisasi UMKM dan sektor pariwisata.

Pengembangan ekonomi dan keuangan hijau perlu dilakukan secara bersama dan tersinergi untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tuntutan untuk *go green* merupakan suatu keniscayaan. Di samping hal tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat global, studi menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan terdampak paling signifikan dari adanya perubahan iklim, baik dari sisi *transition risk* maupun *physical risk*. Perubahan iklim juga memberikan ancaman yang besar bagi terjaganya stabilitas moneter maupun sistem keuangan. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan hijau memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor dan pelaku industri yang sangat kuat baik dari aspek pembiayaan maupun teknis. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menyusun *roadmap* untuk mencapai *low carbon banking industry* yang mendukung target penurunan karbon NDC pada 2030 sebesar 29%. Termasuk dalam kebijakan ini adalah pengembangan kebijakan makroprudensial hijau, pendalaman pasar uang hijau, serta pengembangan ekonomi-keuangan hijau dan inklusif. Tentunya upaya pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi-keuangan hijau tersebut harus dilakukan dengan bersinergi dengan Pemerintah, OJK, KSSK, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

1.6 Penutup

Berbagai perspektif kebijakan yang diuraikan di atas sejalan dengan pemikiran buku kajian sebelumnya (ISEI, 2021) mengenai tantangan pemulihan ekonomi nasional dan strategi kebijakan pengembangan ekonomi inklusif di era *new normal*. Pemikiran yang lebih komprehensif dan juga komplementatif dengan berbagai kebijakan tersebut adalah bahwa untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, paradigma pembangunan ekonomi nasional juga perlu lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi, yang tentunya berjalan paralel dengan upaya penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Paradigma ini terutama menitikberatkan pada asas inklusivitas secara holistik guna mengurangi disparitas pembangunan ekonomi, khususnya melalui pengembangan infrastruktur dan perluasan pelayanan publik, pemberdayaan kekuatan ekonomi kerakyatan dalam

hal ini melalui penguatan UMKM, akselerasi digitalisasi dan inovasi, pengembangan modal manusia, serta penguatan faktor kelembagaan inklusif, yang keseluruhannya berbasis pada pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Pokok-pokok pemikiran tersebut diuraikan secara lebih detail dan mendalam melalui kajian kebijakan publik penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas dan mendorong momentum pemulihan ekonomi yang inklusif di era digital pada bab selanjutnya di buku ini.





BAB II

MEMPERKUAT SINERGI KEBIJAKAN UNTUK MENJAGA STABILITAS DARI MENINGKATNYA TEKANAN GLOBAL

Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Resiliensi perekonomian Indonesia perlu terus dijaga di tengah kondisi ekonomi dan keuangan global yang terus mengalami tekanan. Tekanan tersebut merupakan implikasi dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian yang ditimbulkannya terhadap berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi dan keuangan, serta efek luka (*scarring effect*) terhadap aspek kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Kondisi ketidakpastian global diperparah dengan adanya perang di Ukraina dan peningkatan tensi geopolitik di Asia Timur serta peningkatan tekanan inflasi di banyak negara, dan respons kebijakan normalisasi.

Dalam upaya menjaga berlanjutnya momentum pemulihan di tengah peningkatan tekanan global terhadap stabilitas, peran bauran kebijakan semakin strategis. Sebagaimana respons kebijakan menghadapi krisis Covid-19 yang telah membuat pemerintah dan bank sentral dunia melakukan stimulus kebijakan dalam skala besar, tantangan yang kini dihadapi juga menuntut kembali adanya sinergi kebijakan. Kompleksitas permasalahan yang berkembang menuntut adanya kalibrasi ulang terhadap berbagai sinergi kebijakan tersebut. Terdapat dua permasalahan pokok yang dihadapi negara berkembang. Pertama, tekanan terhadap stabilitas perekonomian sebagai dampak rambatan (*spillover*) dari kebijakan normalisasi di negara maju terutama melalui peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kedua, proses pemulihan ekonomi yang masih rapuh pascapandemi, sehingga kebijakan untuk tetap melanjutkan stimulus perekonomian tetap diperlukan. Hal ini juga menjadi penting mengingat proses pemulihan ekonomi yang lebih kuat menjadi syarat untuk meningkatkan resiliensi perekonomian menghadapi berbagai tekanan global ke depan. Dengan demikian, kebijakan makroekonomi yang sinergis antara kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan serta kebijakan reformasi struktural menjadi amat penting untuk menavigasi perekonomian melewati turbulensi perekonomian global.

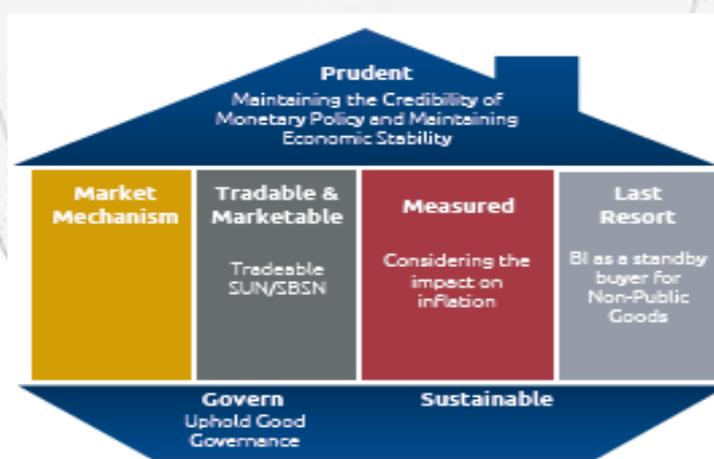
Sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait juga menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas perekonomian. Sinergi kebijakan nasional yang ditopang kebijakan daerah dapat mendukung kestabilan perekonomian daerah yang salah satunya dapat diukur dengan inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mendukung pengendalian inflasi nasional maka diperlukan inflasi daerah yang terkendali. Oleh karena itu, peran Pemda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang juga didukung Bank Indonesia melalui kantor perwakilannya di daerah menjadi sangat penting. Melalui stabilitas perekonomian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga untuk jangka menengah-panjang.

2.1 Melanjutkan Kebijakan Makroekonomi yang Konsisten dan Berhati-Hati

Tiga pelajaran penting yang didapat dalam hal pengelolaan kebijakan makroekonomi. Pertama, kebijakan nonkonvensional (*unconventional policy*) melalui bauran kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat terlaksana dengan baik terutama karena implementasi kebijakan yang dilaksanakan memiliki kredibilitas yang kuat. Kredibilitas yang terbentuk merupakan akumulasi kebijakan yang konsisten dan hati-hati (*prudent*) yang ditempuh pengampu kebijakan di Indonesia selama ini. Dalam kondisi yang berat dan penuh tantangan, kredibilitas kebijakan yang tinggi ini memungkinkan otoritas kebijakan mengambil kebijakan yang nonkonvensional. Menjadi pelajaran penting dan berharga bahwa keberlanjutan kebijakan makroekonomi yang konsisten dan berhati-hati harus terus mewarnai pengambilan kebijakan ke depan.

Kedua, untuk merespons dampak luar biasa (*extraordinary shock*) akibat pandemi Covid-19 maka dibutuhkan juga kebijakan luar biasa (*extraordinary policy*). Dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah dan bank sentral di banyak negara menempuh kebijakan nonkonvensional. Kenaikan pengeluaran pada saat penerimaan mengalami penurunan, mendorong pemerintah untuk menjalankan kebijakan defisit anggaran yang lebih besar. Untuk kasus Indonesia, pada tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1/2020 yang memperbolehkan defisit melebihi

3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pada tahun 2023 defisit tidak boleh melebihi 3% terhadap PDB, batasan maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di lelang pasar perdana untuk pembiayaan APBN sebagai pembeli siaga sebagaimana telah disepakati.¹ Adapun prinsip pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana dilaksanakan secara transparan dan kredibel sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1**. Di sisi lain, OJK juga memberikan relaksasi bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan penundaan angsuran pokok dan bunga, sehingga tidak berdampak pada kenaikan kredit bermasalah dan penurunan permodalan. Adapun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan terjaminnya simpanan masyarakat pada perbankan, sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Dengan kredibilitas yang kuat, penerapan *extraordinary policy* telah membuahkan hasil dengan tetap terjaganya stabilitas ekonomi, terpeliharanya stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran dan kembalinya secara kuat dan cepat proses pemulihan ekonomi yang mulai terjadi sejak 2022.



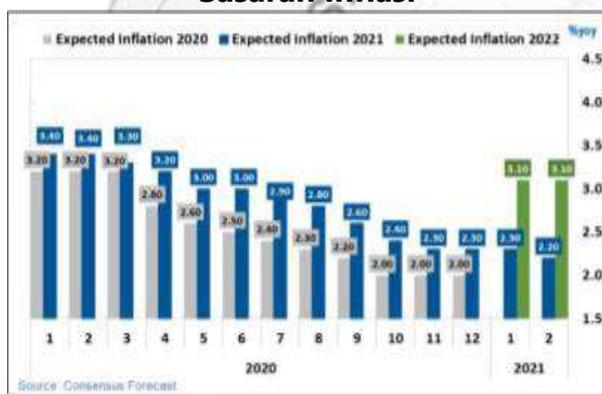
Gambar 1. Prinsip Pembelian SBN oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana

Ketiga, koordinasi dan komunikasi berperan penting dalam mempengaruhi pembentukan ekspektasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada efektivitas kebijakan dalam mencapai targetnya. Kuatnya sinergi kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah, KSSK, dan Bank Indonesia dapat mendorong

¹ Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020

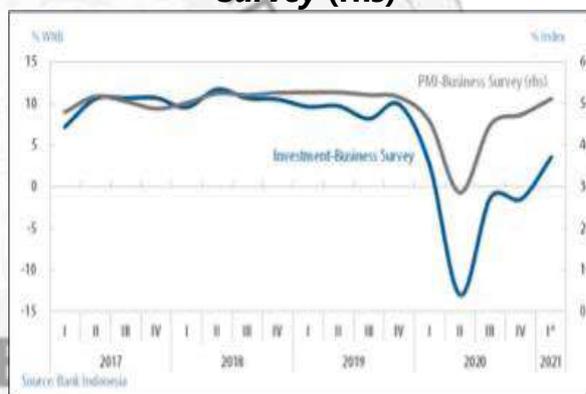
perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga. Koordinasi dan komunikasi ini telah secara efektif mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan dan sekaligus memastikan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut. Seiring dengan komunikasi kebijakan yang diterapkan, serangkaian instrumen kebijakan terus digunakan untuk mempertahankan banyak tujuan, seperti stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan pemulihan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi kuat antarotoritas, baik dari Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Pengukuran efektivitas kebijakan dapat tercermin dari berbagai indikator, seperti tercermin dari ekspektasi inflasi yang sesuai dengan sasaran inflasi (**Grafik 13**), serta kepercayaan dari sisi bisnis yang pulih dengan cepat (**Grafik 14**).

Grafik 13. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi



Sumber: Consensus Forecast

Grafik 14. PMI & Investment-Business Survey (rhs)

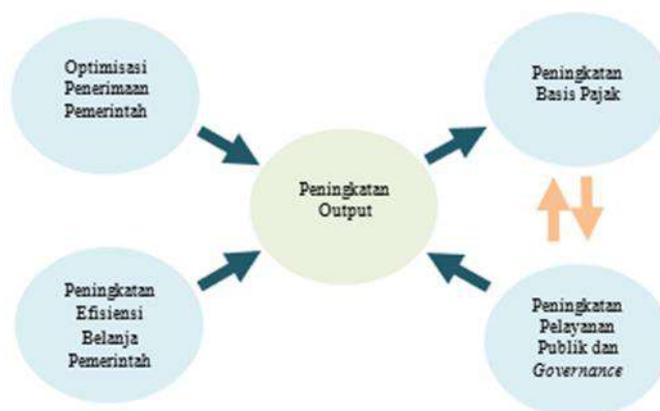


Sumber: Bank Indonesia

2.1.1 Kebijakan Fiskal sebagai *Shock Absorber* dan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan yang bersifat *counter-cyclical* sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Namun, kenaikan harga energi di pasar dunia berimplikasi pada melonjaknya anggaran untuk subsidi dan mengakibatkan 'ruang gerak' pemerintah untuk menerapkan *counter-cyclical fiscal policy* menjadi terbatas. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar memiliki 'ruang gerak' yang lebih besar untuk kebijakan fiskal. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah, baik dalam

jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang. Secara garis besar, kerangka kebijakan fiskal disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Kebijakan Fiskal

2.1.2 Peran Fiskal sebagai *Shock Absorber* dalam Jangka Pendek dan Menengah

Kebijakan fiskal dapat mengatasi *shock* dalam jangka pendek dan menengah melalui optimalisasi penerimaan pemerintah dan peningkatan efisiensi belanja pemerintah. Salah satu instrumen pajak yang dapat dioptimalkan pendapatannya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce*. Transaksi perdagangan melalui *platform* digital (*e-commerce*) mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19 dan telah mencapai angka Rp401 triliun pada tahun 2021. Namun demikian, penerimaan PPN dari transaksi *e-commerce* tersebut masih jauh lebih rendah dari potensi optimalnya. Meskipun data penerimaan PPN yang berasal dari transaksi *e-commerce* belum tersedia, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat digunakan sebagai indikator jumlah pelaku ekonomi yang berada dalam sistem perpajakan. Pada tahun 2021, jumlah total kepemilikan NPWP (Orang dan Badan) hanya 45,4 juta dari total jumlah pekerja mencapai sekitar 131 juta individu. Data tersebut menunjukkan tingginya jumlah pekerja yang masih berada di luar sistem perpajakan.

Meningkatnya transaksi *e-commerce* memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Karena setiap transaksi tercatat secara elektronik maka basis pengenaan pajak lebih jelas, sehingga memudahkan administrasi pajak dalam proses pengumpulan maupun pemeriksaan. Pada saat ini, transaksi elektronik yang dikenai PPN masih sebatas Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak. Untuk benda berwujud, tidak ada perbedaan regulasi PPN dengan transaksi konvensional. Namun banyaknya pelaku ekonomi yang berada di luar sistem perpajakan (tidak memiliki NPWP) mengakibatkan banyak potensi penerimaan pajak yang tidak terealisasi walaupun transaksinya terjadi di platform elektronik.

Penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) belum optimal meskipun tetap tumbuh positif di masa pandemi. Hal tersebut disebabkan kompleksnya struktur tarif CHT di Indonesia (Prasetyo and Adrison 2020). Sebagai informasi, tarif CHT di Indonesia bergantung dari 3 komponen, yaitu jenis rokok (Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, dan Sigaret Kretek Tangan/SKT, golongan produksi, dan harga banderol. Struktur yang kompleks tersebut tidak optimal baik bagi penerimaan pemerintah maupun pengendalian konsumsi (Chaloupka, Yurekli, and Fong 2012; Liber *et al.* 2015; Shang *et al.* 2019). Sebagai contoh, dengan menerapkan jumlah produksi sedikit di bawah batasan golongan tertentu (misalnya 1 batang kurang dari 3 miliar batang per tahun), produsen SKM golongan II hanya akan membayar 60% dari cukai yang dibayarkan oleh golongan I. Produsen SKM II bisa menjual rokok dengan harga yang lebih murah, tidak hanya karena cukai yang lebih rendah tetapi karena harga minimum untuk golongan II jauh lebih rendah dari harga minimum untuk golongan I. Dengan demikian, selain tidak optimum bagi penerimaan negara, struktur cukai yang kompleks juga tidak efektif untuk mengurangi konsumsi hasil tembakau.

Dalam konteks ini, Pemerintah dapat melakukan dua hal untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mengurangi konsumsi tembakau. Pertama, Pemerintah dapat mengurangi lapisan tarif CHT/simplifikasi struktur tarif cukai. Kedua, Pemerintah dapat menurunkan batasan golongan produksi. Kebijakan tersebut akan meningkatkan harga produk hasil tembakau, khususnya golongan II, sehingga berpotensi untuk mengurangi konsumsi rokok. Di sisi lain, walaupun ada kemungkinan penurunan permintaan, penerimaan pemerintah akan naik karena dua faktor, yaitu permintaan terhadap rokok yang bersifat inelastis dan nilai cukai per unit dan basis pajak untuk PPN rokok meningkat.

Indonesia memiliki potensi cukai yang cukup besar dari dua produk yang saat ini belum dikenakan cukai, yaitu produk plastik dan minuman berpemanis.

Banyak negara yang telah menerapkan cukai terhadap kedua produk tersebut. Cukai terhadap produk plastik dikenakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan plastik yang berlebihan. Sementara itu, cukai untuk minuman berpemanis dapat ditujukan untuk mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh asupan gula yang berlebih seperti obesitas dan diabetes.

Peningkatan efisiensi belanja pemerintah dapat terus diupayakan melalui pengurangan subsidi BBM. Di satu sisi, peningkatan anggaran untuk subsidi BBM dapat mencegah *cost-push inflation* akibat kenaikan harga energi dunia. Di sisi lain, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun pada tahun 2022 menjadi beban yang sangat besar. Hal tersebut juga akan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Alokasi yang lebih besar untuk pengeluaran subsidi BBM akan membuat pemerintah mengurangi belanja lainnya (barang/jasa/pembangunan) yang dapat meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Jika Pemerintah berusaha mempertahankan pengeluaran lainnya di saat kenaikan anggaran subsidi BBM, Pemerintah harus menarik utang baru. Implikasinya, akan ada peningkatan cicilan pokok dan bunga utang di masa yang akan datang. Sebagai informasi, rasio pembayaran bunga utang Indonesia terhadap belanja pemerintah pusat menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, sekitar 17% pengeluaran pemerintah pusat dialokasikan untuk pembayaran bunga hutang (**Grafik 15**). Tentunya kondisi ini akan makin berat jika pemerintah menarik utang baru akibat upaya mempertahankan subsidi BBM yang besar.

Grafik 15. Pengeluaran Pemerintah Pusat, 2011-2020



Upaya lain dalam meningkatkan efisiensi pemerintah dapat dicapai melalui optimalisasi penyerapan anggaran pemerintah. Pola anggaran pemerintah selama ini mengikuti pola yang rendah pada awal tahun dan meningkat drastis pada akhir tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2022 realisasi belanja APBN pada triwulan I dan II 2022 masing-masing mencapai 18% dan 45% terhadap total anggaran tahunan.² Pada triwulan ke III, serapan anggaran biasanya lebih rendah dari 75%. Contoh lainnya, sampai dengan akhir triwulan III 2021, anggaran yang terserap baru mencapai 65%.³ Peningkatan yang drastis biasanya terjadi pada triwulan ke IV. Pola penyerapan yang rendah pada awal tahun dan meningkat drastis pada akhir tahun juga terjadi pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), seperti tertera dalam Tabel 1.

Tabel 1. Serapan Anggaran PEN 2021

	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	Kuartal IV (sampai 28 Desember 2021)	Pagu Anggaran
Realisasi Pengeluaran (Triliun Rupiah)					
Kesehatan	14.9	47.7	104.1	198.5	215.0
Perlindungan Sosial	44.0	66.4	117.3	171.0	186.6
Program Prioritas	12.6	41.8	62.5	105.4	117.9
UMKM dan Korporasi	37.7	51.3	66.7	116.2	162.4
Insentif Usaha	14.0	45.1	59.4	67.7	62.8
Rasio Realisasi terhadap Pagu Anggaran (%)					
Kesehatan	6.9	22.2	48.4	92.3	
Perlindungan Sosial	23.6	35.6	62.8	91.6	
Program Prioritas	10.7	35.5	53.0	89.4	
UKM dan Korporasi	23.2	31.6	41.1	71.6	
Insentif Usaha	22.3	71.7	94.6	108	

Sumber: Perhitungan penulis dari Laporan Mingguan Kementerian Keuangan

(<https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi>)

² <https://sindikasi.republika.co.id/berita/ra7ovy383/>

³ <https://voi.id/ekonomi/97709/sri-mulyani-laporkan-penggunaan-apbn-hingga-kuartal-iii-2021-keuangan-negara-semakin-baik>

Pola penyerapan anggaran seyogyanya diubah, tidak lagi menggunakan pola rendah pada awal tahun dan meningkat drastis pada akhir tahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal karena barang (dan jasa) publik yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak tersedia. Di samping itu, ada tekanan inflasi akibat peningkatan pengeluaran pemerintah yang drastis untuk mencapai target serapan akhir tahun (Adrison & Flukeria 2016). Jika peningkatan pengeluaran pemerintah pada akhir tahun lebih didorong oleh target penyerapan anggaran untuk menghindari sanksi dari pemerintah pusat, peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap indikator pembangunan.⁴ Sebagai solusi perbaikan serta meningkatkan dampak anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sistem insentif (*reward and punishment*) yang berimplikasi terhadap besaran anggaran yang diterima oleh institusi pemerintah dapat menggunakan ukuran *outcome* pembangunan. Misalnya, ukuran ini diterapkan melalui pertumbuhan ekonomi yang tercipta, penurunan angka kemiskinan, meningkatnya konektivitas antardaerah, dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan agar ada upaya perbaikan terus menerus, sehingga *outcome* yang dijadikan sebagai dasar untuk sistem insentif yang diukur tidak hanya pada satu titik waktu tertentu.

2.1.3 Peran Fiskal sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Panjang

Kebijakan fiskal juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu caranya melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh transaksi perpajakan. Penggunaan NIK untuk seluruh transaksi perpajakan akan dimulai pada tahun 2024.⁵ Karena NIK merupakan identitas dasar yang dimiliki oleh setiap orang (bahkan untuk anak yang baru lahir), maka jumlah orang yang masuk ke dalam sistem perpajakan akan meningkat drastis. Kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam jangka panjang.

⁴ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/403107/kepala-daerah-harus-diberi-sanksi-jika-penyerapan-anggaran-rendah>

⁵ <https://www.pajak.com/pajak/transaksi-perpajakan-gunakan-nik-mulai-1-januari-2024/>

Insentif untuk penghindaran pajak masih ada, baik *legal (tax avoidance)*, maupun *illegal (tax evasion)*, meskipun jumlah orang yang masuk ke dalam sistem perpajakan meningkat. Untuk *tax avoidance*, rekomendasi yang spesifik sulit untuk dijelaskan karena kasusnya akan berbeda antarsektor. *Tax avoidance* timbul akibat wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (*loopholes*), sehingga pemerintah harus secara berkelanjutan mengevaluasi peraturan-peraturan yang membuka kesempatan untuk *tax avoidance*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami motivasi orang untuk melakukan pengemplangan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi insentif untuk pengemplangan pajak. *Survey literature* yang dilakukan oleh Alm (2019) menemukan bahwa beberapa faktor seperti tarif pajak, penalti, pengetahuan tentang pajak tidak memberikan hasil empiris yang konklusif. Di sisi lain, studi-studi tentang dampak audit, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan *positive inducement* terhadap ketaatan pembayaran pajak menunjukkan hasil yang lebih seragam.⁶ Peningkatan audit (baik level maupun kedalaman proses audit) akan meningkatkan *cost of non compliance*, sehingga wajib pajak memiliki insentif yang lebih besar untuk taat. Sementara itu, *positive inducement* dan partisipasi dalam pengambilan keputusan mampu meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan memang digunakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pembelajaran dari Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 dan 2021

Mutasi virus yang terus terjadi meningkatkan ketidakpastian berapa lama pandemi Covid-19 terjadi. Jika jumlah kasus harian terus mengalami peningkatan sampai tingkat tertentu dan mengakibatkan pemerintah melakukan pembatasan aktifitas sosial untuk mengurangi transmisi virus, maka aktifitas ekonomi akan kembali menurun. Sejalan dengan hal tersebut, basis pajak akan menurun, sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah. Pada saat yang sama, Pemerintah harus meningkatkan belanja untuk perlindungan sosial dan membantu

⁶ Pemberiaan berbagai macam apresiasi/*reward* untuk pembayar pajak yang taat

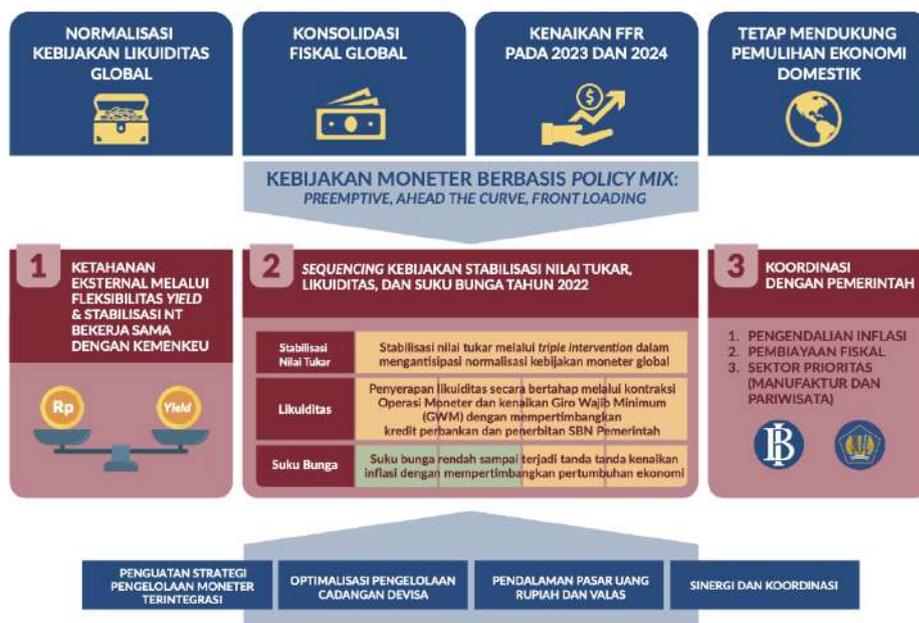
pelaku ekonomi tetap bertahan, serta pengeluaran untuk mengendalikan pandemi. Tekanan terhadap anggaran pemerintah tersebut akan membahayakan keberlanjutan kebijakan fiskal.

Untuk mengurangi tekanan terhadap APBN, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan PEN 2020 dan 2021. Pertama, **alokasi anggaran yang cukup untuk kesehatan** agar pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) berjalan dengan baik. Semakin cepat sektor kesehatan membaik, semakin cepat ekonomi akan pulih. Kedua, **Pemerintah perlu lebih fokus pada kebijakan yang meningkatkan permintaan (*demand boosting*)** jika penyebaran virus masih sangat tinggi dan berakibat pada penerapan pembatasan aktifitas sosial. Dalam kondisi pandemi, pengeluaran nonesensial akan menurun, sehingga akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang/jasa nonesensial. Akibatnya, pendapatan orang yang menghasilkan barang/jasa nonesensial akan menurun. Di sisi lain, mereka tetap harus tetap memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat miskin/yang terdampak pandemi bisa memberikan insentif orang untuk membatasi aktifitas di luar rumah serta mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Ketiga, **perlunya mempertimbangkan kebijakan yang bersifat pengurangan biaya (*cost-reducing policies*) karena memiliki leverage terbatas.** Sebagai contoh, dalam kondisi normal, pembebasan PPh 22 untuk barang import akan mengurangi biaya produsen. Namun, jika pandemi mengakibatkan *demand* terhadap suatu barang lebih rendah dari titik minimum yang diharapkan produsen, produsen tidak memiliki insentif untuk memproduksi walaupun ada penurunan biaya.

2.1.4 Kebijakan Moneter

Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi Covid-19 maka dibutuhkan stabilitas perekonomian yang terjaga. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 yaitu menjaga stabilitas perekonomian yang diiringi dengan dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan diarahkan untuk dilakukan secara *pre-emptive, ahead the curve, dan front-loading* (Gambar 3). Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter, konsolidasi kebijakan fiskal

global dan kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.



Gambar 3. Arah Kebijakan Moneter Tahun 2022

Sumber: Bank Indonesia

Untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian, Bank Indonesia pada Agustus 2022 menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 3,75%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi *volatile food*, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi.

Normalisasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dilakukan dengan penurunan secara bertahap untuk menyerap kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan secara terukur dan berhati-hati. Hal ini agar tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dan membeli SBN, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta proses pemulihan ekonomi berlangsung dengan baik. Di sisi lain,

sebagai respons terhadap dampak normalisasi kebijakan moneter The Fed, maka kebijakan ditekankan pada kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas eksternal. Hal ini ditekankan agar tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral akan terus memonitor pasar dan harus selalu siap untuk menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah bila diperlukan melalui *triple intervention*, yakni intervensi di pasar *spot*, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Seiring dengan meningkatnya tekanan global di tengah krisis akibat dampak pandemi Covid-19, fokus saat ini adalah pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkesinambungan dengan tetap terjaganya inflasi. Indonesia merupakan salah satu *emerging market country* yang tidak lepas dari ancaman dampak inflasi berkepanjangan, terutama inflasi *volatile food* (VF) yang nilainya sudah lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi (Grafik 6), serta adanya isu geopolitik akibat perang di Ukraina yang mengganggu rantai pasokan. Sementara itu, penawaran terhadap penekanan harga juga terbatas. Ancaman inflasi yang diperkirakan akan terus meningkat di Indonesia pada tahun 2022 menyebabkan diperlukannya penanganan secara cepat.

Pengendalian inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi kebijakan antarotoritas juga perlu terus diperkuat. Koordinasi tersebut ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi khususnya dari pengaruh kenaikan harga komoditas global dan tekanan harga kelompok makanan bergejolak atau VF dengan mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Selain mendukung pengendalian inflasi, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah juga mendorong penguatan sektor-sektor prioritas dalam asesmen perkembangan dan permasalahan yang terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Begitu juga dengan memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu ditempuh berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA). Koordinasi dan dukungan penuh antar otoritas ini juga terus

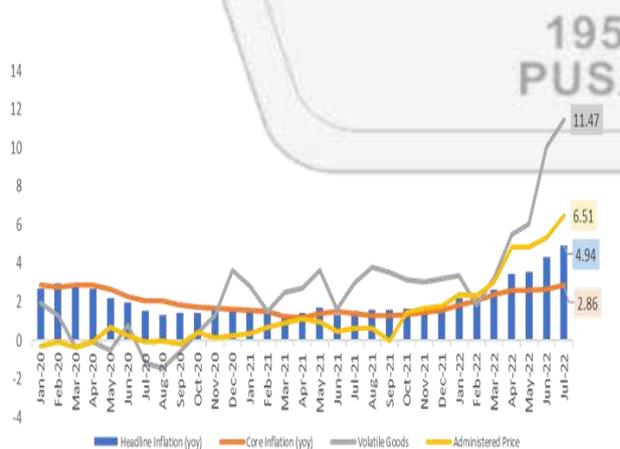
diperkuat dalam peningkatan dan pengembangan UMKM baik secara nasional maupun di daerah.

Selain menjaga stabilitas perekonomian, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dari sisi permintaan agregat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dicapai melalui pembahasan asumsi makro dalam penyusunan APBN serta mengadakan pertemuan antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam asesmen perkembangan ekonomi terkini. Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut mempertimbangkan realisasi belanja APBN oleh pemerintah dan pengelolaan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rencana penerbitan SBN, baik domestik maupun global. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan global dan pengaruhnya terhadap stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik.

Di samping memperkuat kebijakan moneter, implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif juga dilanjutkan oleh Bank Indonesia dalam upaya mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Penguatan kebijakan makroprudensial tersebut dapat mendorong kredit/pembiayaan perbankan, termasuk pemberian kemudahan akses terhadap UMKM dan digitalisasi bagi UMKM. Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang telah dilakukan, pertumbuhan kredit pada 2022 diperkirakan dalam kisaran 9,0-11,0% (yoy) lebih tinggi dibandingkan prakiraan semula dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar juga ditempuh oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Bank Indonesia memperkuat operasi moneter sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder. Hal ini dapat dilihat dari depresiasi Rupiah masih cenderung stabil dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, China dan Malaysia (**Grafik 17**). Rupiah mengalami apresiasi pada awal Agustus dengan kenaikan The Fed yang tidak terlalu agresif (+75 bps) dan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 sebesar 5,44% (yoy). Secara mingguan, beberapa mata uang negara lainnya juga mengalami penguatan dengan USD Index yang melemah setelah menyentuh titik tertingginya pada pertengahan Juli 2022. Stabilitas nilai tukar Rupiah harus tetap dijaga di tengah berbagai tantangan hal ke depan, terutama melihat pengaruhnya terhadap inflasi melalui komponen barang impor (*imported inflation*). Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sinergi kebijakan nasional dengan menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga inflasi tetap terkendali, kegiatan ekonomi terus tumbuh, serta nilai tukar Rupiah yang cenderung stabil.

Grafik 16. Perkembangan Inflasi Indonesia



Sumber: Diolah dari BPS

Grafik 17. Depresiasi Rupiah Dibanding Negara Lain



Sumber: Bloomberg

2.2 Penguatan Bauran Kebijakan Nasional

Indonesia dipandang berhasil dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah berbagai tekanan. Berdasarkan proyeksi data yang dirilis IMF, ekonomi

Indonesia masih tumbuh kuat dan membaik pada tahun 2022 dan 2023, serta diikuti dengan penurunan angka pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan Indonesia masih dapat tumbuh di atas 5% (yoy) pada 2022 di tengah ekonomi global yang diperkirakan semakin memburuk. Namun demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan lebih bias ke bawah di rentang 4,5-5,3% (yoy) per Juli 2022 dengan inflasi yang bisa mencapai 4,6% (yoy). Sementara itu, konsumsi Indonesia diperkirakan akan stabil di tengah inflasi dan ekspor akan tetap tumbuh seiring dengan harga komoditas yang masih tinggi.

Keberhasilan dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tidak terlepas dari efektivitas sinergi kebijakan antarpemangku kebijakan. Dengan berbagai kondisi ekonomi yang ada, maka diperlukan sinergi kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya, seperti OJK dan LPS. Koordinasi kebijakan moneter-fiskal dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi juga perlu didukung kebijakan lainnya, seperti kebijakan makroprudensial. Berbagai sinergi kebijakan tersebut ditujukan untuk menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



Gambar 4. Koordinasi Kebijakan

2.2.1 Satu Prasyarat, Lima Respons Kebijakan

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional juga turut didukung melalui penguatan sinergi dan inovasi. Sinergi dan inovasi tersebut ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 dan membuka kembali sektor ekonomi prioritas. Sinergi dan inovasi juga dapat mendorong pemulihan ekonomi jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan. Adapun dalam jangka

menengah, sinergi dan inovasi dapat ditempuh melalui kebijakan reformasi struktural (Gambar 5).



Gambar 5. Sinergi Kebijakan Nasional

Sumber: Bank Indonesia

Sinergi kebijakan nasional dalam mengatasi pandemi Covid-19 memiliki satu kondisi prasyarat (*necessary condition*) serta lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan (*sufficient conditions*). Satu kondisi prasyarat tersebut yaitu vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19. Adapun lima kebijakan sebagai kondisi yang diperlukan yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil; (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal; (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan; (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (v) ekonomi dan keuangan hijau.

Satu kondisi prasyarat berupa pelaksanaan vaksinasi sebagai *necessary condition* terus dilakukan seiring dengan pasokan dan distribusi vaksin global yang semakin baik. Episentrum permasalahan ekonomi saat ini berasal dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Oleh karena itu, sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas menjadi prasyarat bagi keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membuka sektor-sektor ekonomi dengan tetap memperhatikan strategi pemenuhan penanganan pandemi yaitu percepatan vaksinasi, peningkatan 3T, serta penerapan protokol kesehatan dan peduli lingkungan. Program

vaksinasi harus terus dipercepat untuk mencapai tingkat imunitas massal, sehingga dapat memperkuat ketahanan terhadap penularan Covid-19.

Respons kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi transformasi sektor riil difokuskan pada pemulihan sektor-sektor prioritas guna mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini sangat penting sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, baik pemecahan berbagai kendala dari sisi sektor riil, pemberian insentif kebijakan fiskal, maupun dukungan kebijakan makroprudensial dan sektor keuangan yang diperlukan. Pemulihan sektor-sektor prioritas dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, memetakan sektor-sektor prioritas yang mampu berdaya tahan, mendorong pertumbuhan, dan dapat menopang pemulihan ekonomi.⁷ Kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemulihan sektor-sektor prioritas, baik kendala di sektor riil maupun dari sisi pembiayaan. Ketiga, merumuskan dan mengimplementasikan sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan kondisi di masing-masing sektor produktif.

Pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan sinergi kebijakan fiskal dan stimulus moneter dan makroprudensial untuk mendorong permintaan khususnya dalam jangka pendek. Stimulus fiskal dengan jumlah yang relatif besar akan mendukung proses pemulihan nasional. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk program strategis APBN 2022 dalam mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Dari sisi moneter, Bank Indonesia memperkuat perannya dalam pendanaan APBN 2021 dan 2022 yang disertai dengan partisipasi berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan limit yang diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia.

Dukungan percepatan realisasi stimulus fiskal untuk mendukung akselerasi transformasi sektor keuangan dibutuhkan sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral mendukung upaya pemerintah dan turut berpartisipasi dalam pendanaan APBN untuk akselerasi

⁷ Terdapat 8 subsektor prioritas utama: Industri Makanan dan Minuman, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Logam Dasar, Industri Alat Angkutan serta Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

vaksinasi maupun penanganan kesehatan dan kemanusiaan. Partisipasi dalam pendanaan APBN oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara langsung (*private placement*) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berkontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022) yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Indonesia.

Respons kebijakan untuk mendukung akselerasi juga menyangkut pada peningkatan dan kemudahan pembiayaan dari sektor keuangan kepada pelaku usaha. Kebijakan mendorong penyaluran kredit perbankan diperlukan baik dari sisi penawaran kredit oleh perbankan maupun sisi permintaan kredit dari pelaku usaha dalam jangka pendek. Dari sektor industri makanan dan minuman, kimia, otomotif, dan alat angkut lainnya penyaluran kredit meningkat karena adanya permintaan dari korporasi dan perbankan yang siap untuk membiayai. Namun, sektor lainnya masih memerlukan insentif untuk mendorong kredit, baik insentif di sektor riil maupun insentif ke perbankan dalam bentuk jaminan kredit atau insentif suku bunga.

Berbagai sinergi kebijakan perlu ditingkatkan dan diperluas, salah satunya melalui akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dan keuangan nasional, khususnya pada UMKM. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BWI) telah terbukti meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian, antara lain melalui program belanja produk-produk UMKM dan perluasan penggunaan QRIS di UMKM. Hal tersebut turut mendorong inklusi ekonomi dan keuangan nasional. Gernas BBI dan BWI tersebut didukung oleh sinergi yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemda maupun dengan pelaku usaha, baik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama di berbagai daerah maupun *event* strategis yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, seperti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diselenggarakan setiap tahunnya. Inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung program pemerintah melalui elektronifikasi penyaluran program perlindungan sosial, berbagai moda transportasi maupun elektronifikasi keuangan Pemda.

2.2.2 Sinergi Kebijakan Antarotoritas untuk Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Sinergi kebijakan antar otoritas dapat terus diperkuat untuk menjaga momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Sinergi kebijakan tersebut dilakukan baik dari sisi sektor riil maupun sektor keuangan. Pada sektor riil, fokus kebijakan pemerintah antara lain berkaitan dengan implementasi program PEN dan upaya struktural untuk mendorong penciptaan kerja melalui kemudahan berusaha dan reformasi regulasi, penguatan program kartu prakerja dan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan ekosistem investasi. Untuk itu, kebijakan ekspansif pemberian stimulus melalui program PEN terus dilanjutkan sejalan dengan penguatan koordinasi fiskal dan moneter.

Komitmen Bank Indonesia untuk melakukan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN dalam Skema *Burden Sharing* adalah salah satu contoh sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas yang cukup berhasil. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun, baik melalui pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun, dan *private placement* sebesar Rp215 triliun. Kebijakan tersebut melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, terdiri dari pembelian SBN melalui mekanisme lelang di pasar perdana sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian SBN secara langsung sebagai mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) APBN sebesar Rp397,56 triliun.

Untuk mendukung pemulihan ekonomi, sinergi antarotoritas melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeluarkan Paket Kebijakan Terpadu yang bersifat *across the board* dan *sector specific*. Sinergi kebijakan tersebut telah mampu mendorong pemulihan ekonomi, terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 3,69% (yoy), membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 2,07% (yoy). Berdasarkan pemetaan kredit dan pembiayaan, terdapat 38 subsektor prioritas dengan kontribusi besar pada PDB dan

ekspor yang terdiri dari 6 subsektor berdaya tahan, 15 subsektor pendorong pertumbuhan serta 17 subsektor penopang pemulihan. Sektor prioritas tersebut dibagi menjadi tiga klaster, meliputi: industri yang berdaya tahan (*resilience*), pendorong pertumbuhan (*growth driver*), dan penopang pemulihan (*slow starter*). Memerhatikan kapasitas sektor prioritas dalam mendorong ekspor dan PDB maka diperlukan pendalaman terhadap 8 sektor, yaitu sektor makanan dan minuman, kimia, otomotif, karet, kertas, logam dasar, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki. Mengingat upaya *debottlenecking* dunia usaha bersifat lintas sektor maka koordinasi KSSK dapat diperluas dengan melibatkan otoritas terkait.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan OJK di berbagai bidang juga perlu terus diperkuat dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM). Koordinasi kebijakan dalam kerangka FKMM terutama diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, pengembangan pasar keuangan dan sistem pembayaran. Koordinasi kedua otoritas tersebut bertujuan untuk mengeliminasi isu-isu yang bersinggungan (*cross-cutting issues*). Salah satu kebijakan yang dikoordinasikan secara intensif adalah kebijakan RPIM yang mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR). Melalui sinergi kebijakan dimaksud, diharapkan OJK turut mendorong kontribusi perbankan dalam implementasi kebijakan RPIM.

Seiring dengan meningkatnya tekanan global, fokus pemerintah saat ini adalah pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta berkesinambungan dengan inflasi yang rendah dan stabil. Ancaman inflasi yang diperkirakan akan terus meningkat di Indonesia pada tahun 2022 dan ke depannya perlu direspons dengan penanganan secara cepat oleh pemerintah dan penguatan sinergi antarotoritas. Inflasi yang persisten dapat mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia, serta otoritas terkait terus melakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dilaksanakan melalui pertemuan *High Level Meeting* (HLM) TPIP yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan beberapa langkah strategis untuk mengendalikan inflasi, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
2. Memitigasi dampak *upside risk* inflasi.
3. Menjaga inflasi kelompok *volatile food* maksimal 5% (yoy).
4. Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat agar tidak terjadi *panic buying* dan *food riots*.
5. Memperkuat koordinasi pemerintah pusat dengan daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).
6. Pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga menyetujui pengimplementasian kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022-2024.

Sejalan dengan strategi tersebut, TPIP dan TPID telah mendesain 7 (tujuh) kebijakan sebagai tindak lanjut Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, berdasarkan pendekatan 4K. *Pertama*, optimalisasi anggaran K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan operasi pasar dan menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) serta untuk menjaga daya beli masyarakat dari kenaikan harga yang terjadi. *Kedua*, perluasan kerja sama antardaerah (KAD). *Ketiga*, optimalisasi fasilitasi distribusi pangan strategis. *Keempat*, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi data dan informasi pangan. *Kelima*, penguatan ketahanan komoditas hortikultura dan penguatan pasokan pangan strategis lainnya. *Keenam*, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana produksi pertanian (saprotan). *Ketujuh*, penguatan koordinasi dan komunikasi, termasuk untuk menjaga ekspektasi inflasi.

2.3 Penguatan Kebijakan Ekonomi Regional

Untuk terus menjaga kestabilan harga atau inflasi nasional, dibutuhkan dukungan kebijakan ekonomi daerah. Kinerja inflasi daerah akan memengaruhi kinerja inflasi nasional secara keseluruhan. Untuk mewujudkan inflasi nasional yang stabil maka diperlukan inflasi daerah yang juga stabil. Bank Indonesia dan Pemda bersinergi dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi daerah melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Peran pemerintah pusat juga diperlukan misalnya melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang

mengupayakan pengendalian inflasi terutama kelompok makanan bergejolak atau VF. Hasil sinergi kebijakan tersebut terlihat dari kinerja inflasi yang sejauh ini masih terjaga di tengah tekanan-tekanan yang ada. Namun demikian, adanya tantangan global terkini berupa kenaikan harga komoditas yang dapat memengaruhi inflasi domestik ke depan tetap harus diwaspadai.

2.3.1 Perkembangan Inflasi Daerah

Perkembangan inflasi nasional mengalami peningkatan seiring dengan tekanan inflasi daerah yang meningkat. Perkembangan inflasi nasional sampai dengan Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy) persen. Secara tahunan, inflasi kelompok VF saat ini menyumbang komponen tertinggi tingkat inflasi secara nasional, yaitu sebesar 11,47% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi daerah pada Juli 2022 terjadi di wilayah Sulampua, Balinusra, dan Jawa. Komoditas utama penyumbang inflasi di wilayah Sulampua yaitu aneka cabai dan bawang, sedangkan di wilayah Balinusra didorong oleh inflasi komoditas tarif AU dan hortikultura. Tekanan inflasi juga dialami oleh wilayah Jawa yang didorong oleh komoditas cabai merah, bawang merah dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif di daerah sentra produksi dan penyesuaian harga energi nonsubsidi. Secara umum, kelompok utama penyumbang inflasi di daerah adalah kelompok VF. Adapun tekanan inflasi pangan daerah terutama dipengaruhi oleh komoditas hortikultura aneka cabai dan bawang merah (Tabel 2) seiring dengan kendala produksi hortikultura akibat curah hujan yang masih cukup tinggi.

Tabel 2. Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Kelompok *Volatile Food* Juli 2022 (mtm)

No.	Komoditas	Inflasi/Deflasi (% mtm)	Sumbangan (%)	Provinsi Pencatat Inflasi Tertinggi
INFLASI				
1	CABAI MERAH	25.33	0.15	Nusa Tenggara Timur (52.80%), Jambi (43.69%), Sulawesi Selatan (35.77%)
2	BAWANG MERAH	18.42	0.09	Sulawesi Selatan (51.52%), Sulawesi Tengah (50.45%), Kalimantan Timur (45.92%)
3	CABAI RAWIT	13.51	0.04	Maluku (49.06%), Sulawesi Barat (44.47%), Aceh (42.15%)
4	CABAI HIJAU	25.02	0.01	Riau (53.05%), Aceh (52.07%), Jawa Barat (32.02%)
5	MIE KERING INSTANT	2.37	0.01	Sulawesi Tengah (5.49%), Sumatera Barat (5.36%), DI Yogyakarta (4.87%)
6	TOMAT	3.85	0.01	Nusa Tenggara Barat (24.04%), Kalimantan Selatan (23.90%), Bali (17.32%)
7	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IK	2.29	0.01	Nusa Tenggara Timur (12.68%), Jawa Timur (10.04%), Sulawesi Tenggara (9.04%)
DEFLASI				
1	MINYAK GORENG	-5.27	-0.07	Kep. Bangka Belitung (-14.64%), Sumatera Utara (-12.45%), Jawa Tengah (-10.08%)
2	SAWI HIJAU	-11.10	-0.01	Jambi (-45.23%), Kep. Riau (-21.65%), DKI Jakarta (-20.72%)
3	TELUR AYAM RAS	-1.04	-0.01	Gorontalo (-6.53%), Aceh (-4.24%), Kep. Riau (-3.09%)
4	KANGKUNG	-3.84	-0.01	Sulawesi Tengah (-15.69%), Sulawesi Selatan (-14.98%), Kalimantan Utara (-10.44%)
5	BAWANG PUTIH	-2.92	-0.01	Sulawesi Utara (-12.27%), Jawa Tengah (-8.33%), Kep. Bangka Belitung (-8.10%)
6	BAYAM	-4.04	-0.01	Kalimantan Utara (-18.66%), Nusa Tenggara Timur (-13.51%), Kep. Riau (-13.12%)

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Sebagai tindak lanjut atas tekanan inflasi yang terjadi di berbagai daerah, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemda, serta Bank Indonesia melalui program 4K dan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program 4K terdiri dari program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang dikoordinasikan dalam TPID. Di samping itu, untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi, Bank Indonesia bersama TPID bersinergi melalui GNPIP. Langkah strategis tersebut ditujukan untuk secara konsisten mengendalikan inflasi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengendalikan inflasi kelompok VF ke targetnya mengingat inflasi pangan pada bulan Juli 2022 mencapai 11,47% (yoy). Inflasi pangan sangat berdampak bagi masyarakat karena dapat berdampak langsung pada kesejahteraan dan berpotensi menimbulkan masalah sosial ekonomi, sehingga kenaikannya harus diwaspadai.

2.3.2 Program Pengendalian 4K

Pencapaian inflasi yang masih terkendali tak terlepas dari sinergi Bank Indonesia dengan Pemda baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Kerjasama tersebut terjalin erat melalui TPID. Untuk mengendalikan inflasi telah dicanangkan Program 4K yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Secara umum, program 4K hampir sama penerapannya di setiap daerah dan sejauh ini cukup efektif dalam menjaga inflasi daerah. Namun demikian, dalam praktiknya tentunya bisa terdapat penerapan yang sedikit berbeda di setiap daerah mengingat karakteristik ekonominya yang berbeda. Hal ini tercermin dari komoditas pangan unggulan yang berbeda, serta tingkat konsumsi untuk pangan jenis tertentu yang bisa berbeda di masing-masing daerah. Sebagai contoh, Brebes (Jawa Tengah) memiliki keunggulan produksi bawang merah, sehingga menjadi sentra penghasil bawang merah utama di wilayah Jawa.

2.3.2.1 Keterjangkauan Harga

Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemda untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok penting. Hal tersebut dilakukan melalui program-program strategis yang dapat membantu meminimalkan lonjakan harga pada bahan pokok

yang berkolaborasi dengan satgas pangan. Programnya antara lain melalui pelayanan informasi pasar dan/atau koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pasokan serta harga pangan. Selain itu, pasar murah juga digelar oleh dinas perdagangan masing-masing Pemda bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Salah satu isu strategis secara nasional pada triwulan I 2022 adalah kenaikan harga minyak goreng. TPID di masing-masing daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga harga minyak goreng seperti melalui kegiatan operasi pasar. Kegiatan operasi pasar minyak goreng murah antara lain oleh TPID Kalimantan Selatan, TPID Sumatera Barat, TPID Riau, dan TPID Jawa Barat dilakukan di beberapa kota besar provinsi tersebut dengan menggandeng perusahaan minyak goreng nasional seperti PT. Sime Darby Oil dan PT. Wilmar. Lain halnya dengan TPID Sulawesi Selatan dan TPID Lampung, kegiatan operasi pasar minyak goreng murah turut dilaksanakan secara *online* melalui *marketplace*. Selain itu, TPID juga berkoordinasi dengan kepolisian dalam melakukan inspeksi mendadak ke para distributor minyak goreng untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Permasalahan harga minyak goreng dapat ditekan melalui peluncuran minyak goreng curah dalam bentuk kemasan. Pengemasan minyak goreng curah dapat membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Selama ini keterjangkauan harga minyak goreng curah sering kali terkendala dengan persoalan teknis di lapangan seperti keterbatasan mobil tangki pengangkut hingga tangki penampung di kalangan pedagang. Hal tersebut dinilai yang sering kali membuat optimalisasi ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah sesuai HET sulit diterapkan. Minyak curah yang dikemas dapat didistribusikan dengan lebih cepat, praktis, dan bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit sehingga dapat membantu pengendalian harga minyak goreng.

2.3.2.2 Ketersediaan Pasokan

Harga pangan nasional diperkirakan terus meningkat karena kekurangan pasokan akibat cuaca ekstrem, perang dan guncangan ekonomi pasca pandemi Covid-19.⁸ Pada tahun 2022, invasi Rusia ke Ukraina dan pemblokiran ekspor pertanian yang signifikan dari wilayah Laut Hitam turut mengganggu rantai pasok makanan (*World Food Program, 2022*). Tidak hanya ketersediaan pasokan saja, tetapi kecukupan produksi kebutuhan pokok dalam negeri pun harus dipantau. Strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan dilaksanakan oleh Pemda melalui program penguatan produksi, cadangan pangan pemerintah, pengelolaan perdagangan komoditas pangan, dan penguatan kelembagaan. Berbagai program tersebut antara lain memperkuat produksi cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan ekspor-impor pangan melalui *integrated urban farming*, dan penguatan infrastruktur pertanian.

Setiap TPID memiliki program unggulan tersendiri dalam mendukung ketersediaan pasokan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan tinggi akan bawang merah mendorong TPID Sumatera Utara menjalankan program Pangan Kita Bersama sebagai program budidaya pengembangan kawasan bawang merah secara masif, sehingga dapat meningkatkan produksi dan menurunkan biaya transportasi distribusi. Tidak hanya itu, dalam menjaga ketersediaan stok bawang merah, TPID Nusa Tenggara Barat mendorong *pilot project* teknologi ozon untuk memperpanjang simpan bawang merah di NTB. Sementara itu, bagi provinsi yang tidak dapat memproduksi bawang merah seperti DKI Jakarta, TPID setempat yang diwakili Perumda Pasar Jaya melakukan kerja sama antardaerah dengan gapoktan dan petani dalam memenuhi permintaan komoditas bawang merah dari berbagai daerah di wilayah Jawa.

Ketersediaan pasokan juga dapat ditingkatkan melalui dukungan terhadap petani untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) oleh TPID Lampung, selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tentunya dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan. TPID lainnya yaitu TPID Sumatera Selatan

⁸ Sumber: *Food Security Information Network (2022)*

menerapkan program unggulan Sumsel Mandiri Pangan yaitu pemberian bibit pertanian untuk rumah tangga miskin, perlengkapan budidaya perikanan, dan sarana produksi pertanian.

Guna menjaga ketersediaan pasokan maka diperlukan *monitoring* ketersediaan dan harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional dan modern secara rutin. Informasi riil tersebut menjadi pertimbangan bagi seluruh anggota TPID untuk mengambil kebijakan. Koordinasi dengan satgas pangan dan kepolisian juga perlu dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan. TPID juga sebaiknya melakukan berbagai upaya peningkatan produksi pangan melalui program inovasi, seperti penggalakan sistem budidaya, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembangunan sarana infrastruktur. Peningkatan produksi lokal akan membangun kemandirian pangan dan membuat pasokan pangan cenderung stabil.

2.3.2.3 Kelancaran Distribusi

TPID terus berusaha untuk dapat mempersingkat rantai pasokan barang kebutuhan pokok, sehingga distribusi semakin lancar dan cepat. Salah satu contoh program kelancaran distribusi yaitu Pasar Tani Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya Pasar Tani, konsumen dapat langsung membeli barang ke produsen, sehingga rantai pasok barang dapat dipersingkat dan konsumen dapat membeli barang dengan harga lebih murah. Pasar Tani saat ini juga sudah menerima pembayaran menggunakan QRIS, sehingga memudahkan transaksi antara konsumen dan produsen. Program serupa Pasar Tani juga dilakukan di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Untuk mendorong kelancaran distribusi barang, Pemda sebaiknya juga melakukan Misi Dagang ke daerah-daerah lain, seperti yang dilakukan oleh Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Pembangunan pasar induk juga dapat berperan dalam mendorong kelancaran distribusi barang di daerah. Sebagai contoh, TPID di Sulawesi Utara berencana membangun pasar induk sebagai *logistic hub*. Pembangunan pasar induk ini diharapkan dapat membantu mengurangi fluktuasi harga komoditas strategis di Sulawesi Utara. Sementara itu, untuk mengatasi adanya keterlambatan pengiriman atau *delivery order* bahan pokok, Pemda bisa mengantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak bandara/pelabuhan. Hal ini sudah dilakukan oleh Pemda NTB

dengan menambah rute pelayaran dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat ke Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi.

Peningkatan infrastruktur perdagangan dapat menjadi upaya untuk mendorong kelancaran distribusi. Upaya peningkatan infrastruktur perdagangan dapat dilakukan melalui Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di titik-titik wilayah produsen maupun konsumen. Selain itu, pengembangan sistem logistik daerah (SILOGDA) dapat melalui optimalisasi Pusat Distribusi Pangan (PDP) untuk menjaga kelancaran distribusi pangan strategis. Inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang bertujuan untuk peningkatan transaksi KAD dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota baik intraprovinci maupun antar provinsi. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan juga dapat dilakukan, seperti pemanfaatan tol laut. Dengan peningkatan koordinasi dan konektivitas antardaerah diharapkan dapat membantu kelancaran distribusi dalam menjaga inflasi.

2.3.2.4 Komunikasi Efektif

Bank Indonesia terus melakukan kolaborasi dengan Pemda untuk mendorong komunikasi yang efektif. Beberapa program strategis dalam rangka mendorong komunikasi yang efektif yaitu perbaikan kualitas data, peningkatan koordinasi pusat dan daerah serta pengendalian ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Untuk itu dilakukan berbagai upaya, misalnya TPID Jawa Barat memperbarui kualitas data melalui penguatan harga dan neraca pangan di 27 kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (SILINDA) JABAR dan penyusunan neraca pangan. Program serupa juga dilakukan di wilayah Bali melalui Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) dengan melakukan kerja sama dengan seluruh Kepala Daerah di Bali.

Hal lain yang diperlukan untuk mendorong komunikasi efektif adalah penguatan koordinasi antara TPIP dan TPID. Koordinasi tersebut dilakukan melalui pelaporan kegiatan seperti laporan triwulanan dan pembinaan TPID kabupaten/kota, serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi atau HLM yang dilakukan di semua daerah. Selain HLM yang dipimpin Kepala Daerah, dilakukan juga penyusunan peta jalan TPID kabupaten/kota dan

kunjungan ke lapangan untuk memonitor perkembangan harga. Kegiatan pendukung lainnya berupa *capacity building*, yang tujuannya meningkatkan kapasitas SDM anggota TPID.

Di tengah maraknya digitalisasi, pemanfaatan media elektronik melalui siaran pers, *talk show*, kanal media sosial dengan tema yang mudah dipahami menjadi corong komunikasi yang efektif dalam membentuk persepsi positif masyarakat. Sebagai contoh, di DKI Jakarta yang menyusun *podcast* tentang inflasi melalui media sosial. Hal ini diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan sekaligus membentuk ekspektasi masyarakat. Kegiatan lainnya seperti pembuatan iklan layanan masyarakat untuk penggunaan daging beku. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa daging beku juga layak dikonsumsi. Pada akhirnya, permintaan terhadap daging segar dapat dikendalikan terutama pada momen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya yang telah dilakukan oleh TPID untuk lebih membaaur dengan masyarakat dalam media sosial dapat terus ditingkatkan guna meningkatkan kepercayaan serta kedekatan masyarakat terhadap informasi inflasi terkini.

2.3.3 Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Untuk mengatasi tingginya tekanan harga akibat inflasi VF, penguatan sinergi pengendalian inflasi terutama dari sisi suplai diwujudkan dalam GNPIP. Gerakan ini merupakan bentuk kerja sama antara Bank Indonesia bersama dengan TPID untuk mengendalikan inflasi pangan berlandaskan kerangka program 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sasaran akhir dari GNPIP adalah tercapainya inflasi VF yang rendah dan stabil serta ketahanan pangan nasional. Sasaran akhir tersebut tercermin dari peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan, serta kestabilan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.

Strategi 4K terus dilakukan dalam pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi 2022, yakni inflasi IHK $3,0\pm 1\%$ dan inflasi VF $4,0\pm 1\%$. Keterjangkauan Harga dikendalikan dengan menjaga stabilitas harga dan mengelola

permintaan, tercermin dari volatilitas nilai tukar yang terjaga baik dengan rerata 4,74% (ytd) selama paruh 2022. Dari sisi Ketersediaan Pasokan, pasokan pangan cukup terjaga, kecuali minyak goreng yang sempat terkendala. Sementara itu, ketahanan pasokan hortikultura juga masih terkendala faktor produksi dan distribusi. Hal ini kemudian dapat diatasi dengan memperkuat produksi dan memperkuat kelembagaan. Untuk memperkuat Kelancaran Distribusi, saat ini terdapat 33 program digitalisasi sisi hilir yang terhubung dengan lebih dari 20 *platform e-commerce* lokal maupun nasional, namun program tersebut dihadapkan dengan tantangan disparitas yang masih tinggi. Guna mengatasi hal ini, dorongan KAD dan peningkatan infrastruktur perdagangan memegang peranan sangat penting dalam penguatan Kelancaran Distribusi. Untuk menjaga ekspektasi inflasi maka penguatan Komunikasi Efektif terus diintensifkan, salah satunya melalui penyediaan data pasokan pangan yang tersedia pada *platform digital*, seperti Simonstok. Penguatan Komunikasi Efektif juga terus dilakukan melalui penguatan kualitas data dan penguatan koordinasi pusat dan daerah.

Ke depan, sinergi GNPIP akan terus dilakukan untuk mengurangi laju inflasi bahan pangan serta ketahanan pangan nasional. *Lead coordinator* GNPIP pada Agustus 2022 adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dan akan dilanjutkan dengan Kantor Perwakilan Koordinator lainnya selama tahun 2022, dengan fokus pelaksanaan program unggulan di setiap periode disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik inflasi masing-masing wilayah *lead coordinator*. Jawa Timur merupakan daerah produsen utama di Jawa yang menjadi *hub* wilayah Balinusra dan memiliki KAD dengan jumlah paling banyak. Operasi pasar di 88 titik di 33 kota Pulau Jawa akan dilaksanakan secara serentak pada semester II 2022. Sementara itu, kesepakatan kerja sama perdagangan antardaerah juga akan terus diperluas. Untuk mencukupi kelangkaan pangan, gerakan *urban farming* juga akan dilakukan dengan pemberian 77.000 bibit cabai. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mengantisipasi gejolak ketahanan pangan. Dalam rangka mendukung hal ini diberikan sarana prasarana teknologi *digital farming* dan *greenhouse* di Jawa Timur. Pengendalian inflasi karena bahan pangan memiliki bobot besar dalam pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian harga bahan pangan menjadi penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.



Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

MEMANTAPKAN REFORMASI STRUKTURAL UNTUK MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

3.1 Intensifikasi Kebijakan Sektor Penopang Pemulihan Ekonomi

Sebagaimana dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Hal ini terjadi seiring dengan tekanan yang berat dari aspek geopolitik dan faktor risiko eksternal, di antara dampak dari rembetan risiko yang teridentifikasi tersebut dapat menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan berkelanjutan, yakni stagflasi dan berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Sementara itu, di domestik, perbaikan perekonomian pada triwulan II 2022 terus berlanjut, ditopang peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor dari beberapa sektor usaha potensial. Peningkatan konsumsi tercermin dari sejumlah indikator seperti keyakinan konsumen dan penjualan eceran. Sementara itu, kinerja investasi yang cukup baik didukung dengan berlanjutnya proyek hilirisasi di Sulampua, relokasi industri di Jawa, serta proyek pendukung penyelenggaraan acara internasional yang dibuka kembali di wilayah Balinusra. Selanjutnya, di tengah berbagai tekanan eksternal, ekspor nonmigas hingga triwulan II 2022 terindikasi tetap kuat, terutama berbasis sumber daya alam (SDA). Hal ini didukung tetap tingginya harga komoditas maupun peningkatan nilai tambah komoditas SDA.

Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan mendukung kinerja lapangan usaha (LU). Antara lain, LU industri Pengolahan di Jawa dan Sumatera, serta LU Pertambangan di Sulampua. Ke depan, prospek permintaan domestik diperkirakan tetap kuat seiring dengan relatif terkendalinya kasus Covid-19 di seluruh wilayah dan peningkatan mobilitas. Kondisi tersebut diperkirakan mendukung kinerja LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin). Selain itu, kinerja ekspor tetap positif namun lebih terbatas sebagai pengaruh permintaan eksternal yang berpotensi lebih rendah seiring dengan moderasi perekonomian global.

Di tengah prospek yang positif tersebut, ISEI masih mencermati adanya fenomena persistensi dampak Covid-19 yang berlanjut pada tahun 2022

terhadap kinerja usaha, terutama mereka yang bergerak di LU Tersier, khususnya LU Akmamin di Balinusra. Tekanan tersebut juga mengakibatkan perbaikan serapan tenaga kerja LU Tersier di berbagai wilayah relatif tertahan. Pada LU Sekunder, dampak Covid-19 masih dirasakan oleh pelaku usaha di Jawa dan Balinusra. Sementara itu, hanya sekitar 37% pelaku usaha di sektor LU Premier yang mengalami dampak persisten dari Covid-19. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha mewaspadaikan risiko kenaikan biaya *input* sebagai salah satu dampak perang di Ukraina, terdapat risiko dari kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku seiring dengan berlanjutnya gangguan rantai suplai. Kenaikan harga energi juga memberikan risiko pada kinerja LU Industri, meski hal tersebut diperkirakan akan memberikan dorongan bagi percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, dukungan kebijakan yang bersinergi antarkementerian dan lembaga mutlak diperlukan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meningkatkan resiliensi setiap LU. Kontribusi fiskal dalam pembiayaan ekonomi daerah perlu terus didorong termasuk melalui belanja pengadaan produk dalam negeri (PDN). Upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi terus diperkuat yang turut menjadi kunci berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dari sisi SSK, secara umum stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan pada Agustus 2022 relatif terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan yang masih tumbuh sejalan dengan kinerja perekonomian domestik.⁹ Kredit perbankan pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 10,66% (yoy) per Juni 2022, ditopang pertumbuhan kredit korporasi sebesar 12,87% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,13% (yoy) di tengah giro yang tumbuh 19,57% (yoy) diikuti tabungan 12,31% (yoy). Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan 5,63% (yoy) per Juni 2022 didukung pembiayaan terutama investasi dan modal kerja yang tumbuh masing-masing sebesar 19,6% (yoy) dan 18,8% (yoy). Risiko kredit terjaga, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. NPL gross perbankan per Juni 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,86%, sementara rasio NPF perusahaan pembiayaan di level 2,81%. Likuiditas perbankan

⁹ Siaran Pers Bersama KSSK Agustus 2022.

memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level 133,35% dan AL/DPK di level 29,99% pada Juni 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan memadai dengan CAR perbankan mencapai 24,69%, sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan *Risk-Based Capital* (RBC) masing-masing di level 481,01% dan 318,24%.

Melihat dinamika terkini, maka arah penguatan strategi perekonomian secara sektoral perlu senantiasa diarahkan untuk mendukung berlanjutnya perbaikan kinerja ekonomi yang lebih merata. Terdapat 3 (tiga) elemen penting yang menjadi sasaran kebijakan, yakni: (i) penguatan ketahanan pelaku usaha dari persistensi tekanan pasca pandemi Covid-19, (ii) optimalisasi pemanfaatan belanja daerah, dan (iii) memastikan terjaganya ketahanan pangan, dengan penjabarannya sebagai berikut:

- (i) **Ketahanan pelaku usaha dalam menopang pemulihan ekonomi nasional diprakirakan terjaga didukung prospek positif permintaan domestik.** Pelaku usaha dalam hal ini perlu terus melakukan upaya untuk mendukung prospek tersebut dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan penggunaan teknologi atau digitalisasi, serta meningkatkan belanja modal, terutama dari segi *blended financing* yang dianggap dapat menyerap risiko korporasi yang tengah pulih dari *scarring effect*.
- (ii) **Akselerasi belanja APDB untuk mendukung perbaikan ekonomi kedaerahan perlu terus didorong.** Dalam hal ini, termasuk optimalisasi kebijakan Program Aksi Afirmasi Pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) terutama produk UMKM.
- (iii) **Strategi penguatan perekonomian daerah ke depan juga tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi dalam jangka pendek maupun panjang.** Hal ini guna mengantisipasi tantangan inflasi baik yang berasal dari global seiring meluasnya kebijakan proteksionisme maupun faktor disparitas produksi dan stok pangan antar waktu maupun antar wilayah. Penguatan aspek ketahanan pangan merupakan hal yang struktural dan krusial untuk menjadi komitmen bersama.

3.2 Penguatan Kebijakan Energi dan Ketahanan Pangan

3.2.1 Penguatan Kebijakan Energi

Ketahanan energi menjadi salah satu isu utama yang saat ini tengah menjadi pembahasan pemerintah. Hal tersebut mengingat penyediaan pasokan energi memiliki peran penting sebagai bahan bakar dalam kegiatan produksi, sehingga mampu menggerakkan aktivitas perekonomian. Dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan, Indonesia telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan *energy transition mechanism* atau mekanisme transisi energi. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen dalam implementasi transisi energi melalui inisiasi transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama Presidensi G20 Indonesia.

Saat ini, pemerintah perlu terus melakukan upaya diversifikasi berkelanjutan untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas energi tertentu di tengah ketidakpastian global saat ini. Diversifikasi tersebut mencakup transisi hijau yaitu transisi energi dari batu bara ke energi bersih yang didukung dengan kebijakan dan pembiayaan yang memadai. Adapun pemenuhan pembiayaan tersebut dilakukan pemerintah melalui penerbitan obligasi hijau dan sukuk hijau, pembentukan platform *blended finance*, rencana penerapan *carbon pricing*, dan penciptaan taksonomi hijau. Di samping itu, komitmen yang kuat untuk mencapai dekarbonisasi dan transisi energi yang adil dan terjangkau juga ditunjukkan dengan peran Indonesia yang akan menjadi pusat manufaktur regional kendaraan listrik di Asia Tenggara.

3.2.2 Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan

Penguatan kebijakan ketahanan pangan Indonesia perlu menjadi prioritas dalam mendukung stabilitas harga dan berlanjutnya pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat akan mendukung terjaganya stabilitas harga dan ekspektasi inflasi yang turut berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini sangat krusial dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal terhadap harga *input* pertanian terutama pupuk dan pakan ternak, serta kebijakan proteksionisme pangan di global. Sejumlah tantangan mewarnai

kondisi ketahanan pangan nasional baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan (akses), dan pemanfaatan. Dari sisi ketersediaan, selain faktor produksi, terdapat isu yang lebih struktural terkait produktivitas. Hal ini disebabkan oleh terutama semakin meningkatnya lahan pertanian jenuh akibat dari intensitas pemupukan dalam waktu yang panjang. Regenerasi SDM pertanian yang belum optimal guna meningkatkan optimalisasi teknologi juga menjadi salah satu faktor penurunan produktivitas. Sementara konversi lahan pertanian secara konsisten dari waktu ke waktu untuk pembangunan kawasan perumahan, industri, dan perkebunan menjadi isu struktural khususnya di Jawa.

Dalam merespons berbagai tantangan ketahanan pangan di atas, telah dirumuskan kerangka besar kebijakan ketahanan pangan Indonesia. Pada aspek ketersediaan, upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan menjadi prioritas di tengah tekanan eksternal terhadap harga *input* pertanian terutama pupuk dan pakan ternak. Adapun hal penting yang menjadi fokus adalah penguatan data pertanian baik data produksi maupun stok. Neraca pangan yang akurat tidak hanya mengindikasikan pemetaan surplus–defisit, namun juga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih strategis seperti Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan ekspor-impor. Hal ini diharapkan dapat mengatasi disparitas produksi dan stok antarwaktu dan antarwilayah. Dukungan dan sinergi berbagai *stakeholders* sangat dibutuhkan dalam kerangka implementasi KAD. Terkait dengan aspek keterjangkauan, efisiensi dalam logistik pangan menjadi kunci, sehingga sangat diperlukan sistem logistik pangan secara modern dan terpadu. Karakteristik sejumlah bahan pangan yang mudah rusak membutuhkan manajemen logistik dan distribusi yang efisien. Selain itu, kelancaran akses terhadap bahan pangan maupun informasi yang transparan dan kredibel perlu dipastikan. Dalam perspektif yang lebih pendek, gejolak harga pangan perlu mendapat perhatian khusus. Program stabilisasi pasokan dan harga secara terukur dibutuhkan guna memastikan terjaganya ekuilibrium *supply-demand*.

Sejumlah upaya jangka pendek dan menengah-panjang perlu terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dalam jangka pendek, perlunya penguatan *monitoring* dan koordinasi pada KAD antarwilayah yang mengalami surplus

dan defisit. Sementara dalam jangka menengah-panjang, pengembangan *food estate* menjadi salah satu program unggulan ketahanan pangan. Hal ini diharapkan dapat secara efektif mengurangi disparitas yang kerap menjadi penyebab inflasi *volatile foods* (VF) khususnya di wilayah timur Indonesia. *Food estate* diarahkan untuk memperkuat aspek kelembagaan (korporatisasi) pertanian dengan dukungan teknologi pertanian modern termasuk mekanisasi serta sumber daya yang memadai baik SDM maupun kapital. Program *Food estate* tersebut sebaiknya juga memperhatikan kondisi iklim setempat dan kearifan lokal warga sekitar untuk meminimalkan potensi konflik sosial.

3.3 Penguatan Kebijakan pada Sektor Ketenagakerjaan, Kependudukan, dan Kesehatan

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang signifikan bagi ketahanan iklim tenaga kerja, tidak hanya di Indonesia, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan di beberapa negara kawasan. Kontribusi peningkatan pengangguran terbesar berada di kawasan Asia dan Pasifik terutama yang berasal dari kelompok pekerja informal, dimana jutaan dari jumlah pekerjaan di sektor ini memiliki latar belakang keterampilan yang rendah, serta tingkat perolehan upah harian yang juga relatif rendah. Secara statistik yang dikelola oleh ILO, wilayah Asia dan Pasifik merupakan rumah bagi 1,3 miliar dari 2 miliar pekerja informal dunia. Sementara itu, sepanjang tahun 2020 tingkat pengangguran di kawasan meningkat menjadi 5,2%, atau naik cukup signifikan hingga 18% dibandingkan tahun 2019 dengan total jumlah pengangguran yang mencapai sekitar 101,1 juta jiwa. Dalam hal ini kebijakan isolasi wilayah dan penutupan sektor usaha tidak dapat dipungkiri menjadi faktor utama yang menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di beberapa negara.

Meski demikian, berbagai respons kebijakan dalam menahan perlambatan pada sektor ketenagakerjaan terus lanjut. Kebijakan tenaga kerja selama pandemi Covid-19 di beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik kemudian difokuskan pada dukungan terhadap sektor usaha/pemberi kerja, pekerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan tersebut juga termasuk dukungan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga maupun otoritas terkait guna mendukung usaha rumah tangga agar memiliki kemampuan untuk pulih secara mandiri. Dukungan lain yang diberikan yaitu

berupa asistensi di sisi hukum untuk perolehan hak-hak para pekerja ketika pemutusan hubungan kerja dilakukan, serta dukungan pelatihan (*retraining*) bagi para pekerja untuk mencari peluang baru yang lebih baik.

Penguatan sinergi dan kerja sama para pemangku kepentingan pada sektor ketenagakerjaan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan strategis dalam memitigasi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah juga tengah melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.

ISEI melihat setidaknya terdapat 5 (lima) elemen utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan prioritas dalam kebijakan penyelamatan sektor tenaga kerja, kependudukan, dan kesehatan nasional. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut:

(i) Prioritasi Kebijakan berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Perlunya kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 untuk menjangkau kelompok menengah bawah dan rendah. Hal ini mengingat sebagian besar tenaga kerja di lapangan usaha yang terdampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, kecuali di sektor konstruksi, berasal dari kelas menengah bawah dan rendah. Jika terjadi guncangan, kelompok menengah ini tentunya memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik daripada kelompok masyarakat yang lebih miskin (40% terbawah) karena kemungkinan mereka masih mempunyai tabungan atau aset sosial. Namun, lebih dari setengah kelompok menengah ini berada di awal kariernya, sehingga memiliki tabungan yang terbatas. Jika krisis berkepanjangan, terdapat kemungkinan tabungan mereka habis. Hal ini

tentunya akan meningkatkan kerentanan tenaga kerja dari kelompok menengah bawah untuk turun menjadi kelompok berpendapatan rendah. Di samping itu, kelompok menengah ini memiliki bentuk kerentanan tersendiri karena hingga saat ini mereka tidak termasuk dalam basis data program perlindungan sosial pemerintah dan kemungkinan besar tidak mendapat bantuan sosial juga. Pemerintah hanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemberian bantuan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk menjangkau kelompok menengah bawah ini dan secara berkala memperkuat basis data untuk kelompok berpendapatan rendah.

(ii) Prioritasi Kebijakan berdasarkan Status Formal/Informal Tenaga Kerja

Perlunya kebijakan/program penanggulangan krisis yang juga menargetkan pekerja di sektor informal. Sektor penyedia akomodasi, makanan dan minuman, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan didominasi oleh pekerja informal, sementara tiga sektor lainnya didominasi oleh pekerja formal. Status formal/informal berpengaruh terhadap cara tenaga kerja beradaptasi dengan situasi krisis dan pendekatan intervensi kebijakan penanggulangan pengangguran. Sebagai contoh, pekerja sektor informal lebih mudah mengubah jenis usaha tergantung pada kondisi perekonomian daripada pekerja formal. Namun demikian, pekerja informal memiliki akses yang terbatas terhadap program perlindungan sosial dan program pemerintah lainnya. Sebagai contoh, program PEN yang dirancang untuk menanggulangi dampak krisis Covid-19 baru menyoar sektor formal.

(iii) Prioritasi Kebijakan berdasar Gender

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pemulihan ekonomi yang menyoar perempuan. Sektor transportasi dan pergudangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan didominasi laki-laki, sementara sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman didominasi perempuan. Secara statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Krisis akibat pandemi Covid-19 berpotensi makin menekan tingkat

partisipasi kerja perempuan. Hal ini dapat terjadi karena proporsi perempuan yang bekerja di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman lebih besar daripada laki-laki, sehingga peluang perempuan di-PHK atau dirumahkan pun cukup besar.

(iv) Prioritasi Kebijakan Ekonomi berdasarkan Pendidikan

Perlunya penguatan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, dengan prioritas utama tenaga kerja berlatar belakang pendidikan rendah. Berdasar data terakhir yang dirangkum dalam Susenas tahun 2019. Keenam sektor LU nasional masih didominasi oleh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan SMA, kecuali sektor konstruksi yang didominasi lulusan SD. Makin rendah tingkat pendidikan pekerja, makin terbatas pilihan pekerjaannya pada kelompok pekerjaan dengan keterampilan rendah. Hal ini meningkatkan kerentanan mereka di pasar tenaga kerja. Pada umumnya, pekerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki peluang kehilangan pekerjaan yang lebih besar daripada mereka yang berpendidikan lebih tinggi, khususnya di sektor konstruksi. Selain itu, latar belakang pendidikan tenaga kerja yang berpotensi terdampak krisis memberikan informasi penting terkait pendekatan intervensi kebijakan penanggulangan pengangguran yang harus diambil. Sebagai contoh, krisis akibat pandemi Covid-19 berpotensi mengubah struktur lapangan kerja dan dunia bisnis karena pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi memainkan peranan penting ke depan. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas pencari kerja terkait teknologi, misalnya melalui pelatihan, menjadi sangat penting dan hal ini harus disesuaikan dengan latar belakang dan tingkat pendidikan peserta pelatihan.

(v) Prioritas Kebijakan Ekonomi Kesehatan terutama pemerataan kesehatan bagi kelompok berpendapatan menengah bawah dan rendah

Pengalaman akibat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Akibat terhambatnya mobilitas penduduk dalam perekonomian, Pemerintah telah

melakukan kebijakan vaksinasi untuk mengatasi Covid-19 secara menyeluruh, sehingga perekonomian dapat bergerak kembali. Namun, upaya ini masih terhambat pemerataannya terutama bagi kelompok berpendapatan menengah bawah serta penduduk di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan program kesehatan pada kelompok berpendapatan menengah bawah dan rendah, serta penduduk di daerah terpencil.

3.4 Pemberdayaan Infrastruktur

Dalam kondisi normal atau sebelum terjadinya pandemi, Pemerintah telah menetapkan 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga, maupun integrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini diharapkan memiliki daya ungkit (*multipliers*) yang tinggi. Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan.¹⁰ Juga, komitmen untuk lanjutan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api kecepatan tinggi, serta jaringan pelabuhan utama terpadu.

Sejak 2016, Pemerintah telah menempatkan infrastruktur sebagai salah satu strategi utama untuk menghindari *middle-income trap* dengan mendorong pembangunan Proyek/ Program Strategis Nasional (PSN). Saat ini PSN mencakup 14 sektor (Jalan, Bendungan dan Irigasi, Kawasan Industri, Kereta Api, Perkebunan, Energi, Pelabuhan, Bandara, Air Bersih dan Sanitasi, Pariwisata, Pendidikan, Tanggul Laut, Teknologi, dan Perumahan) serta 12 Program (Kawasan Ekonomi Khusus, Program Industri Gula dan Sawit, Smelter, Pengembangan Superhub, Ketenagalistrikan, Pemerataan Ekonomi, Akses Exit Tol, Penyediaan Pangan/Food Estate, Kawasan Strategis Pariwisata, Pengolahan Sampah, Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Percepatan Pengembangan Wilayah). Proyek dan Program tersebut diharapkan dapat selesai pada tahun 2024.¹¹

¹⁰ Proyek dimaksud adalah Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali.

¹¹ Data yang diperoleh dari Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa hingga Semester 1 2022 sejumlah 135 proyek telah diselesaikan dengan nilai total Rp858 triliun. Namun demikian, sampai publikasi buku ini dilakukan

Pembangunan PSN ini memiliki tujuan yang beragam sesuai dengan sektornya. Namun secara garis besar dapat disepakati bahwa pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada penurunan *logistic cost*, meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing regional maupun nasional, meningkatkan *energi security*, meningkatkan konektivitas baik fisik maupun digital, meningkatkan nilai tambah/ hilirisasi pengelolaan sumber daya alam, dan juga meningkatkan nilai ekspor dan penggunaan TKDN.

Dampak yang telah dihasilkan dari pembangunan PSN adalah penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan kajian penciptaan kerja tersebut sekitar 1,9 juta lapangan pekerjaan dan diperkirakan akan tetap meningkat hingga beberapa tahun kedepan baik lapangan kerja yang tercipta di saat konstruksi maupun pada saat operasionalnya

Dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena keterbatasan APBN akan berlanjut kedepannya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang baru (*creative financing*). Beberapa yang sudah dikenal saat ini adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU atau PPP). Pembiayaan yang berbasis pengelolaan asset terbatas (Hak Pengelolaan Aset Terbatas/LCS-brownfield project) atau Land Value Capture juga perlu didorong selain SWF atau blended financing yang juga sudah mulai digunakan dalam memperkuat pembiayaan infrastruktur. Bank Tanah yg sudah dibentuk pemerintah seyogyanya juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi regional/nasional. Adapun untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur, kajian terkait penyusunan Satu Peta atau Satu Data amat diperlukan sehingga akan meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, strategi kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan (*refocussing*) pada jenis infrastruktur yang berorientasi pada PEN. Anggaran beberapa kementerian dilakukan pemangkasan karena fokus pemerintah pada program PEN.¹² Saat pandemi, proyek padat karya sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak. Namun demikian, para pelaksana

masih terdapat 200 proyek pada 14 sektor dan 12 program yang terus diupayakan agar dapat diselesaikan sesuai target.

¹² Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-covid-19-anggaran-kementerian-pupr-dipangkas-rp-4458-triliun>

pembangunan tetap harus mengimplementasikan protokol kesehatan (standar), sehingga proyek pembangunan infrastruktur dimaksud tidak menjadi sumber/klaster baru penyebaran Covid-19.

Adapun infrastruktur kritikal yang perlu disiapkan/dilanjutkan di era pandemi saat ini hingga pascapandemi (periode *recovery*) adalah sebagai berikut:

- (i) **Pengadaan/pengembangan vaksin sebagai *game changer*.** Ini dilakukan baik secara mandiri maupun kerja sama. Kebijakan ini menjadi syarat utama penanganan kesehatan dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Proses pembuatan vaksin seyogyanya dilakukan dengan cepat, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keampuhannya. Selain didistribusikan pada kelompok yang ditargetkan (misalnya, tenaga kesehatan), vaksin juga harus dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat luas yang memerlukan.
- (ii) **Pengembangan sarana-prasarana di bidang kesehatan.** Ini utamanya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, dan puskesmas. Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan bagi penanganan Covid-19 sangat diperlukan agar keterisian tempat tidur rumah sakit tidak sampai pada ambang kritis. Penyediaan laboratorium untuk deteksi *polymerase chain reaction* (PCR) dan pengembangan vaksin Covid-19 diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tes masal dan persiapan penyediaan vaksin Covid-19. Sebagai dukungan terhadap infrastruktur non-fisik kesehatan yaitu sumber daya manusia kesehatan, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah serta belanja alat kesehatan (misalnya, APD, *test kit*, dan reagen) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM kesehatan dan melindungi SDM kesehatan dari risiko saat menangani pasien Covid-19.
- (iii) **Infrastruktur ketahanan pangan.** Di era pandemi ini dan ke depan, proyek-proyek strategis untuk penyediaan suplai pangan domestik sangat perlu diprioritaskan mengingat jumlah populasi yang besar, sementara impor dari negara lain sulit dilakukan dalam kondisi krisis seperti saat ini. Proyek dimaksud terutama dalam bentuk pembangunan/perbaikan sarana irigasi, bendungan

dan termasuk program cetak sawah baru. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim dan perikanan yang sangat besar, infrastruktur pendukung untuk penyediaan pangan juga masih perlu terus dikembangkan dan termasuk melibatkan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.

- (iv) **Infrastruktur telekomunikasi.** Ini sangat diperlukan dalam kondisi pandemi dan era kenormalan baru. Dengan adanya pembatasan jarak (*social distancing*), cara bekerja karyawan/pegawai mengalami perubahan dari bekerja di kantor menjadi *work from home* dan hal yang sama juga terjadi di sektor pendidikan, siswa terpaksa bersekolah (belajar) jarak jauh (pembelajaran jarak jauh/PJJ), dengan berbasis pada platform digital. Mengingat kondisi geografis nusantara yang luas dan kepulauan, sementara penduduk cenderung teraglomerasi di daerah perkotaan khususnya di Pulau Jawa, maka pembangunan konektivitas infrastruktur digital perlu terus dikelola secara strategis hingga dapat melayani sampai ke daerah-daerah pelosok (terluar). Kondisi terbatasnya akses digital bagi pelajar di pedesaan (daerah tertinggal) sangat perlu mendapat dukungan prioritas oleh pemerintah untuk penyediaan internet gratis (bersubsidi), sehingga kegiatan belajar dapat terus berlangsung, meski dilakukan secara *online*.
- (v) **Infrastruktur fisik.** Sebagai contoh, pembangunan konstruksi untuk jalan tol yang harus terus dilanjutkan di era *new normal*, karena berfungsi sebagai akses untuk transportasi pangan, obat-obatan, dan barang vital lainnya.¹³ Selain itu, pembangunan jembatan dan berikut moda transportasi darat-laut-udara sangat urgen disiapkan untuk memperlancar distribusi vaksin Covid-19, namun dengan geografis negara kita kepulauan, tentu interkoneksi antar daerah dan antarpulau untuk distribusi dan logistik vaksin tersebut perlu dipastikan sudah tersedia dengan baik hingga mencapai ke pelosok nusantara.¹⁴

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/06193371/jokowi-kebut-infrastruktur-di-tengah-pandemi-terkendala-dana-hingga-lahan?page=all>

¹⁴<https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-race-turns-deep-freezers-into-a-hot-commodity-11599217201>

- (vi) **Infrastruktur di bidang energi.** Misalnya, listrik dan gas, bukan hanya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri kesehatan dan industri strategis lainnya.
- (vii) **Infrastruktur yang mendukung pola hidup bersih dan sehat.** Contohnya, instalasi penyediaan perumahan yang layak dan air bersih sangat diperlukan untuk mendukung upaya mengatasi (mencegah) potensi penyebaran virus di masyarakat yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini adalah infrastruktur di sektor keuangan khususnya sistem pembayaran digital untuk mendukung transaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, andal, dan higienis di seluruh Indonesia.

Terkait kebijakan *soft infrastructure* kesehatan nasional, ISEI memandang paling sedikit terdapat dua poin penting yang dapat menjadi prioritas. Perbaikan menyeluruh atau reformasi terhadap sistem kesehatan nasional dan sekaligus mengantisipasi kemungkinan risiko sistemik yang berulang di masa depan adalah sangat krusial untuk dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh *Chief WHO: "the world must be better prepared for the next pandemic"*.¹⁵

Pertama, sangat diperlukannya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/2014.¹⁶ Di era kenormalan baru, pelaksanaan JKN dimaksud merupakan upaya perlindungan sosial diperlukan sebagai respons terhadap dampak Covid-19 kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks ekonomi, hal ini juga berarti untuk menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen kunci bagi perekonomian nasional. Semakin banyaknya pengguna JKN

¹⁵<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/world-must-be-better-prepared-for-next-pandemic-says-who-boss-idUSKBN25Y11Y>

¹⁶ Untuk lebih detail lihat, <https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk282014.pdf>

akan meningkatkan pengumpulan pendapatan dan pengumpulan risiko yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan asuransi sosial.¹⁷

Kedua, di era digital saat ini, pengembangan/pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis digital sangat urgen untuk terus dikembangkan. Misalnya, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) pada alat-alat medis. Pertimbangan adanya risiko sistemik khususnya penularan penyakit antarmanusia (juga antara hewan dan manusia) serta berbagai ketidakpastian yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan manusia dapat terjadi dalam jangka waktu yang sangat cepat dan tak terduga. Aplikasi teknologi berbasis mesin/ algoritma ini diyakini akan sangat membantu dan lebih efisien untuk mendiagnosis dan mengatasi potensi permasalahan yang terkait dengan kesehatan manusia.¹⁸ AI juga akan bermanfaat menganalisis data besar dan mikro untuk membuat sistem peringatan dini terhadap risiko pandemi ke depan, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang *vulnerable* terhadap risiko guncangan, serta dapat membantu dalam percepatan penemuan riset terhadap vaksin Covid-19.

Terakhir, ISEI juga mendorong pentingnya memiliki Satu Peta atau Satu Data Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur. Selain memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program, Satu Peta atau Satu data juga akan memudahkan koordinasi antar-K/L terkait dalam pembangunan infrastruktur, sehingga lebih efektif dan efisien.

3.5 Penguatan Peran UMKM

3.5.1 Lima Strategi Utama Pengembangan Ekonomi Inklusif

Dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif di era kenormalan baru, terdapat 5 strategi utama. Pertama, penguatan strategi dengan mencari solusi

¹⁷ Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2020 adalah 203,9 triliun rupiah yang akan disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial tunai dan sembako, dll. JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan harus dapat menjaring lebih banyak pengguna dan bahkan mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan JKN. Saat ini biaya perawatan Covid-19 dapat ditanggung melalui BPJS kesehatan. Maka dari itu, penjangkaran pengguna JKN yang lebih besar akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama Covid-19 saat ini dan pelayanan kesehatan lainnya di masa depan.

¹⁸ Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia relatif berhasil dalam pengendalian penyebaran Covid-19 (antara lain melalui *contact tracing* dan *forecasting contagious effects*) dengan penggunaan aplikasi teknologi digital.

“dynamic optimization” dengan multiple constraints. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa saat ini perekonomian dunia dan nasional menghadapi tantangan yang sangat besar dan kompleks. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia bukan hanya mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, tetapi juga menghantam kinerja perekonomian global. Akibatnya, perekonomian dunia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman krisis dan menghadapi risiko peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi membuat otoritas di setiap negara di dunia menghadapi masalah yang begitu kompleks (*multiple constraints*). Dalam sudut pandang “dynamic optimization”, pengambilan keputusan tentu membutuhkan penanganan yang terencana, terukur dan terpadu. Oleh karena itu, penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi harus berjalan beriringan karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi saling berkaitan. Penyelesaian krisis kesehatan akan membutuhkan kekuatan ekonomi; dan sebaliknya krisis ekonomi mensyaratkan penyelesaian krisis kesehatan dengan baik.

Kedua, strategi dan timing respons kebijakan untuk mengatasi kombinasi supply-demand shocks secara paralel. Fenomena pandemi COVID-19 juga menunjukkan tekanan sisi *supply* dan *demand* secara bersamaan, yang saling memberikan *feedback-loop* satu sama lain. Oleh karena itu, strategi dan *timing* respons kebijakan menjadi penting. Dari berbagai pengalaman di berbagai negara dan pengamatan fenomena yang terjadi di lapangan, diyakini agar otoritas perlu merespons tekanan sisi *demand* dalam jangka pendek. Berbagai langkah yang dilakukan ditujukan untuk menumbuhkan permintaan masyarakat di tengah *supply disruption* dan *demand shock* yang terjadi. Sisi permintaan ditumbuhkan terlebih dulu dengan harapan akan diikuti oleh peningkatan sisi penawaran. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk men-*jumpstart* perekonomian melalui strategi penyerapan anggaran yang cepat dan tepat, seperti halnya program peningkatan pengeluaran untuk *public goods*, misalnya Bansos yang dilakukan pada masa-masa awal dan kemudian diikuti oleh program-program yang lebih terintegratif, yaitu PEN. Dalam perspektif waktu selanjutnya, diharapkan dampak stimulus moneter dan keuangan akan bekerja untuk mengakselerasi kegiatan sektor riil lebih lanjut, tentunya dengan dukungan peran aktif dunia usaha dan masyarakat.

Ketiga, penguatan sinergi dan terobosan (*breakthrough*). Langkah penyelamatan perekonomian perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengawal penerapan tatanan kehidupan baru (*new normal*) untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. Pemahaman konteks *new normal* akan mengarahkan persepsi kita mengenai kondisi yang tentunya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun demikian, dalam *new normal* kita perlu merumuskan berbagai opsi strategi kebijakan yang tepat, sehingga sekaligus dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Penerapan strategi dalam era *new normal* diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, dimana dengan mulai beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat menggeliat kembali dan pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui *new normal*, otoritas kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat – baik di pusat maupun daerah, perlu memperkuat sinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat. Di sisi lain, semua pihak juga diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pengendalian krisis dan pemulihan ekonomi nasional perlu mengedepankan kepemimpinan (yang kuat) serta menggunakan cara-cara pemulihan yang lebih inovatif guna menciptakan terobosan-terobosan (*breakthrough*). Pendekatan pemulihan yang bersifat sektoral yang lebih fokus pada daerahnya masing-masing perlu disempurnakan. Krisis yang multidimensi yang melanda semua daerah di Indonesia perlu penanganan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan optimal.

Keempat, membangun strategi untuk memperkuat ketahanan sistemik (*systemic resilience strategies*). Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, saat ini kita hidup dalam kondisi ketidakpastian dalam suatu sistem yang dinamis, saling terhubung dan saling memengaruhi satu sama lain di masa depan. Faktor *shock* meskipun awalnya berskala kecil, namun dapat menimbulkan dampak yang teramplifikasi bagi seluruh sistem di suatu negara atau dunia. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu wawasan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk membuat gambaran realistis tentang bagaimana suatu sistem terbentuk, dan juga berguna untuk membangun “sebuah sistem dari berbagai sistem” (*system of systems*) yang lebih besar secara integratif. Secara implementatif, kondisi ini juga menekankan kita akan pentingnya resiliensi suatu sistem terhadap berbagai

guncangan/tekanan, yang memungkinkan sistem untuk pulih khususnya dari fungsi yang hilang (*lost functionality*) dan beradaptasi dengan realitas baru terkait ekonomi internasional, kebutuhan masyarakat, dan perilaku manusia serta risiko iklim yang lebih tidak terduga (OECD, 2020).

Systemic resilience strategies menekankan pentingnya bukan hanya pencegahan, tetapi juga pemulihan dan adaptasi setelah terjadinya shocks. Aspek resiliensi ini perlu “mengakui” bahwa kemungkinan gangguan secara masif dapat terjadi kembali di masa depan sehingga menjadi penting bagi sistem ini untuk memiliki kapasitas untuk pemulihan dan adaptasi untuk memastikan keberlanjutan hidup di masa depan, termasuk juga memanfaatkan peluang-peluang baru terungkap pada saat krisis untuk melakukan perbaikan ancaman sistemik yang lebih luas/lebih besar. Contohnya, pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk mengatasi keadaan darurat lain seperti perubahan iklim dengan lebih efektif. Dengan kata lain, momentum ini dimanfaatkan untuk memantul ke depan (*“bouncing forward”*), bukan malah sebaliknya memantul ke belakang atau *“bouncing backward”* (Linkov dkk., 2018). Dengan demikian, *systemic resilience strategies* ini perlu dikembangkan, tidak hanya untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini saja, namun terpenting adalah kemungkinan adanya pandemi atau guncangan lain di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan *sharing* informasi (data) yang terkait antarnegara seperti *sharing* mengenai tipe pencegahan dan penanganan yang efektif dalam mengatasi pandemi, informasi mengenai vaksin dan obat pencegah lainnya, cara-cara pencegahan penyebaran penyakit, dan kesadaran dasar sanitasi.

Kelima, adalah penguatan strategi komunikasi. Komunikasi secara efektif oleh para pemimpin sangat penting untuk mengelola kredibilitas suatu kebijakan, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan transparansi. Di masa krisis komunikasi dari para pemimpin sering kali tidak efektif, atau bahkan salah. Sering para pemimpin bersikap terlalu percaya diri dan optimis pada tahap awal krisis dan juga cenderung menunda pengumuman untuk waktu yang lama, sementara mereka menunggu lebih banyak fakta muncul dan keputusan dibuat. Walaupun tidak terdapat pendekatan baku terkait strategi komunikasi yang sebaiknya dilaksanakan, komunikasi yang bijaksana dan sering diperlukan untuk menunjukkan bahwa para pemimpin mengikuti situasi dan

menyesuaikan respons. Hal ini dapat membantu meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka sedang menghadapi krisis. Para pemimpin harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa masalah, pertanyaan, dan minat masyarakat luas ditangani. Komunikasi tidak boleh berhenti setelah krisis berlalu. Menawarkan pandangan yang optimis dan realistis dapat memberikan pengaruh yang kuat pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, menginspirasi mereka untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

3.5.2 Penguatan Pengembangan UMKM

Berdasarkan 5 strategi utama penguatan inklusi keuangan sebagaimana di atas, ISEI memandang implementasi penguatan peran UMKM dapat dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut.

Pertama, strategi penguatan pengembangan UMKM dari sisi pembiayaan dan sisi pemanfaatan teknologi digital. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses pembiayaan UMKM misalnya dengan memberikan subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain dari sisi pembiayaan, UMKM juga perlu mengembangkan kreativitas dan inovasi terutama dalam penggunaan digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha yang lebih besar untuk bersaing dalam memasarkan produk mereka. Hal ini terjadi karena mereka akan berada dalam satu platform *e-commerce marketplace* yang sama, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan promosi-promosi dan juga penjualan produk. Melalui teknologi digital, para UMKM juga dapat melakukan *branding* dengan memanfaatkan sosial media secara gratis dan penjualan melalui *marketplace*. Setelah itu, para UMKM harus tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas produk tersebut supaya para pelanggan konsumen tidak kecewa dan sekaligus dapat meningkatkan penjualan.

Kedua, pengembangan digitalisasi UMKM yang tidak hanya fokus pada proses pemasaran atau penjualan, namun juga menjangkau proses keuangan digital atau pembayaran. Untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital, pemerintah Indonesia perlu memberikan kemudahan, di antaranya

melalui perizinan, insentif fiskal, akses pasar, dan akses bahan baku. Selain itu dalam lingkup *e-commerce*, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui aspek penciptaan iklim usaha yang sehat pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta infrastruktur digital.

3.6 Penguatan Kegiatan Pariwisata

3.6.1 Penguatan melalui Pariwisata Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)

Kasus COVID-19 yang mulai melandai telah memberikan optimisme bagi pemulihan aktivitas pariwisata. Sejumlah negara terutama di Indonesia telah melonggarkan kebijakannya terkait dengan restriksi perjalanan. Adanya pelonggaran tersebut berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Juni 2022 mencapai 345.44 ribu kunjungan atau naik tajam 1.973,96% (yoy) dibandingkan dengan kondisi Juni 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman pada Juni 2022 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 62,69%.¹⁹

Meskipun terdapat gelombang COVID-19 varian Omicron yang sempat membuat masyarakat dan pemerintah waspada, tetapi permintaan pariwisata secara global cenderung tetap berada dalam tren yang menguat. Misalnya saja pada penyelenggaraan *event* dan MICE secara nasional yang kembali meningkat sejak 2021. Penyelenggaraan *event* dan MICE yang kembali meningkat ini terutama didorong oleh berbagai pelaksanaan *event* berskala besar yang diinisiasi oleh pemerintah. Perkembangan positif ini diperkirakan terus berlanjut, seiring bertambahnya berbagai *event* dan MICE yang telah terjadwal sepanjang 2022, termasuk rangkaian acara G20 dan 110 *event* di berbagai daerah yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN). Sejalan dengan adanya pengendalian pandemi COVID-19 yang semakin baik, mayoritas *event* dan MICE yang diselenggarakan diperkirakan akan kembali mengarah kepada kegiatan fisik (luring).

¹⁹ Badan Resmi Statistik, No. 56/08/Th. XXV, 1 Agustus 2022

Terdapat beberapa strategi untuk melanjutkan upaya pengoptimalan peluang tersebut. Adapun strategi tersebut antara lain memastikan pelaksanaan MICE pemerintah dan internasional yang telah terjadwal, dan memberikan fasilitas *bidding* MICE internasional. Selain itu, perlunya untuk memberikan fasilitas proses perizinan secara terintegrasi di daerah, termasuk dalam hal pengawasan penerapan disiplin protokol kesehatan.

3.6.2 Pengaruh *Scarring Effect* di Sektor Pariwisata

Aktivitas perekonomian yang mulai pulih pasca pandemi masih menyisakan bekas luka (*scarring effect*) jangka menengah panjang yang perlu diantisipasi. Pandemi COVID-19 berimbas pada produktivitas dengan adanya tantangan pada pasar tenaga kerja dan pendidikan, serta pada investasi maupun sektor swasta, terutama pada sektor transportasi dan pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata perlu menjadi prioritas penanganan mengingat sektor tersebut merupakan pilar ekonomi global yang melibatkan pemuda, wanita, dan sektor informal. Lebih lanjut guncangan tersebut dapat berdampak pada masalah fiskal dan risiko kredit.

Menjawab tantangan tersebut, sekaligus untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terdapat prioritas penanganan *scarring effects*. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain relokasi tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan mendukung keahlian baru, relokasi modal dan dukungan investasi, serta peningkatan inklusi dan literasi digital melalui pemanfaatan teknologi, serta penanganan dan pencegahan pandemi yang menjadi hal krusial. Korporasi dapat menyusun ulang strategi bisnis, struktur keuangan, manajemen dan ketahanan melalui digitalisasi untuk terus melangkah. Perbankan juga perlu menilik kembali penyaluran kredit ke sektor prioritas dan kredit modal kerja bagi ekspansi bisnis. Pemerintah saat ini juga turut berupaya untuk memulihkan kembali sektor pariwisata yang masih lesu akibat pandemi COVID-19. Pemerintah akan mendorong kemudahan berwisata menuju hidup berdampingan dengan endemi, di antaranya melalui penghapusan syarat tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN).

3.7 Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir industri halal di dunia terus mengalami perkembangan yang menjanjikan. Meskipun dunia sempat dilanda pandemi dan sebagian besar masyarakat mengurangi aktivitasnya di publik, namun permintaan terhadap produk-produk halal masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada laporan yang dirilis oleh Dinar Standard, disebutkan bahwa sektor *halal food* Indonesia pada tahun 2022 ini bahkan mengalami kenaikan peringkat secara global, yakni dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-2. Hal ini tentu saja berita menggembirakan, terutama ditengah arah kebijakan pemerintah dalam payung KNEKS yang tengah fokus menggarap sektor *halal food* secara serius melalui berbagai program prioritas, seperti peningkatan sertifikasi halal, penyusunan kodifikasi data produk halal, dan penguatan neraca perdagangan produk bersertifikat halal nasional.

Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, ISEI melihat bahwa kita tidak dapat hanya bertumpu pada satu bentuk kebijakan, namun juga dukungan dan peran aktif daerah terutama dalam hal memastikan terjaganya ketahanan pangan di masyarakat. Secara statistik, pada triwulan I 2022, sektor aktivitas usaha syariah mencatat pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,45%. Hal ini merupakan modal yang baik untuk terus meningkatkan daya ungkit industri halal di daerah dalam turut mendorong stabilitas dan laju pemulihan, seraya upaya untuk melakukan transformasi ekonomi tetap ditempuh melalui strategi korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan bagi usaha mikro syariah.

Pengembangan UMKM syariah di nusantara memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat lagi. Hal ini mengingat mayoritas populasi konsumen adalah muslim di tanah air, termasuk potensi pasar produk syariah di luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah. Selain aspek SDM dan digitalisasi UMKM seperti pada UMKM konvensional, isu spesifik bagi UMKM syariah yaitu aspek pembiayaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan syariah termasuk sumber pendanaan yang berbasis platform digital, yaitu dikenal dengan *fintech*. Di era digital saat ini, platform keuangan syariah berbasis digital berpotensi besar untuk berjalan bersamaan dengan UMKM baik konvensional maupun syariah.

Pendanaan *fintech* syariah tidak hanya berbasis ekuitas atau modal komersial, dana sosial seperti zakat dan wakaf juga berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan usaha kecil yang terdampak COVID-19.

Dengan mendorong lebih banyak UMKM syariah untuk mencari pendanaan melalui fintech syariah, usaha-usaha yang tadinya tidak dianggap layak untuk mendapat pendanaan oleh bank konvensional akan lebih banyak terjangkau oleh fintech syariah. Hal ini salah satunya karena persyaratan dari fintech syariah lebih fleksibel. Pendanaan *fintech* syariah juga memberikan keamanan bagi pengguna muslim karena penggunaan prinsip syariah dalam perjanjiannya. Skema berbagi risiko (*risk-sharing*) memberikan keamanan finansial lebih terhadap pelaku UMKM karena segala keuntungan dan kerugian yang dialami oleh UMKM tersebut dibagi kepada para mitra pendana sesuai kesepakatan. Konsep pembagian risiko tersebut menjadi adil bagi kedua belah pihak. Saat ini sudah terdapat payung penyelenggara *fintech* syariah yang ditunjuk oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), sehingga setiap *fintech* syariah dapat memiliki wadah untuk melakukan pengembangan. Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM-UMKM syariah untuk mencari pendanaan berbasis syariah yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan *recovery* akibat dampak COVID-19 dan juga untuk mengembangkan usahanya dalam menjawab tantangan era digital di masa depan.

Menatap ke depan, penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri memerlukan strategi pengembangan yang semakin inovatif dan kreatif untuk dapat meningkatkan daya saing global. Implementasi ke-3 pilar *blueprint* ekonomi dan keuangan syariah nasional (pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen dan edukasi) dalam hal ini mesti diselaraskan dengan isu-isu utama yang tengah dihadapi, di antaranya adalah ketahanan pangan dan pemanfaatan digitalisasi pada perekonomian:

- (i) **Pada Pilar Pertama, Pilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah akan menitikberatkan pada penguatan pengembangan sektoral usaha syariah.** Program ini dilaksanakan pada 5 (lima) sektor unggulan yaitu sektor industri makanan halal, halal fesyen, sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor *renewable energy*. Dalam pilar pertama ini, dilakukan penguatan model bisnis

Halal Value Chain yang menghubungkan *local value chain*, ke tingkat *global halal value chain* ke pasar global yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor, namun juga sebagai produk substitusi dari impor sekaligus mendukung ketahanan pangan pada komoditas tertentu.

- (ii) **Pilar Kedua, Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, ditujukan untuk mengoptimalkan *Islamic social finance* dalam mendukung pembangunan ekonomi.** Pilar ini merefleksikan upaya peningkatan pembiayaan syariah untuk mendukung pengembangan usaha syariah. Cakupan pilar ini tidak terbatas pada keuangan komersial, namun juga pada sektor ZISWAF dan upaya integrasi keduanya.
- (iii) **Kemudian Pilar Ketiga, Pilar Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi, menjadi landasan tersedianya sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing.** Dalam pilar ini termasuk kegiatan sosialisasi dan komunikasi untuk meningkatkan literasi syariah. Berbagai bentuk program edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat baik melalui jalur formal maupun nonformal. Berbagai upaya tersebut diharapkan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat atas ekonomi syariah. Berdasarkan survei literasi ekonomi syariah Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2021, terdapat peningkatan indeks literasi ekonomi syariah nasional dari sebelumnya 16,28% (2019) menjadi 20,01% (2021).

3.8 Pemberdayaan Sumber Daya Kemaritiman

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Pengelolaan atas potensi-potensi tersebut perlu terus ditingkatkan supaya memberikan dampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3.8.1 Potensi Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman

Sebagai negara kepulauan, transportasi laut memiliki peran yang sangat penting. Indonesia memiliki lebih kurang 17.504 pulau dan disatukan lautan yang luas sehingga transportasi laut menjadi “urat nadi” bagi perekonomian Indonesia. Mengingat sangat vitalnya transportasi bagi perekonomian, maka

transportasi laut harus dikembangkan dengan baik dan benar untuk menunjang pertumbuhan perekonomian. Pelabuhan dan kapal yang ada di Indonesia menjadi infrastruktur penunjang utama demi moda transportasi laut untuk bisa melayani mobilitas barang dan masyarakat. Selain menjadi tempat melakukan aktivitas bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang menggunakan angkutan laut, keberadaan pelabuhan juga menjadi terminal penghubung untuk konektivitas antar daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan (3TP) ke daerah lebih maju. Kondisi ini dapat melancarkan arus perdagangan dan juga memajukan perekonomian daerah.

Indonesia juga memiliki banyak potensi bahari yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata. Sejumlah wilayah seperti kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil memiliki potensi untuk dikelola menjadi pariwisata bahari. Ditambah lagi dengan sejumlah potensi bahari lain, seperti keanekaragaman terumbu karang, kawasan Mangrove, hingga keanekaragaman biota laut yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Pemerintah sendiri telah menetapkan 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas Indonesia. Dari 10 (sepuluh) destinasi tersebut, delapan di antaranya merupakan destinasi pariwisata bahari. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor bahari di Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata.

Sejumlah sumber daya perikanan dan air laut memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Dari sumber daya perikanan, Indonesia memiliki berbagai jenis ikan, lobster, kepiting, udang, cumi-cumi, sotong, teripang, kerang, rumput laut, ikan hias, tepung ikan, dan sebagainya. Begitu pula dengan sumber daya air laut, Indonesia memiliki potensi garam untuk diolah oleh industri, farmasi, maupun menjadi diolah menjadi aneka pangan. Selain itu, sumber daya air laut juga dapat diolah menjadi air minum distilasi, energi, mineral, dan lain-lain.

Sumber daya kemaritiman harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses/industri sebagai subjek, bukan sekadar objek. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu manajemen yang terintegrasi dari segi ketersediaan sumber daya, pengumpulan/pengangkutan, pemrosesan/

pabrikasi, pengemasan, dan distribusi/pasar yang dapat diwujudkan dengan suatu holistik *design* atau *roadmap*. Manajemen terintegrasi ini juga harus melibatkan seluruh proses dari hulu ke hilir. Pemerintah dalam hal ini harus menjamin ketersediaan bahan baku, proses pengolahan/pabrikasi yang *sustainable*, dan pasar yang terjaga (domestik maupun internasional). Tidak hanya memerlukan peran dari pemerintah, namun dalam hal ini memerlukan sinergi antara ABG yaitu akademisi (A), *businessman* (B) (swasta) dan *government* (G) (pemerintah, baik pusat maupun daerah), juga peran serta masyarakat.

3.8.2 Strategi Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman

Dengan potensi-potensi yang ada, perlu terus dilakukan penguatan strategi dan upaya pengembangan sumber daya kemaritiman di Indonesia. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan pengembangan sumber daya kemaritiman di antaranya melalui pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, pengembangan wisata bahari, serta pengembangan sumber daya perikanan, rumput laut, dan air laut.

3.8.2.1 Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim

Pemberdayaan sumber daya kemaritiman memerlukan infrastruktur yang menunjang konektivitas maritim. Ekonomi maritim Indonesia tidak hanya berasal dari kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, tetapi juga mengenai konektivitas maritim seperti pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pendukung. Pembangunan konektivitas maritim merupakan hal penting karena dapat menjadi penghubung lalu lintas yang penting, baik sebagai penghubung antarpulau maupun antarnegara. Adapun tujuan akhir dari adanya konektivitas di laut Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, hingga perbaikan transportasi laut. Dengan adanya konektivitas yang baik tentunya hal ini akan berdampak pada perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari segi infrastruktur, kualitas kapal Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan negara di kawasan lain, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura, kualitas kapal Indonesia masih kalah bersaing. Selain itu, kapal perikanan Indonesia umumnya adalah kapal ukuran kecil (lebih kurang 97 persen). Indonesia sedikit sekali memiliki armada kapal perikanan besar untuk beroperasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maupun di laut lepas. Untuk mendukung hal ini, selain diperlukannya dukungan infrastruktur, diperlukan juga suatu *roadmap* yang mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia hingga internasional yang meliputi pelabuhan, kapal, jalur perdagangan, wilayah penangkapan ikan, wilayah budidaya ikan, rumput laut, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur konektivitas maritim yang baik, sinergi antara Pemerintah, Kementerian/Lembaga (K/L), pihak swasta, serta stakeholders lain yang berkaitan perlu terus ditingkatkan. Penguatan sinergi tersebut dilakukan untuk mewujudkan industri pelabuhan nasional yang lebih kuat dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melanjutkan sejumlah upaya yang dilakukan, seperti simplifikasi proses bisnis di pemerintahan, integrasi sistem layanan logistik di pemerintah maupun swasta, hingga mempermudah transaksi pembayaran.

3.8.2.2 Pengembangan Wisata Bahari

Potensi wisata bahari di Indonesia perlu terus didorong pengembangannya. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87 juta Ha kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan garis pantai Indonesia yang membentang 99.093 km² dengan luas laut 3,257 juta km². Dengan kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa kekayaan maritim di Indonesia tidak perlu diragukan terutama dalam keindahan dan keunikan wisata bahari, sehingga bisa menjadi pariwisata potensial yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Kontribusi wisata bahari bagi perekonomian Indonesia saat ini masih belum maksimal sehingga perlu terus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan pariwisata bahari yang menarik, namun masih perlu terus dikembangkan, seperti kegiatan rekreasi, petualangan laut, menyelam, selancar, memancing, *boat racing*, dan

kapal pesiar. Indonesia juga memiliki ratusan objek wisata bahari, namun manajemen *yachts* dan *cruise* Indonesia sangat terbelakang. Indonesia belum memiliki pelabuhan marina yang memadai, seperti di Singapura, Malaysia dan Thailand yang menjadi *hub yacht* dan *cruise* dunia. Potensi-potensi tersebut perlu terus dikelola dengan baik agar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, diharapkan kegiatan pariwisata tersebut mampu lebih memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

Dengan adanya potensi-potensi tersebut, diperlukan penguatan strategi dan upaya untuk mengembangkan pariwisata bahari. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan wisata bahari yaitu dengan mengembangkan wisata bahari berkelanjutan berbasis masyarakat dengan mengedepankan potensi lokal, pemberian izin lokasi dan pengelolaan untuk usaha wisata melalui peraturan atau undang-undang, serta menyusun pedoman kegiatan wisata bahari dengan menjaga ekosistem, keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Di samping itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, asosiasi, pihak swasta, dan peran masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini, ISEI dapat berperan serta untuk menyiapkan *grand design* wisata bahari Indonesia untuk bersaing dengan negara tetangga.

3.8.2.3 Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, namun perikanan tangkap Indonesia relatif tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia. Perikanan tangkap Indonesia belum mencakup tata kelola perikanan skala besar, baik dari sistem penangkapan maupun pemasaran. Perikanan dalam hal ini termasuk di dalamnya kepiting, teripang, kerang, udang, dan lain-lain. Segmen perikanan skala menengah dan besar harus dikelola secara serius dan terintegrasi meliputi armada kapal, pelabuhan, pemasaran, termasuk *handling* dan distribusi.

Indonesia perlu memiliki pelabuhan perikanan yang representatif berskala internasional. Posisi pelabuhan tersebut di berbagai tempat baik di sisi barat, tengah, maupun timur. Selain itu, Indonesia juga harus memiliki sistem manajemen pengelolaan ikan tangkap berskala nasional dan internasional. Oleh karena itu,

penangkapan ikan di Indonesia harus benar-benar diatur dan dijaga dari penangkapan ikan secara tidak sah atau *illegal, unreported and unregulated* (IUU) Fishing untuk menjaga *sustainability*.

Perikanan budidaya juga merupakan salah satu solusi alternatif, namun saat ini pengembangannya belum optimal. Dari sisi permintaan, konsumsi ikan masyarakat Indonesia (sekitar 30 kg per kapita per tahun) tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat Singapura, Korea, dan Jepang mengonsumsi ikan mencapai 80 – 100 kg (per kapita per tahun). Oleh karena itu, perikanan budidaya baik air tawar maupun air laut perlu dikembangkan secara masif dan nasional. Masing-masing daerah dapat mengembangkan budidaya ikan yang cocok dengan habitat dan ekosistem daerahnya, seperti budidaya kerapu, nila, mujair, sidat, lele, dan sebagainya. Untuk itu, dalam melakukan pengembangan budidaya perikanan di daerah-daerah Indonesia memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Salah satu sumber daya perikanan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah tepung ikan. Gerakan “Ayo gemar makan ikan” sulit untuk dilaksanakan di daerah pegunungan atau daerah yang jauh dari perairan. Oleh karena itu, tepung ikan dapat menjadi solusi alternatif untuk di daerah tersebut. Tepung ikan memiliki nutrisi yang relatif sama namun dapat disebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan transportasi yang jauh lebih mudah. Tepung ikan dapat dibuat berbagai jenis makanan, seperti bakso, mie, siomay, nugget, kue, dan lain-lain. Pembuatan tepung ikan, teknologinya relatif sederhana, bahan baku antara lain semua jenis ikan termasuk teripang, udang, dan cumi-cumi. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan pembuatan tepung ikan secara UMKM. Oleh karena itu, dengan adanya kemauan untuk melaksanakan, maka pengembangan tepung ikan melalui UMKM diharapkan dapat dioptimalkan untuk daerah-daerah yang jauh dari perairan.

Indonesia adalah penghasil ikan hias terbesar di Asia Tenggara. Namun demikian, *hub* ikan hias berada di Singapura, bukan di Indonesia. Singapura menikmati nilai tambah perdagangan ikan hias karena menguasai manajemen dan teknologi distribusi ikan hidup. Sementara itu, ikan hias Indonesia beraneka ragam, baik dari air tawar maupun air laut, sehingga Indonesia berpotensi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri maupun secara internasional. Sebagai solusi, salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan sumber daya ikan hias yaitu dengan menciptakan *demand* atau pasar. Jika seluruh kantor pemerintah, sekolah, hotel, maupun perusahaan disarankan untuk memasang akuarium ikan hias, maka akan tercipta industri ikan hias, akuarium, *aquascape*, perawatan akuarium, dan distribusinya. Kondisi ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

3.8.2.4 Pengembangan Sumber Daya Rumput Laut

Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan budidaya rumput laut.

Hal ini didorong kondisi wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan ideal. Namun, saat ini perilaku masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi rumput laut masih rendah. Jika dibandingkan dengan negara lain, konsumsi rumput laut di Indonesia masih tertinggal. Negara lainnya seperti Korea dan Jepang selalu menggunakan rumput laut sebagai bagian dari kuliner mereka.

Pasar rumput laut sangat besar, namun manajemen budi daya rumput laut di Indonesia masih belum optimal. Rumput laut terbukti dapat digunakan sebagai cangkang kapsul pengganti cangkang kapsul dari gelatin babi dan sapi, sehingga pasar domestik dan internasional (seperti India) untuk rumput laut sangat besar. Ditambah lagi dengan adanya kebutuhan kapsul nasional sekitar 6 milyar kapsul per tahun. Oleh karena itu, rumput laut masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara serius. Tentunya dalam hal ini peran pemerintah sangat besar untuk mendukung dan mendorong adanya program nasional cangkang kapsul dari rumput laut dan produk turunan rumput laut lainnya.

3.8.2.5 Pengembangan Sumber Daya Air Laut

Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara penghasil garam terbesar di dunia. Namun, kualitas dan kuantitas garam rakyat belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Pembuatan garam rakyat melibatkan ribuan masyarakat pesisir berpenghasilan rendah, namun tata kelolanya belum optimal. Kondisi ini selalu menjadi isu politik setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk menyejahterakan masyarakat petambak garam yang selama ini selalu menjadi objek.

Program menyejahterakan masyarakat petambak garam membutuhkan upaya yang besar meliputi edukasi, teknologi, kesepakatan, dan proses. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menciptakan pasar untuk produk

garam rakyat, seperti garam spa, garam herbal, garam kesehatan, garam mandi, garam souvenir, dan sejenisnya. Dalam hal ini perlu melibatkan Pemda dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyerap produk garam rakyat. Selain program menyejahterakan masyarakat petambak garam, pemerintah juga harus melakukan tata kelola garam industri, garam aneka pangan dan garam farmasi yang juga mempunyai potensi pasar yang sangat besar, namun membutuhkan teknologi modern/canggih.

Sumber daya air laut lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan adalah air minum distilasi. Selama ini kita berfokus membuat garam, sementara ada potensi sangat besar untuk membuat air minum distilasi. Air minum distilasi dapat dibuat dengan teknologi relatif sederhana dan dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir sehingga dapat berpotensi menjadi sebuah program menyejahterakan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat membuat BUMN atau BUMDES pembuatan air minum distilasi untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di daerah-daerah kesulitan air bersih pada khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dengan teknologi yang relatif sederhana, pihak swasta juga sudah memulai membuat industri air minum distilasi dengan kualitas setara dengan air mineral kemasan di pasaran. Hal ini dapat berpotensi sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan air bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

3.9 Pemberdayaan Industri Ekonomi Kreatif

Terdapat dua tantangan struktural yang berpengaruh langsung terhadap dinamika perkembangan sektor industri ekonomi kreatif di masa sekarang dan mendatang. Kedua tantangan tersebut yakni: (i) Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbatas, dan (ii) Kualitas SDM yang kurang dalam melaksanakan kegiatan *branding* dan pemasaran industri kreatif nasional.

Pada tantangan pertama, permasalahan HKI dalam ekonomi kreatif sering kali menimbulkan konflik antar pelaku ekonomi kreatif. Hal ini mengingat ekonomi kreatif sangat terkait dengan keaslian (orisinalitas) dan royalti. Pemerintah telah mempermudah dalam pengurusan HKI dengan biaya yang cukup terjangkau, namun banyak pelaku ekonomi kreatif yang tidak memiliki pemahaman terkait pentingnya HKI dan cara pendaftarannya.

Terkait permasalahan SDM, industri ekonomi kreatif harus diakui masih memiliki keterbatasan SDM. Kurangnya kualitas SDM ditengarai karena belum banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung *branding* dan *marketing* produk/karya kreatifnya. Hal ini berdampak pada penjualan yang stagnan atau cenderung menurun, padahal karya tersebut berpotensi untuk bisa menghasilkan pendapatan yang besar dan menggerakkan perekonomian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang ditawarkan dibagi dalam dua dimensi. Pertama, dimensi jangka pendek (*quick wins*), yakni perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya lebih komunikatif dan populis, antara lain sosialisasi tentang pendaftaran HKI produk/karya kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama di daerah, serta seminar manajemen SDM dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kedua, dimensi jangka menengah-panjang, kebijakan lebih diarahkan untuk pelaksanaan asistensi dan penguatan *milestone* pengembangan ekonomi kreatif nasional, antara lain pendampingan terkait manajemen SDM/tenaga kerja pada industri kreatif, penguatan *milestone* tahunan terutama pasca kondisi perekonomian telah pulih secara bertahap dan tersedia berbagai bentuk kebijakan stimulus untuk mendorong sektor rumah tangga pulih kembali.

3.10 Sinergi Penguatan Akses Pembiayaan

Proses pemulihan ekonomi diperlukan adanya akses pembiayaan, salah satunya yaitu akses pembiayaan pada sektor UMKM. UMKM merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional yang memiliki peran penting dan strategis. Namun, dalam pengembangannya masih terdapat banyak hal yang menjadi kendala, khususnya kendala pada akses pembiayaan dan pengembangan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih terdapat banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan dari sisi pengembangan usaha, saat ini pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi, pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 triliun anggaran PC-PEN untuk tahun 2022 dan UMKM

menjadi prioritas dalam alokasi anggaran PEN tersebut. Berdasarkan data analisis uang beredar dari Bank Indonesia, total nilai *outstanding* kredit UMKM mencapai Rp1.171,8 triliun atau 20,03% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sampai dengan Maret 2022. Kredit skala mikro tercatat mencapai Rp394,1 triliun atau 33,63% dari total kredit UMKM dan nilai tersebut tumbuh 94,7% (yoy) dan menjadi yang tertinggi di antara kelompok kredit usaha lainnya.

Sebagai dukungan bagi sektor UMKM yang terdampak pandemi, Pemerintah perlu terus memberikan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban para debitur. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan perluasan akses pembiayaan untuk UMKM melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial agar porsi kredit UMKM dapat ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Selain itu, perluasan akses keuangan UMKM juga dapat menggunakan platform digital untuk sisi pembiayaan dan pembayaran. Dengan begitu, pemerintah perlu membangun *database* profil UMKM yang lebih komprehensif untuk penyusunan struktur informasi yang dibutuhkan. Selain untuk keperluan perluasan akses pembiayaan UMKM, *database* juga bisa sekaligus bermanfaat untuk perluasan akses pemasaran.

3.11 Penguatan Perdagangan dan Keuangan Internasional

Dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia, kerjasama antarnegara melalui perdagangan dan keuangan internasional sangat diperlukan. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat menambah pendapatan devisanya. Apalagi saat ini posisi cadangan devisa sedang mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam penguatan perdagangan internasional. Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2022 turun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu menjadi sebesar 132,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa pada Juli 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.²⁰

²⁰ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2420422.aspx

Sementara keuangan internasional juga tak kalah penting. Adapun peran keuangan internasional yaitu sebagai alat penting dalam menemukan nilai tukar, membandingkan tingkat inflasi, memastikan status ekonomi negara-negara lain dan juga menilai pasar luar negeri. Saat ini, berbagai potensi risiko dari sistem keuangan internasional yang dapat menghambat proses pemulihan ekonomi dunia seperti potensi pengetatan kebijakan moneter akibat meningkatnya tekanan inflasi, menyempitnya ruang kebijakan, meningkatnya level utang di berbagai negara, serta peningkatan volatilitas di pasar keuangan.

Indonesia menyadari pentingnya upaya penguatan perdagangan dan keuangan internasional melalui peningkatan kerja sama antarnegara. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memastikan jaringan rantai pasok tetap terbuka dan berjalan lancar dengan mengurangi hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun nontarif. Kemudian, pemanfaatan melalui teknologi juga penting karena akan mendorong modernisasi yang memfasilitasi perdagangan secara menyeluruh dan menciptakan peluang bagi pemerintah maupun swasta. Namun, perlu mempertimbangkan kapasitas dan kesenjangan digital terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kerangka kebijakan, termasuk mengutamakan kegiatan peningkatan kapasitas dan berbagi informasi kebijakan. Sementara itu, dalam hal kerja sama dengan mitra dagang, pemerintah perlu mempercepat proses penyelesaian ratifikasi pada sejumlah perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dengan negara mitra dagang.



BAB IV

AKSELERASI DIGITALISASI DAN KEBIJAKAN HIJAU UNTUK INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak selayaknya hanya untuk mengejar pertumbuhan semata. Terdapat dua isu besar yang harus diatasi dalam upaya pembangunan perekonomian nasional. Pertama, inklusi ekonomi dan keuangan yang menginginkan bahwa pertumbuhan ekonomi hendaknya terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan akses serta kesempatan yang sama bagi seluruh elemen bangsa. Sebuah studi dengan data tahun 2014-2016 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum inklusif dikarenakan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup lebar (Pukuh dan Widyasthika, 2017). Kedua, sustainability atau keberlanjutan yang berangkat dari kekhawatiran terhadap dampak dari perubahan iklim, ekonomi dan pembangunan, serta politik terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Akselerasi atas berbagai kebijakan digitalisasi serta ekonomi dan keuangan hijau akan menjawab isu ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut, pokok bahasan pada bab ini terbagi menjadi dua besaran: akselerasi digitalisasi serta kebijakan ekonomi dan keuangan hijau untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Pada besaran pertama, akan diuraikan tantangan utama, usulan solusi, dan risiko serta mitigasi terkait akselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital, percepatan digitalisasi UMKM, dan penguatan perlindungan konsumen di era digital. Sementara pada besaran kedua, akan didiskusikan pengembangan ekonomi dan keuangan hijau nasional, serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial hijau. Bab ini sekaligus menyajikan hasil analisis tematik yang dilakukan oleh beberapa *Focus Group* Bidang Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan Pimpinan Pusat ISEI. Analisis tematik atas kebijakan digitalisasi dilakukan oleh *Focus Group E-Commerce dan Fintech*, *Focus Group* UMKM, dan *Focus Group* Ekonomi dan Keuangan Inklusif, sementara analisis kebijakan hijau dilakukan oleh *Focus Group* Fiskal dan *Focus Group* Moneter..

4.1 Akselerasi Pembangunan Ekonomi & Keuangan Digital Nasional

Di tengah pandemi COVID-19, ekonomi dan keuangan digital mampu tampil sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat yang terbesar di ASEAN, dengan nilai 70 miliar dolar AS, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 146 miliar dolar AS. Bahkan pada tahun 2030, nilai ini diproyeksikan akan terus naik hingga mencapai 330 miliar dolar AS.

Subsektor yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap ekonomi digital Indonesia adalah *e-commerce*. Sementara, subsektor lain, seperti *ride-hiling*, *online media*, dan *online travel* nilainya terus meningkat setiap tahun. Adapun nilai transaksi *e-commerce* pada triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp108,54 triliun, naik sekitar 23% dibandingkan triwulan IV Tahun 2021. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap berbagai layanan *online*, serta didukung perluasan sistem pembayaran digital termasuk melalui akselerasi *digital banking*. Pada tahun 2021, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 35,25%, sementara nilai transaksi QRIS melonjak sebesar 245% dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 20,82% secara tahunan. Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan utama yang memerlukan solusi yang riil, terorkestrasi dengan baik, dan sinergi antar pelaku baik otoritas atau regulator, pelaku bisnis, maupun masyarakat sebagai konsumen.

4.1.1 Tantangan Pembangunan Ekonomi & Keuangan Digital Nasional

Tantangan utama pembangunan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia mencakup 4 (empat) besaran fundamental. Pertama, infrastruktur digital yang masih belum memadai. Kedua, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan perlu terus ditingkatkan. Ketiga, regulasi yang belum kondusif. Keempat, pola pikir (*mind-set*) yang belum mendukung perilaku digital sehingga harus diubah.

Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga terkait telah memiliki sejumlah kebijakan/inisiatif/program pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Contohnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki *Indonesia*

Digital Roadmap 2021-2024, Bank Indonesia memiliki *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025: Bank Indonesia Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, Kementerian Perindustrian memiliki inisiatif *Making Indonesia 4.0*, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2010-2025 dan *Roadmap* Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024.

Akan tetapi kebijakan/inisiatif/program yang dijalankan oleh Pemerintah tersebut masih terlihat berjalan sendiri-sendiri (*in silos*) dan belum ada koordinasi dan sinergi yang kuat dalam implementasinya. Hal tersebut turut menjadi permasalahan utama yang mengakibatkan upaya pengembangan ekonomi digital cenderung lambat dan belum optimal.

a. Belum Memadainya Infrastruktur Digital Nasional

Beberapa indikator menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur digital Indonesia harus diakui masih belum memadai. Misalnya, masih terdapat 12 ribu desa yang belum tersentuh layanan internet. Ini sekitar 15% dari total jumlah seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 83.381 desa dan kelurahan menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Juni 2021. Desa ini tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, penetrasi internet di Indonesia juga baru mencapai 76,8%, menduduki peringkat ke-7 di ASEAN. Kecepatan *fixed* dan *mobile broadband* internet di Indonesia juga baru mencapai masing-masing 21,68 Mbps dan 16,86 Mbps, hanya menduduki peringkat ke 8 di ASEAN.

Dukungan pengembangan infrastruktur digital terus dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembangunan infrastruktur digital dilakukan mencakup empat hal. Pertama, pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.148 km. Kedua, penyediaan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang pada tahun 2021 telah tersedia 1.682 titik lokasi di seluruh Indonesia. Ketiga, penyediaan akses internet dan ekosistem digital di berbagai fasilitas umum yang telah mencapai 15.556 lokasi dari target sebanyak 22 ribu titik. Keempat, pembangunan satelit multifungsi SATRIA-1 (*High Throughput Satellite*).

Ke depan, Pemerintah perlu terus fokus pada pengembangan infrastruktur digital. Pertama, perluasan jangkauan 4G bagi 12.548 desa/kelurahan yang belum

terjangkau internet 4G perlu dilakukan akselerasi, agar masyarakat dapat menikmati penggunaan layanan internet yang cepat, aman dan murah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, transaksi ekonomi digital, dan pada ujungnya kesejahteraan masyarakat. Kedua, uji coba implementasi terbatas jaringan 5G perlu segera dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Ketiga, pembangunan Data Center Nasional dan peluncuran satelit SATRIA. Keempat, penyelesaian pembangunan integrasi palapa ring untuk meningkatkan utilitas, ketahanan, dan koneksi jaringan domestik ke jaringan internasional.

b. Kapasitas SDM yang Belum Memadai

Secara umum, Indonesia masih dihadapkan pada kurangnya SDM/talenta digital. Pada periode 2015-2030, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital atau sekitar 600 ribu per tahunnya. Di sisi lain, UMKM yang merupakan penyangga perekonomian nasional belum secara optimal masuk ke ekosistem digital. Baru sekitar 29,6% UMKM Indonesia yang telah *on-boarding* ke platform digital. Literasi digital masyarakat Indonesia juga masih rendah, terlihat dari skor atas indeks literasi digital Indonesia yang berada pada angka 3,49 atau berada pada kategori sedang.

Berbagai program/kebijakan/inisiatif yang telah dijalankan perlu untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan keuangan digital. Pertama, program pelatihan, pendidikan, dan pendampingan melalui program Kartu Prakerja. Sampai saat ini, total pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai lebih dari 89 juta orang, dengan jumlah penerima program mencapai 13,1 juta orang. Kedua, program Literasi Digital Nasional dengan tema "*Indonesia Makin Cakap Digital*" juga perlu terus dijalankan dengan perluasan implementasinya. Program ini terdiri atas Program Siber Kreasi, *Digital Talent Scholarship*, dan *Digital Talent Academy*. Ketiga, Program *Digital Entrepreneurship Academy* yang merupakan bagian dari *Digital Talent Scholarship*, dengan tujuan melatih para wirausahawan Indonesia untuk *Go-Digital* juga perlu dilakukan akselerasi. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini pada tahun 2022 telah melatih sekitar 15.000 orang wirausahawan Indonesia untuk siap menggunakan platform digital untuk kegiatan bisnisnya.

c. Regulasi yang Belum Kondusif

Regulasi di Indonesia belum mendukung pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk berkembang. Lemahnya regulasi ini tercermin dari masih lemahnya keamanan siber (*cyber security*) serta perlindungan privasi dan data konsumen, banjirnya produk-produk impor di pasar dalam negeri, dan ancaman *predatory pricing*.

Berbagai program/kebijakan/inisiatif perlu terus dilanjutkan oleh Pemerintah. Kebijakan utama terkait reformasi regulasi misalnya penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi *critical issues* yang terjadi, seperti: (i) meminimalisir ancaman terhadap UMKM dan industri dalam negeri dari produk luar negeri dan perdagangan yang tak sehat; (ii) mengutamakan produk dan perdagangan dalam negeri; (iii) mengembangkan akses usaha UMKM di dalam ekonomi digital; dan (iv) perlindungan konsumen dari perdagangan dan produk luar negeri.

d. Pola Pikir (*Mindset*) yang Harus Diubah

Untuk mendukung akselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, harus ada perubahan signifikan atas *mindset* masyarakat Indonesia. Beberapa *mindset* yang belum mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital termasuk rendahnya keinginan untuk berkompetisi, khususnya bagi para pelaku UMKM di daerah, dan layanan internet yang masih lebih banyak digunakan untuk aktivitas sosial dan hiburan, daripada untuk kegiatan produktif. Di sisi lain, upaya perubahan *mindset* perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat oleh Pemerintah, termasuk melalui kolaborasi *pentahelix* atau multipihak (*Academy, Business, Community, Government, and Media*).

4.1.2 Solusi Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional

Untuk mengatasi berbagai tantangan utama pembangunan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditawarkan beberapa

solusi yang terbagi menjadi solusi jangka pendek (*quick wins*) dan solusi jangka menengah panjang (*medium terms*).

a. Solusi Jangka Pendek (*Quick Wins*)

Quick wins yang diusulkan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia mencakup:

- Pemerintah perlu menyusun **Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital**. Stranas ini akan berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan orkestrasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital ke depan. Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan dapat melengkapi serta terintegrasi dengan strategi keuangan yakni *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dari Bank Indonesia dan kebijakan terkait ekonomi digital lainnya.
- Pemerintah perlu membentuk **Komite Nasional dan *Project Management Office* (PMO) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital**. Komnas ini memiliki tujuan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, terkoneksi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui: (i) pengembangan dan perluasan infrastruktur; (ii) penyediaan SDM digital yang mumpuni, stimulasi riset, inovasi, dan pengembangan usaha; (iii) penciptaan iklim usaha (termasuk tata kelola data); (iv) penguatan investasi dan pembiayaan guna menciptakan peluang yang beragam dan setara/merata; dan (v) penguatan koordinasi lintas-sektor dan lintas kementerian/lembaga. Kemitraan dengan sektor swasta juga tak kalah penting untuk meningkatkan pencapaian tujuan tersebut.

b. Solusi Jangka Menengah Panjang (*Medium Terms*)

Kebijakan/inisiatif/program pada jangka panjang yang perlu dijalankan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan keuangan digital nasional yaitu **implementasi dan *monitoring* PMO Pengembangan Ekonomi Digital**. Implementasi dan *monitoring* sebagai solusi *medium terms* ini perlu fokus pada: (i) infrastruktur; (ii) SDM; (iii) riset, inovasi, dan pengembangan usaha; (iv) iklim usaha yang kondusif (termasuk tata kelola data); dan (v) pendanaan serta investasi.

4.1.3 Analisis Risiko dan Mitigasinya

Risiko utama atas usulan solusi akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital sebagaimana ditawarkan di atas adalah PMO Pengembangan Ekonomi Digital tidak berjalan sesuai rencana dan target yang ditentukan. Dampak dari risiko tersebut adalah target pengembangan ekonomi digital tidak tercapai, sehingga pengembangan ekonomi digital tetap berjalan sendiri-sendiri seperti kondisi saat ini (*in silos*).

Risiko tersebut perlu dilakukan mitigasi dengan baik. Usulan pembentukan, implementasi, dan *monitoring* PMO diharapkan dapat mengawal dan mengorkestrasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun usulan ini memiliki risiko PMO tidak berjalan sesuai rencana dan target yang diharapkan. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah yaitu percepatan persiapan pembentukan PMO Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital yang disertai dengan Pedoman Rencana Kerja dan Tata Kelola PMO, termasuk didalamnya target dan *time line* yang terukur.

4.2 Akselerasi Pengembangan Digitalisasi UMKM

Pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat negatif pada pelaku UMKM, yakni dengan mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat. Untuk mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi, pemanfaatan teknologi digital menjadi hal yang penting bagi UMKM untuk bertahan dan bertumbuh di era kenormalan baru. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya mendorong UMKM *go digital* yang perlu dicarikan solusi yang tepat tujuan dan tepat sasaran.

4.2.1 Tantangan Utama Digitalisasi UMKM

Program pengembangan digitalisasi masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu: (i) masih rendahnya *mindset* UMKM untuk *go digital*, (ii) masih rendahnya literasi digital UMKM, dan (iii) belum meratanya infrastruktur pendukung.

a. Rendahnya *Mindset* UMKM untuk *Go Digital*

Masih banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki *mindset* kewirausahaan digital, sehingga masih mempertahankan pengelolaan kegiatan usahanya secara konvensional. Adopsi teknologi digital memerlukan *mindset* dan kemauan untuk belajar, mengikuti perkembangan digital dan menggunakannya untuk meningkatkan nilai tambah bisnis dan memperluas akses pasar. *Mindset* digital perlu dibangun secara terus menerus, menjadi pola pikir dan kebiasaan untuk selalu memanfaatkan digitalisasi di setiap kegiatan usaha. *Mindset* untuk *go digital* akan menjadikan UMKM mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cepat sesuai kebutuhan usaha.

Pemerintah bersama industri perlu menyusun skema besar dan peta jalan yang terstruktur dalam membentuk *digital mindset* UMKM mulai dari penanaman pola pikir kewirausahaan digital. Skema dan peta jalan pembangunan *mindset* digital UMKM akan menjadi pedoman bagi seluruh UMKM Indonesia untuk mempersiapkan diri sebelum *on-boarding* ke platform digital. Sebaiknya, skema dan peta jalan juga dilengkapi dengan asistensi/pendampingan dan serangkaian program pelatihan serta *mentoring* bagi UMKM.

b. Rendahnya Literasi Digital UMKM

Tantangan yang mendasar bagi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kompetensi, dan literasi digital para pelaku UMKM dalam melakukan proses dan manajemen bisnis yang efektif dan terencana. Keterbatasan kapasitas dan literasi digital menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang dan berkompetisi di pasar, ditambah saat ini perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Literasi digital tidak hanya untuk mengoperasikan pemasaran digital, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan kepentingan. Perlunya kolaborasi yang erat dan bauran kebijakan yang tepat antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan swasta untuk meningkatkan kapasitas dan mengakselerasi digitalisasi UMKM secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Perlunya keberadaan lembaga/instansi yang dapat mengkoordinir pembagian peran antara pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan membangun ekosistem digital agar

pelaksanaannya dilakukan secara efektif, terukur, dan tepat sasaran. Selain itu, perlu juga ditentukan program-program *flagship* nasional dengan target tertentu yang menjadi program bersama antarpemangku kepentingan.

c. Masih Terbatasnya Infrastruktur Pendukung

Tantangan digitalisasi lainnya adalah keterbatasan infrastruktur pendukung. Beberapa tantangan terkait keterbatasan infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut.

- Jaringan internet yang belum merata

Berdasarkan data Internet World Stats (2021) tingkat penetrasi internet Indonesia baru mencapai 76,8% atau peringkat ke-6 di Asia Tenggara. Adapun peringkat 3 besar yaitu Malaysia (89%), Singapura (87,7%), dan Thailand (83,6%).

- Kecepatan internet yang masih rendah

Berdasarkan data Speedtest Global Index (2021), kecepatan internet Indonesia merupakan peringkat ke-8 di Asia Tenggara. Peringkat 3 besar dalam kecepatan internet yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia.

- Biaya logistik yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia

Menurut data Amstrong dan Associates (2021), biaya logistik Indonesia tertinggi di Asia Tenggara yaitu 22% dari PDB, diikuti oleh Vietnam (20%), Laos (17,7%), dan Myanmar (17,2%). Biaya ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk go digital.

- Regulasi untuk mendukung kemudahan dan keamanan proses bisnis digitalisasi UMKM

Pengembangan ekosistem digital bagi UMKM tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan peraturan/regulasi yang mendukung kelancaran dan keamanan bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital. Pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini masih belum diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni dan regulasi digital yang kuat. Oleh karena itu, terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan siber (keamanan data pribadi) dan isu *predatory pricing* akibat derasnya produk impor masuk melalui *e-commerce*.

4.2.2 Solusi untuk Mendorong Digitalisasi UMKM

Untuk mengatasi berbagai tantangan utama pengembangan digitalisasi sebagaimana diuraikan di atas, ditawarkan beberapa solusi yang terbagi menjadi solusi jangka pendek (*quick wins*) dan solusi jangka menengah panjang (*medium terms*).

a. Solusi Jangka Pendek (*Quick Wins*)

Quick wins yang diusulkan untuk mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia mencakup:

- Pelaksanaan literasi digital secara lebih masif dan kontinu kepada UMKM terutama kepada *local champion* di daerah agar lebih efektif.
- Pemberian subsidi biaya logistik untuk mendorong UMKM masuk kedalam pasar digital dan mampu bersaing dengan produk perusahaan besar.
- Peningkatan penggunaan katalog elektronik (*e-catalog*) UMKM oleh Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pelaksanaan pengadaan.

b. Solusi Jangka Menengah Panjang (*Medium Terms*)

Adapun solusi jangka menengah panjang (*medium terms*) yang dapat disiapkan untuk mendorong pengembangan digitalisasi UMKM Indonesia mencakup:

- Pemerataan infrastruktur pendukung digitalisasi UMKM oleh Pemerintah seperti listrik dan internet.
- Sinergi *hexa helix* untuk mengakselerasi digitalisasi untuk pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi daerah khususnya UMKM.
- Penyertaan modul mengenai kewirausahaan digital dalam kurikulum ajar di berbagai level pendidikan wajib.
- Pembuatan *digital center* pada masing-masing daerah sebagai wadah UMKM meningkatkan literasi digital dan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis.
- Penyediaan regulasi pendukung digitalisasi, khususnya terkait UMKM untuk memitigasi kejahatan siber (khususnya privasi dan keamanan data pribadi) dan isu *predatory pricing*.

4.2.3 Analisis Risiko dan Mitigasinya

Usulan solusi sebagaimana dinarasikan di atas, masing-masing memiliki risiko yang perlu diupayakan mitigasinya. *Quick wins* yang pertama misalnya, pelaksanaan literasi digital secara lebih masif dan kontinu kepada UMKM terutama kepada *local champion* di daerah agar lebih efektif memiliki 2 (dua) besaran risiko, yakni: (a) tingkat literasi yang berbeda antarwilayah ataupun dalam satu wilayah; dan (b) *local champion* yang diharapkan menjadi motor penggerak malah bersikap pasif. Adapun upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain: (i) menyiapkan program atau modul pelatihan yang tidak *one size fits all*, dalam artian disesuaikan dengan karakteristik wilayah atau mayoritas sektor usaha yang ada di wilayah tersebut; dan (ii) perlu koordinasi awal dengan para *local champions* agar mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka dan pemberian *reward* sebagai motivasi tambahan.

Quick wins yang kedua, terkait pemberian subsidi biaya logistik untuk mendorong UMKM masuk kedalam pasar digital dan mampu bersaing dengan produk perusahaan besar, memiliki risiko: (i) pemberian subsidi tidak tepat sasaran ke UMKM yang benar-benar memerlukan atau subsidi tidak dimanfaatkan untuk digitalisasi usaha UMKM tersebut; dan (ii) biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk subsidi ini relatif besar. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dilakukan kolaborasi dengan *e-commerce* dan perusahaan logistik nasional untuk pemberian subsidi kepada UMKM potensial.

Bukan hanya usulan solusi *quick wins*, usulan solusi *medium terms* juga memiliki risiko tersendiri dan upaya mitigasinya. Misalnya, usulan solusi pembuatan *digital center* di masing-masing daerah sebagai wadah UMKM meningkatkan literasi digital dan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan usaha memiliki beberapa risiko dan upaya mitigasinya. Risiko yang mungkin timbul terkait usulan jangka menengah-panjang ini adalah: (i) isu keberlanjutan pengelolaan *digital center* oleh Pemda setempat; (ii) isu pemanfaatan fasilitas *digital center* yang tidak tepat sasaran. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah kolaborasi dengan asosiasi industri/*e-commerce* dalam pengelolaan dan penyediaan narasumber/mentor.

Adapun risiko yang mungkin timbul terkait usulan penyediaan infrastruktur pendukung digitalisasi UMKM oleh Pemerintah seperti listrik dan internet mencakup: (i) belum semua daerah *eligible* untuk dibangun infrastruktur tersebut; dan (ii) biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur tersebut relatif besar. Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan *mapping* dan kategorisasi *readiness* masing-masing daerah serta menetapkan prioritas dan program yang bertahap untuk penyediaan infrastruktur dimaksud. Terkait usulan sinergi *hexa helix* untuk mengakselerasi digitalisasi dalam rangka pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi daerah khususnya UMKM, memiliki risiko bahwa masing-masing kementerian/lembaga memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan program digitalisasi UMKM. Risiko ini dapat dimitigasi dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga secara *top down approach*.

4.3 Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital

Peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada pemerataan ekonomi secara menyeluruh, peningkatan akses atau inklusi keuangan menjadi motor penggerak perekonomian melalui pemanfaatan produk yang bermuara kepada lembaga keuangan formal. Upaya ini perlu dibarengi dengan perlindungan konsumen yang memadai.

Penguatan perlindungan konsumen di era digital merupakan salah satu kunci keberhasilan program inklusi ekonomi dan keuangan. Dewasa ini, perlindungan konsumen dipengaruhi perkembangan dua dimensi, yakni (i) dimensi adopsi teknologi dan inovasi yang pesat; dan (ii) dimensi era kenormalan baru sebagai dampak kebijakan mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Kedua dimensi ini memberikan tantangan baru bagi sektor perlindungan konsumen.

4.3.1 Tantangan Utama Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital

Tantangan penguatan perlindungan konsumen di era digital mencakup: (i) perluasan dan kesetaraan akses terhadap produk dan layanan; (ii) rendahnya

literasi keuangan konsumen Indonesia, (iii) transparansi dan keterbukaan informasi, (iv) perlindungan privasi dan data konsumen; (v) kemudahan akses terhadap penyelesaian keluhan/sengketa konsumen; dan (vi) sinergi antarotoritas.

a. Perluasan dan Kesetaraan Akses terhadap Produk dan Layanan

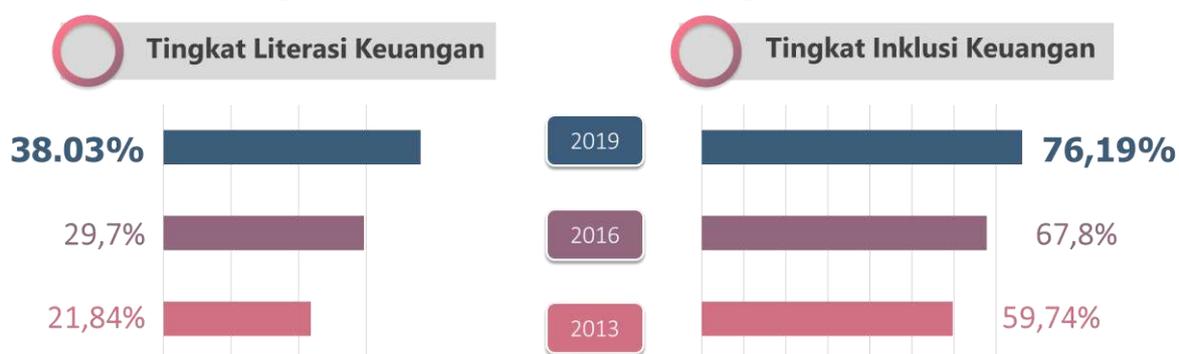
Meskipun produk dan layanan (misalnya jasa keuangan) telah tersedia dan tersebar di beberapa daerah tujuan, namun belum semuanya dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Pemda dan produsen seperti Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sangat penting dalam: (i) merancang produk yang sesuai kebutuhan; (ii) memperluas akses atas produk/layanan tersebut; dan (iii) menciptakan kesetaraan akses atas produk tersebut, misalnya dengan regulasi yang kondusif dan pemberian insentif/disinsentif yang tepat. Hal ini mengingat upaya dalam rangka mendukung perluasan akses atas suatu produk/layanan tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyusun arah strategi dan kebijakan. Untuk itu, kehadiran forum koordinasi dan sinergi di masing-masing daerah untuk meningkatkan perluasan dan kesetaraan akses terhadap produk/layanan menjadi semakin mendesak.

b. Rendahnya Literasi Keuangan Konsumen Indonesia²¹

Kenyataannya, mayoritas konsumen Indonesia belum memahami risiko atas penggunaan suatu produk dan layanan digital. Sebagai contoh, pada sektor jasa keuangan, hasil survei OJK pada tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 76%, tingkat literasi keuangan konsumen Indonesia hanya berada pada kisaran 38% (**Grafik 18**). Padahal, indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 tersebut meningkat sekitar 8% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada kisaran 68%. Literasi keuangan konsumen Indonesia pada tahun 2019 pun mengalami peningkatan serupa jika dibandingkan tahun 2016. Meskipun peningkatan dianggap cukup signifikan, indeks ini ternyata masih berada di bawah negara *peers* lainnya.

²¹ Kominfo dan KatadataInsightCenter. 2020. "Status Literasi Digital Indonesia 2020: Hasil Survei di 34 Provinsi".

Grafik 18. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional tahun 2019



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2019

Secara spasial, baik inklusi maupun literasi keuangan konsumen di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen di pedesaan. Indeks inklusi keuangan di wilayah perkotaan mencapai 83,6%, sementara di wilayah pedesaan hanya sebesar 68,5%. Pada literasi keuangan, konsumen yang berada di wilayah perkotaan memiliki indeks literasi keuangan 41,4% atau di atas rata-rata nasional, sementara di wilayah pedesaan hanya sebesar 34,5% atau di bawah rata-rata nasional.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga adanya kesadaran kolektif untuk terus meningkatkan akseptasi produk/layanan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pasalnya, tidak semua wilayah khususnya pedesaan memiliki kapasitas infrastruktur yang sama kualitasnya. Begitu pula dengan jangkauan infrastruktur digital, teknologi, dan keberadaan agen untuk layanan ekonomi dan keuangan inklusif yang masih belum merata.

c. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan fondasi awal hubungan antara konsumen dan produsen. Penerapan prinsip transparansi juga merupakan jembatan penghubung terjadinya transaksi keuangan antara konsumen dengan produsen. Transparansi produk dan jasa keuangan akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh konsumen, yaitu meningkatkan pemahaman konsumen tentang manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kondisi ini pada akhirnya akan membawa konsumen untuk lebih yakin dan lebih

percaya kepada produsen, sehingga berujung pada keinginan konsumen untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan, serta meminimalisasi timbulnya pengaduan oleh konsumen. Sementara itu, bagi produsen, adanya prinsip transparansi akan semakin mendorong produsen untuk terus berkompetisi dalam menawarkan kualitas produk dan jasa keuangan yang lebih baik. Keefektifan transparansi dan keterbukaan informasi tersebut dapat tercapai salah satunya melalui keseragaman bentuk informasi, sehingga masyarakat dengan mudah dapat membandingkan informasi produk dan jasa keuangan antara yang satu dengan yang lain.

d. Perlindungan Privasi dan Data Konsumen

Di Indonesia, isu privasi dan perlindungan data pribadi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Hal ini mengingat belum adanya regulasi pada level undang-undang yang menjamin privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Rancangan atas undang-undang ini masih digodok oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan K/L terkait. Saat ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar pada masing-masing K/L terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan implementasi dan *enforcement* atas perlindungan data pribadi belum terstandardisasi serta masih bersifat sporadis.

Isu ini diperberat dengan semakin maraknya kejahatan siber. Meski harus diakui bahwa mayoritas kejahatan digital di Indonesia masih mendasarkan pada rekayasa sosial (*social engineering*) dan relatif belum banyak menggunakan *hi-tech*, isu terkait keamanan dan kebocoran data beberapa kali terjadi, baik di pemerintahan maupun bisnis. Contohnya, *ransomeware* Conti yang mengklaim mengambil ribuan bahkan jutaan data pribadi dan meminta tebusan sebagai pengganti.

e. Kemudahan Akses terhadap Penyelesaian Keluhan/Sengketa Konsumen

Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan secara digital sering kali lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kejahatan di dunia maya juga tidak pandang bulu, dapat menyerang siapa saja dan kapan saja, bahkan sering kali tanpa disadari oleh konsumen sebagai korban. Untuk itu, saluran penyampaian dan penyelesaian keluhan atau pengaduan konsumen di era digital ini harus terbuka luas,

dan dapat diakses oleh konsumen dari segala lapisan. Keberadaan inovasi dan teknologi memungkinkan diciptakan saluran pengaduan konsumen secara *online* yang bersifat 24/7, sejalan dengan perkembangan karakteristik permasalahan konsumen di era digital.

Dengan tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, K/L seperti Bank Indonesia dan OJK sering kali menerima pengaduan konsumen yang bersifat rekayasa sosial (*social engineering*). Sebagai contoh, pencurian PIN atau *One Time Password* (OTP) yang dilakukan melalui kanal *chatting* seperti WA atau telepon. Untuk itu, penting bagi penyedia produk/layanan dan regulator untuk menyediakan informasi selengkap-lengkapnyanya atas produk/layanan, termasuk manfaat dan risiko, serta kemudahan akses bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan, melalui berbagai kanal (*omnichannel*) seperti telepon, *website*, aplikasi, media sosial, maupun fasilitas *chat (bot)*.

f. Sinergi Antarotoritas

Penguatan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh otoritas dan regulator terkait. Untuk itu, diperlukan sinergi antar-K/L guna mendukung implementasi Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang telah dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017. STRANAS-PK ini telah mencakup berbagai sektor termasuk digital seperti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE). Pada tahap implementasi, STRANAS juga dilengkapi dengan sinergi penyediaan Portal Perlindungan Konsumen untuk penanganan pengaduan konsumen.

4.3.2 Solusi untuk Penguatan Perlindungan Konsumen

Untuk mengatasi berbagai tantangan utama pengembangan digitalisasi terdapat beberapa solusi yang terbagi menjadi solusi jangka pendek (*quick wins*) dan solusi jangka menengah panjang (*medium terms*).

a. Solusi Jangka Pendek (*Quick Wins*)

Quick wins yang diusulkan untuk penguatan perlindungan konsumen di era digital mencakup:

- **Edukasi dan sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal media komunikasi.** Menjangkau kebutuhan informasi tentang produk/layanan yang dapat diandalkan bagi konsumen. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi produk/layanan keuangan sehingga dapat menggunakannya secara optimal sekaligus memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajibannya selaku konsumen. Masyarakat juga perlu selalu berhati-hati dan bijak dalam memilih produk atau layanan keuangan digital, termasuk menyikapi tawaran-tawaran investasi yang tidak logis yang semakin marak ditawarkan khususnya di masa pandemi dan tawaran-tawaran untuk pinjaman dana *online* (pinjol) yang terkesan mudah dan cepat, namun dengan bunga dan biaya sangat tinggi. Dengan pemahaman digital yang memadai, konsumen tidak akan mudah ditipu atau jadi korban kejahatan digital.
- **Tersedianya kelengkapan petunjuk teknis, mencakup jenis program, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kegiatan di pusat maupun daerah.** Petunjuk yang disusun diharapkan mampu melihat permasalahan secara spasial dan menawarkan solusi yang implementatif. Usulan solusi ini sangat relevan untuk mengatasi tantangan berupa perluasan dan kesetaraan akses terhadap produk/layanan digital.
- **Fasilitasi *business matching*, terutama bagi beberapa sektor usaha yang berdaya tahan dan sedang berangsur pulih.** *Linkage* antar sektor ekonomi terhadap industri dengan skala industri yang lebih tinggi di atasnya mampu mempercepat perbaikan produksi dan kembali mendorong belanja sektor swasta.
- **Regulasi dan penciptaan *omnichannel* untuk kemudahan akses terhadap penyelesaian pengaduan konsumen.** K/L terkait dapat membuat regulasi yang bersifat terstandarisasi untuk penyelesaian pengaduan konsumen atas penggunaan produk/layanan digital. *Omnichannel* sangat bermanfaat untuk mengakomodasi seluruh kalangan konsumen mulai generasi lanjut sampai dengan generasi z.

b. Solusi Jangka Menengah Panjang (*Medium Terms*)

Adapun solusi jangka menengah panjang (*medium terms*) yang dapat disiapkan untuk penguatan perlindungan konsumen mencakup:

- **Percepatan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).** RUU ini akan bersifat sebagai aturan payung bagi K/L untuk mengatur lebih detail dan mengimplementasikan perlindungan data konsumen sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. RUU juga akan dilengkapi aturan sanksi yang bersifat pemaksa untuk pelanggaran, termasuk aturan pidana, sehingga menciptakan *deterrence effect*.
- **Reformasi regulasi perlindungan konsumen oleh K/L terkait.** Reformasi ini perlu dilakukan untuk: (i) harmonis ketentuan perlindungan konsumen baik antar-K/L maupun internal K/L tersebut; (ii) komitmen pelaksanaan perlindungan konsumen oleh K/L terkait untuk mendorong terwujudnya keyakinan konsumen (*consumer confidence*) dan pasar (*market confidence*); dan (iii) memastikan perlindungan konsumen Indonesia sejalan dengan perkembangan praktik terbaik internasional.
- **Peningkatan titik akses layanan keuangan di daerah, termasuk yang berbasis digital.** BPD dapat mengambil peran sebagai katalisator dalam perluasan akses keuangan dengan menjadi bank perantara bagi agen inklusi keuangan. Kolaborasi antar-K/L juga diperlukan, misalnya sinkronisasi antara TP2DD Bank Indonesia dan TPAKD OJK.
- **Penciptaan saluran penyelesaian pengaduan konsumen digital yang bersifat *end-to-end*.** Mencakup, mulai dari penyampaian pengaduan pada level pertama kepada produsen, disertai akses terhadap penyelesaian permasalahan pada level regulator jika penyelesaian oleh penyedia produk/layanan tidak memuaskan, sampai dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelenggara *alternative dispute resolution* sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- **Dukungan insentif biaya transaksi yang lebih murah guna menstimulus penggunaan produk dan layanan digital yang lebih luas.** Termasuk dalam insentif ini adalah yang diberikan kepada daerah yang berhasil mendorong percepatan akses dan digitalisasi keuangan daerah.

- **Implementasi Suptech.** Banyak regulator mencari solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan mereka. Penggunaan teknologi memungkinkan regulator untuk mengidentifikasi dan memantau risiko dengan lebih baik dan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu arus informasi dan interaksi antara regulator dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

4.4 Akselerasi Menuju Ekonomi Hijau

Pemerintah perlu mengakselerasi kebijakan penerapan ekonomi hijau.

Percepatan ini ditujukan untuk segera menyelamatkan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat mengganggu perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan iklim turut memengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan harga pangan dalam jangka pendek. Sementara itu, kerusakan alam akibat perubahan iklim dapat menghalangi pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang merupakan prasyarat bagi transformasi Indonesia menjadi ekonomi yang maju.

Upaya mendorong upaya dekarbonisasi melalui penguatan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang sudah berjalan. Kebijakan ini dapat menjadi *backbone* strategi pemulihan yang akan mengantarkan Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Kebijakan PRK yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 perlu terus diperkuat. Melalui PRK, *trade-off* antara pembangunan ekonomi dan isu-isu lingkungan yang terkait dengan dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. Indikator keberhasilan PRK yaitu Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan per satuan *output* ekonomi) diharapkan turun secara bertahap melalui proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi bersih (energi baru terbarukan), peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas.

Beberapa langkah strategis dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah membangun fondasi penerapan ekonomi hijau. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui skema APBN dan non-APBN dalam pembiayaan program ekonomi hijau. Di masa pandemi, program ekonomi hijau

inklusif terus dilakukan sejalan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun perekonomian Indonesia yang kuat, tumbuh dan berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia saat ini menjadi momentum menuju ekonomi hijau. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan manusia. Stimulus pemerintah diperlukan untuk menangani dampak pandemi tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan aspek keberlanjutan, salah satunya dalam memetakan sektor mana yang memperoleh stimulus. Pemetaan tersebut diperlukan untuk melihat sektor mana saja yang dapat bertahan terhadap segala kondisi, termasuk kondisi pandemi saat ini. Pemerintah juga perlu menentukan sektor usaha prioritas yang menjadi fokus dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19.

4.5 Mendorong Transisi Energi Menuju Ekonomi Hijau

Pemerintah perlu terus mendorong transisi energi melalui peralihan dari energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini sebagai langkah menuju persiapan industri hijau yang kompetitif dan berdaya saing di masa depan. Dengan penggunaan EBT maka diharapkan dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dengan energy fosil. Laporan *World Resource Institute* (2021) menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-8 sebagai negara penyeter emisi terbesar di dunia. Temuan tersebut sejalan dengan laporan *Swiss Re Institute* (Swissre, 2021) yang memprediksi dampak ekonomi dari kenaikan suhu global 3,2 derajat Celsius pada tahun 2050. Dampak tersebut berupa potensi kehilangan hingga 18% dari PDB jika tidak ada tindakan yang diambil terhadap perubahan iklim.

Saat ini, Pemerintah telah menetapkan target penggunaan EBT mencapai 23% dari energi primer pada tahun 2025. Dengan target tersebut, diharapkan pengurangan emisi karbon bisa mencapai 29-41% berdasarkan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) pada 2030 dan *net zero emission* (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Selain menyediakan pembangkit yang bersumber dari EBT, pemerintah telah memperkenalkan *Clean Coal Technology* (CCT) dan mendorong pembangkit *variable renewable energy* (VRE) seperti pembangkit

tenaga angin. Inovasi CCT, meskipun bukan tanpa kontroversi, diklaim mampu mendorong batu bara menghasilkan energi lebih besar dengan tingkat emisi dan polutan yang lebih sedikit.

Langkah besar Indonesia pada tahun 2022 menjadi momen yang tepat bagi eskalasi pengembangan mobil listrik di Indonesia. Terlebih di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini yang telah melonjak di atas USD 100 per barel akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk mengembangkan kendaraan listrik. Namun, transisi kendaraan *internal combustion engine* (ICE) ke kendaraan listrik bukanlah sebuah hal yang mudah dan membutuhkan waktu. Kondisi ini disebabkan transisi mobil listrik untuk mengurangi emisi karbon secara langsung akan mempengaruhi ekosistem industri otomotif.

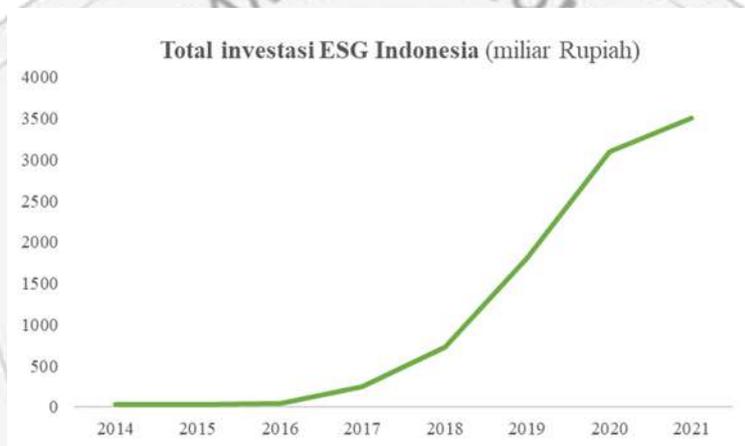
Secara keseluruhan, transisi ekonomi hijau masih berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Laporan *Green Economy Index* (GEI) menunjukkan transisi kepada ekonomi hijau dapat meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia secara rata-rata 6,1-6,5% per tahun hingga 2050. Di sisi lain, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dapat lebih tinggi di rentang 25-34 persen pada 2045. Ekonomi hijau juga berpotensi menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di sektor *green jobs* pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan elektronik, restorasi lahan, dan sektor limbah.

4.6 Akselerasi Investasi dan Pembiayaan Ekonomi Hijau

Sejalan dengan dinamika perekonomian global, diperlukan kebijakan untuk terus mendorong investasi dan pembiayaan hijau di Indonesia. Meroketnya tren investasi hijau merupakan efek dari meningkatnya perhatian investor pada isu-isu lingkungan. Isu soal krisis global misalnya, mendorong hadirnya produk atau instrumen investasi yang berkaitan dengan lingkungan. Tercatat, hampir 2.400 pengelola dan pemilik aset keuangan yang menandatangani komitmen UN *Principles for Responsible Investment* (PRI), dengan total pengelolaan dana 86 triliun dolar AS. Sementara itu, survei terakhir yang dilakukan *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA) pada 2021, menunjukkan nilai total aset investasi hijau dunia mencapai 35,3 triliun dolar AS atau lebih dari Rp513.000 triliun.

Saat ini, tren investasi hijau berbasis *Environmental, Social and Governance (ESG)* di pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini terjadi sejak pertama kali diluncurkan pada 2014. Saat ini semakin banyak investor maupun industri yang mengedepankan prinsip kelola ekonomi hijau dalam menentukan lokasi investasi. Perkembangan produk berbasis ESG juga terjadi pada produk investasi lainnya di pasar modal seperti reksadana. Berdasarkan data OJK per 13 Mei 2022, terdapat 25 reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Adapun produk reksadana dengan *underlying asset* ESG mencatatkan total nilai aktiva bersih sekitar Rp3,5 triliun (**Grafik 19**).

Grafik 19. Total Investasi ESG Indonesia Tahun 2014-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Minat portofolio investasi hijau semakin meningkat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penerbitan POJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang mengidentifikasi 11 jenis portofolio hijau yang perlu dilaporkan oleh sektor keuangan. *Climate Policy Initiative (CPI)* Indonesia menyatakan bahwa hasil studi terkait Taksonomi Hijau Indonesia dinilai terbukti mendorong peningkatan investasi hijau di Indonesia. Apabila taksonomi diperkuat dan diharmonisasi dengan instrumen hukum serupa, maka potensi investasi hijau akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha yang berhasil mendapat label hijau.



Halaman ini sengaja dikosongkan

REFERENSI

- Adrison, Vid, and Masarina Flukeria. 2016. "Lowering Regional Inflation? Improve Budget Absorption." *Economics and Finance in Indonesia* 62(2): 67–77.
- Anderson, H., et al., 2020, Staff Report: The Effect of the Central Bank Liquidity Support during Pandemics: Evidence from the 1918 Influenza Pandemic, New York: Federal Reserve Bank of New York.
- Antaraneews.com. 2022. "Sikapi Tantangan Global, Presiden Jokowi Minta Masukan Para Ekonom." <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/204613/sikapi-tantangan-global-presiden-jokowi-minta-masukan-para-ekonom> (August 4, 2022).
- Baldwin, R. (2020). The supply side matters: Guns versus butter, COVID-style, CEPR paper, March.
- Bank Indonesia. 2022. *Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan II 2022*.
- Cassim, Z., et al., 2020, McKinsey Public & Social Sector Insight Article "The \$10 trillion rescue: How governments can deliver impact?" (5 Juni 2020), McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/the-10-trillion-dollar-rescue-how-governments-can-deliver-impact#>, terakhir diakses 31 Oktober 2020.
- Chaloupka, Frank J, Ayda Yurekli, and Geoffrey T Fong. 2012. "Tobacco Taxes as a Tobacco Control Strategy." *Tobacco Control* 21(2): 172–80.
- Chen. L. & Spence, M. (2020). Five lessons from tracking the global pandemic economy, CEPR paper, July.
- Consensus Economics, 2020, *Asia Pacific Consensus Forecast (October 2020)*, London: Consensus Economics Inc.
- Epstein, J.M., Parker, J., Cummings, D., dan Hammond, R.A. (2008). Coupled Contagion Dynamics of Fear and Disease: Mathematical and Computational Explorations. *PLoS ONE*, 3(12): e3955.
- International Monetary Fund , 2020, *World Economic Outlook (October 2020)*, Washington D.C.: IMF.
- International Monetary Fund. 2022. *World Economic Outlook Update, July 2022: Gloomy and More Uncertain*.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (2020), Memperkuat Model Pertumbuhan, Mempertajam Strategi Kebijakan guna Mewujudkan Indonesia Maju dan Inklusif. Februari.
- Juhro, S.M. (2020), *Central Bank Policy Mix: Memperkuat Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Mengawal Era Kenormalan Baru*, Bahan tayangan *Open Lecture Series*, Bank Indonesia Institute, September
- Laporan Economic Update BRIDS: Strategi di Tengah Ketidakpastian, Juli 2022. Liber, Alex C, Hana Ross, Sophapan Ratanachena, E Ulysses Dorotheo, and Kin Foong.

2015. "Cigarette Price Level and Variation in Five Southeast Asian Countries." *Tobacco Control* 24 (e2): e137–41. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051184>.
- Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan II 2022. Bank Indonesia
- Laporan Economic Update BRIDS: Strategi di Tengah Ketidakpastian, Juli 2022,
- Liber, Alex C et al. 2015. "Cigarette Price Level and Variation in Five Southeast Asian Countries." *Tobacco Control* 24(e2): e137–41.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. "KSSK Antisipatif Terhadap Tantangan Global Melalui Koordinasi Yang Lebih Erat [Press Release]." <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/KSSK-Antisipatif-Terhadap-Tantangan-Global-Melalui-Koordinasi-yang-Lebih-Erat.aspx> (August 1, 2022).
- Prasetyo, B.W., and V. Adrison. 2020. "Cigarette Prices in a Complex Cigarette Tax System: Empirical Evidence from Indonesia." *Tobacco Control* 29 (6): 618–23. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054872>.
- Pukuh, N. & Widyasthika, H.F., 2017. When Growth is Inclusive in Indonesia?. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), 195-209. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.19>
- Shang, C, H M Lee, F J Chaloupka, G T Fong, M Thompson, and R J O'connor. 2019. "Association between Tax Structure and Cigarette Consumption: Findings from the International Tobacco Control Policy Evaluation (ITC) Project." *Tobacco Control* 28: S31–36. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-054160>.
- Siaran Pers OJK. KSSK Antisipatif Terhadap Tantangan Global Melalui Koordinasi Yang Lebih Erat. Nomor: 03/KSSK/Pers/2022
- Sikapi tantangan global, Presiden Jokowi minta masukan para ekonom. <https://gorontalo.antaranews.com/> diakses pada 4 Agustus 2022
- Warjiyo, P (2020), Sinergi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Kenormalan Baru, Bahan tayangan Diskusi Publik ISEI, Agustus.
- Warjiyo, P. & Juhro, S. M., 2016. Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2020, Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses, Ed. 1, Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- World Bank, 2020, *Global Economic Prospect (Juni 2020)*, Washington D.C.: World Bank.
- World Economic Outlook Update, July 2022. IMF

